

DISERTASI

**ANALISIS PENGGUNAAN KOMUNIKASI DIGITAL DALAM
PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP SINKRONISASI
PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

OLEH

MUHAMMAD ISMAIL TANRI

NIM: E033191002



**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**ANALISIS PENGGUNAAN KOMUNIKASI DIGITAL DALAM
PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP SINKRONISASI
PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Doktor

Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

Muhammad Ismail Tanri
Nomor Pokok: E033191002

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**ANALISIS PENGGUNAAN KOMUNIKASI DIGITAL DALAM
PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP SINGKRONISASI
PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan diajukan oleh

MOHAMAD ISMAIL TANRI

E033191002

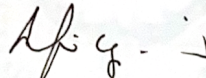
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 2 Oktober 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc.

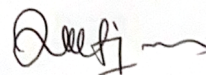
NIP 195204121976031017

Ko. Promotor,



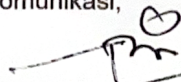
Prof. Dr. Sangkala, MA.
Nip 19631111199031002

Ko. Promotor,



Dr. Ir. Zulfajri Basri Hasanuddin, M.Eng.
NIP 196901241993031001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.
NIP 196107161987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Ismail Tanri

Nim : E033191002

Program Studi : Ilmun Komunikasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan Salinan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan Disertasi ini adalah karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Oktober 2024

Menyatakan

MUHAMMAD ISMAIL TANRI

ABSTRAK

Judul Disertasi: **“ANALISIS PENGGUNAAN KOMUNIKASI DIGITAL DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP SINKRONISASI PEMBANGUNAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT”**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan komunikasi digital dan digitalisasi dalam perencanaan pembangunan berbasis e-Government di Provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten, serta informan terkait perencanaan pembangunan daerah. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Government dalam perencanaan pembangunan daerah di Sulawesi Barat menghadapi tantangan dalam sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Implementasi e-Government di daerah ini membutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan kesamaan visi antara kedua pelaksana pembangunan. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama konektivitas internet yang handal, menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan pelayanan publik elektronik. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya sinkronisasi visi dan misi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, dan kurangnya konsistensi dalam penggunaan e-Government perlu diatasi. Disarankan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat fokus pada perencanaan dan manajemen yang baik serta pemeliharaan infrastruktur e-Government. Kolaborasi antara pemprov dan Pemkab perlu ditingkatkan melalui pertemuan rutin dan forum diskusi. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan pendekatan integratif dalam perencanaan dan pembangunan daerah, dengan melibatkan kedua pihak dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam e-Government dan strategi komunikasi yang efektif juga perlu diperhatikan.

Kata Kunci: *Komunikasi digital, Digitalisasi, Perencanaan pembangunan, e-Government*

ABSTRACT

Title of Dissertation: "ANALYSIS OF THE USE OF DIGITAL COMMUNICATION IN THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT TOWARDS SYNCHRONIZATION OF DEVELOPMENT IN WEST SULAWESI PROVINCE"

This research aims to analyze the usage of digital communication and digitalization in e-Government-based development planning in West Sulawesi Province. The research method used is qualitative, collecting primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with officials from the West Sulawesi Provincial Development Planning Agency and related informants involved in regional development planning. Secondary data was obtained through documentation study. The data analysis technique employed involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the implementation of e-Government in regional development planning in West Sulawesi faces challenges in synchronizing planning between the Provincial Government and Districts. Successful e-Government implementation in the region requires collaboration, coordination, and shared vision between the two implementing bodies. Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, particularly reliable internet connectivity, plays a crucial role in enhancing information accessibility and electronic public services. However, challenges such as inadequate infrastructure, lack of synchronized vision and mission, limited human resources with technology understanding, and inconsistent e-Government usage need to be addressed. It is recommended that the West Sulawesi Provincial Government focus on effective planning, management, and maintenance of e-Government infrastructure. Collaborative efforts between the provincial and district governments need to be strengthened through regular meetings and discussion forums. The involvement of both parties in decision-making can be considered through an integrative approach to regional planning and development. Additionally, enhancing the competencies of human resources involved in e-Government and implementing effective communication strategies should also be taken into account.

Keywords: *Digital communication, Digitalization, Development planning, e-Government*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan inayah - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “**Analisis Penggunaan Komunikasi Digital dalam Penerapan E-Government Terhadap Sinkronisasi Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat**” dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Adapun tujuan penulisan disertasi penelitian ini sebagai syarat untuk memuhi tugas akhir program doktor S-3 Komunikasi Universitas Hasanudin, selain itu disertasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi awal terkait rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bagi para pembaca.

Dalam penyusunan disertasi penelitian ini banyak sekali kendala dan hambatan yang penulis dapatkan, namun berkat dorongan dan motivasi yang diberikan dan disertai harapan yang kuat sehingga semuanya itu dapat dihadapi oleh penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan disertasi penelitian, tidak akan terlaksana dan berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc. sebagai Promotor I, Bapak Prof Dr. Sangkala, MA dan Bapak Dr. Ir. Zulfajri Basri Hasanuddin, M. Eng selaku Promotor II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama dalam berbagi pengetahuan, dan berdiskusi berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.

Saya menyadari, disertasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan disertasi penelitian ini.

Makasar, April 2024

Muhammad Ismail Tantri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Signifikansi Penelitian.....	17
G. Limitasi dan Delimitasi Penelitian	17
H. Nilai kebaruan (novelty) Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Komunikasi	21
B. Komunikasi Pemerintah.....	23
C. Perencanaan Pembangunan Daerah	32
D. Teknologi Komunikasi dan Informasi	47
E. E-Government untuk Pemerintahan yang Lebih Baik.....	51
F. E-government selama 10 Tahun: Analisis Perbandingan E-government di Beberapa Negara di Seluruh Dunia	57
G. Tren Perkembangan E-Government.....	83
H. Kerangka E-Governance di Tingkat Pemerintahan Lokal	87
I. Beberapa Teori yang relevan.....	116
J. Hasil Penelitian Terdahulu	145
K. Kerangka Pikir.....	156
L. Definisi Operasional.....	161

M. Asumsi	163
BAB III METODE PENELITIAN.....	165
A. Paradigma Penelitian.....	165
B. Tipe Penelitian	166
C. Lokasi Penelitian.....	167
D. Unit Analisis	168
E. Sumber Data.....	170
F. Teknik Pengumpulan Data.....	172
G. Analisis Data	174
H. Uji Keabsahan Data	177
I. Keterbatasan dalam Penelitian	181
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	182
A. Propinsi Sulawesi Barat.....	182
B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat	190
BAB V HASIL PENELITIAN	199
A. Kebijakan Dasar dan Renstra Pengadaan dan Pengembangan E-Government di Propinsi Sulawesi Barat.....	199
B. Sinkronisasi Perencanaan Program Propinsi dan Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat.....	202
C. Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan e-government dalam menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	210
D. Proses Transformasi E-government di Indonesia dan Sulawesi Barat dari Manual ke Digital dalam melayani Publik.....	220
E. Pola penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat	229
F. Tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun terakhir setelah penerapan E-Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat, dan sektor paling krusial yang dihadapi menunjang sinkronisasi perencanaan yang dimaksud	236
G. Tantangan sektor paling krusial yang dihadapi menunjang sinkronisasi perencanaan.....	245
H. Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan sistem E-Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat.....	250
I. Sinkronisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Antara	

Provinsi Dan Kabupaten Di Sulawesi Barat.....	256
J. Model Exiting Penggunaan Komunikasi Digital Dalam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Antara Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat.....	271
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	274
A. Kebijakan Dasar dan Renstra Pengadaan dan Pengembangan E- Government di Propinsi Sulawesi Barat.....	275
B. Singkronisasi Perencanaan Program Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Barat.....	276
C. Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan e-government dalam menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	278
D. Proses Transformasi E-government di Indonesia dan Sulawesi Barat dari Manual ke Digital dalam melayani Publik.....	279
E. Pola penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara Perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat	281
F. Tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun terakhir setelah penerapan E- Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat.....	283
G. Tantangan sektor paling krusial yang dihadapi menunjang sinkroinisasi perencanaan.....	284
H. Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan sistem E- Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat.....	286
I. Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Antara Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat.....	288
J. Model Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan berbasis e-government Provinsi Sulawesi Barat	297
BAB VII P E N U T U P	307
A. Kesimpulan	307
B. Keterbatasan Penelitian.....	309
C. Saran-Saran	309
DAFTAR PUSTAKA.....	313
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	322

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Aplikasi Pendukung penerapan E-government	9
Tabel 1. 2 Aplikasi yang ada Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.	10
Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Menangani Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	12
Tabel 2. 1 Ringkasan keuntungan dan tantangan terkait inisiatif e-government	65
Tabel 2. 2 Strategi Operasional e-government Empat Lapisan	113
Tabel 2. 3 Perubahan paradigma dari sistem e-government saat ini menjadi sistem e-government di masa depan.....	114
Tabel 2. 4 Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Hasil Kajian Disertasi ini	152
Tabel 4. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022.....	184
Tabel 4. 2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.....	185
Tabel 4. 3 Distribusi Persentase Penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020 dan 2022.....	187
Tabel 4. 4 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat 2023.....	188
Tabel 4. 5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Prop. Sulawesi Barat, 2022	189
Tabel 4. 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2021 dan 2022	190
Tabel 5. 1 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	202
Tabel 5. 2 Validasi Data dan OPD Penanggung Jawab	208
Tabel 5. 3 Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026	212
Tabel 5. 4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat	213
Tabel 5. 5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	213
Tabel 5. 6 Aplikasi yang ada Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	216
Tabel 5. 7 Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).....	219
Tabel 5. 8 Dashboard Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Provinsi Sulawesi Barat	222
Tabel 5. 9 Teknologi Aplikasi di OPD Berdasar Layanan SPBE	223
Tabel 5. 10 Platform yang digunakan di provinsi Sulawesi Barat	224
Tabel 5. 11 Aplikasi Pendukung penerapan E-government di Sulawesi Barat	226

Tabel 5. 12 Program Pembangunan Daerah & Pagu Indikatif	232
Tabel 5. 13 Program Pembangunan Daerah & Pagu Indikatif	234
Tabel 5. 14 Report Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023	236
Tabel 5. 15 Detil Peta Rencana Infrastruktur	245
Tabel 5. 16 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Menangani	251
Tabel 5. 17 SDM Pemprov Sulawesi Barat	255
Tabel 5. 18 Singkronisasi Misi RPJMD	257
Tabel 5. 19 Sinkronisasi Misi RPJMD	259
Tabel 5. 20 Singkronisasi Misi RPJMD	261
Tabel 5. 21 Sinkronisasi Misi RPJMD	263
Tabel 5. 22 Sinkronisasi Misi RPJMD	265
Tabel 5. 23 Sinkronisasi Misi RPJMD	268

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Vertical dan Horizontal Integrasi (Layne & Lee, 2001) ...	63
Gambar 2. 2 Fase-fase Indeks Pengukuran Web (Laporan PBB, 2008)	63
Gambar 2. 3 Model Kematangan E-government 2001 (Layne & Lee, 2001)	67
Gambar 2. 4 Pembaruan pada Kematangan E-government	68
Gambar 2. 5 Tingkatan Sistem Pemerintahan Korea Selatan	105
Gambar 2. 6 Kerangka E-Government Korea Selatan (Diadopsi dari Kim, 2002).....	107
Gambar 2. 7Konsep E-Government Lokal (Diadopsi dari Open Society Institute, 2007)	107
Gambar 2. 8 Kemitraan yang Meningkat di Tingkat Lokal dengan Melibatkan Semua Pihak Terkait.....	109
Gambar 2. 9 Kerangka kerja e-government empat dimensi	112
Gambar 2. 10 Kerangka Pikir.....	160
Gambar 3. 1 Unit Analisis Penelitian	169
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat	183
Gambar 4. 2 PiramidaPenduduk Provinsi Sulawesi Barat, 2022	186
Gambar 4. 3 Struktur Bagan Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	193
Gambar 5. 1 Singkronisasi Domain SPBE Antara Pusat dan Daerah	204
Gambar 5. 2 Sebaran teknologi aplikasi dan jenisnya yang digunakan di Pemprov Sulbar	223
Gambar 6. 1 Model Komunikasi digital yang efektif dalam sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.....	301

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat yang ditandai dengan munculnya internet sebagai media baru. Internet menjadi tulang punggung komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu (Rosana, 2010; Puspita, 2015). Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok mengubah cara orang berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas virtual. Pesan instan melalui WhatsApp, WeChat, dan Telegram memfasilitasi komunikasi cepat antar individu dan kelompok. Teknologi seluler memungkinkan akses internet dan komunikasi digital dari mana saja. Konten multimedia semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kecepatan internet. Kolaborasi online melalui Google Docs, Slack, dan MS Teams memungkinkan kerja sama real-time antar tim yang tersebar. Pembelajaran jarak jauh dan telemedis juga didukung oleh teknologi komunikasi digital. E-commerce pun mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan secara digital.

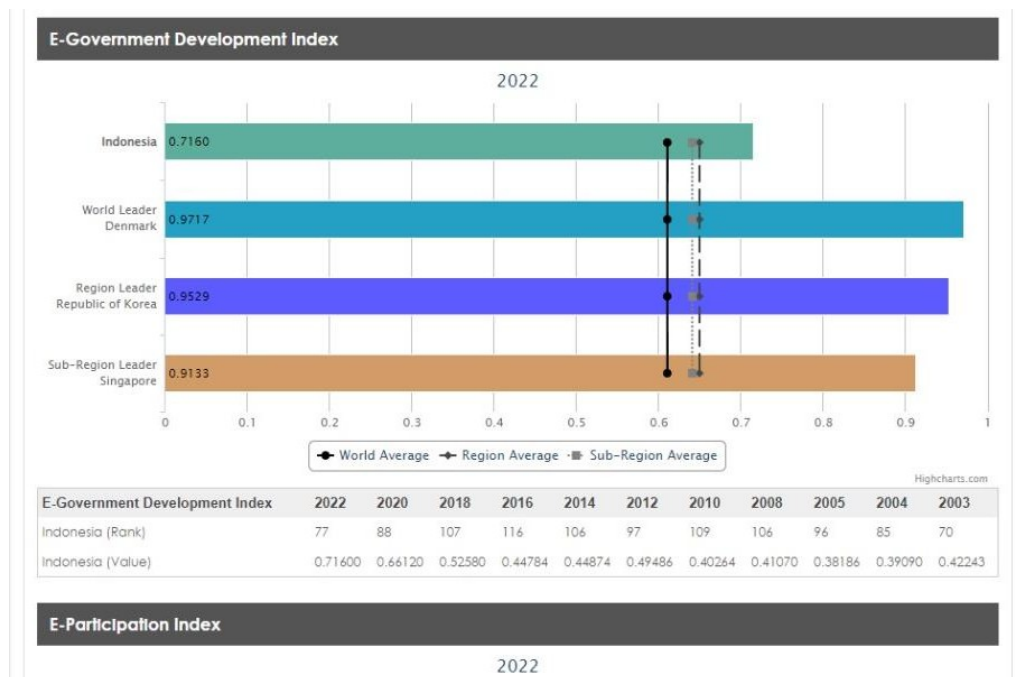
Perkembangan ini memunculkan budaya partisipasi dimana setiap orang dapat berpartisipasi dalam proses produksi dan distribusi informasi melalui platform media sosial, pesan instan, konten multimedia, dan kolaborasi online (Jenkins, et al., 2016). Mc Luhan (1962) dalam Determinism Theory menjelaskan bahwa penemuan teknologi komunikasi

menyebabkan perubahan budaya dimana media yang digunakan mempengaruhi pikiran penerima dan mengubah cara berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah pola hubungan dan interaksi antar manusia. Perubahan ini sering disebut mediamorfosis, dimana media baru tidak muncul begitu saja tanpa keterkaitan dengan media sebelumnya, namun muncul secara bertahap dari metamorfosis media terdahulu (Fidler, 1960).

Pemerintah di berbagai negara telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya melalui implementasi e-government (Chen dan Aklirikou, 2021). E-government mengacu pada penyampaian informasi dan layanan pemerintah secara online melalui internet atau cara digital lainnya dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Muir dan Oppenheim, 2002; West, 2004; Alomari, 2014). Banyak negara seperti Korea Selatan dan Yordania telah sukses menerapkan e-government. Namun penerapan e-government juga menghadapi tantangan seperti rendahnya penggunaan publik di Rusia dan ketimpangan akses di daerah pedesaan Malaysia.

Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan e-government melalui berbagai kebijakan seperti Inpres No. 6 Tahun 2001, Inpres No. 3 Tahun 2003, dan Perpres No. 96 Tahun 2014 untuk mewujudkan good governance dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) juga digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, serta transparansi. Dalam Survei E-Government PBB 2022, Denmark

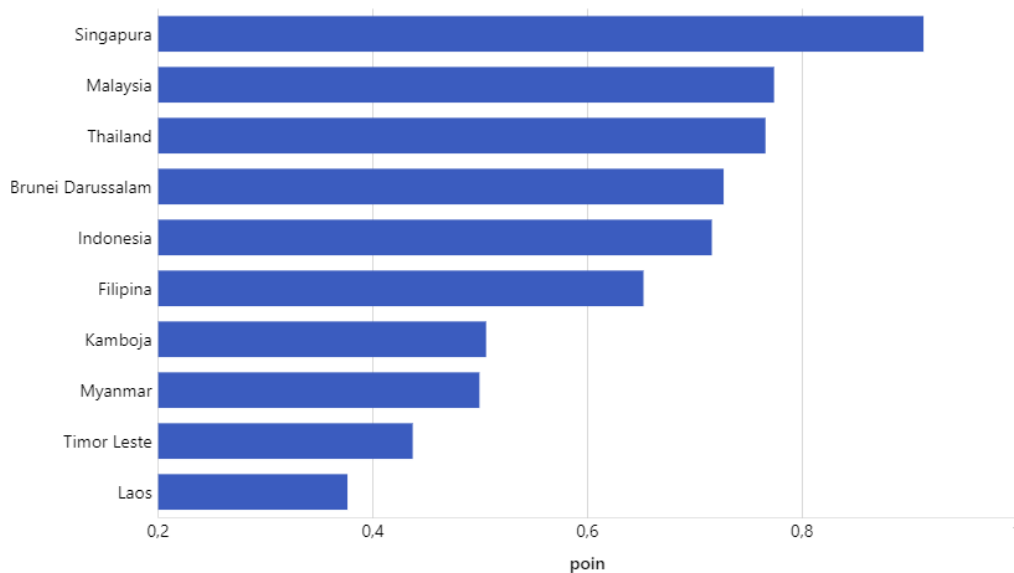
merupakan negara dengan skor pengembangan e-Government (EDGI) tertinggi di dunia dengan skor 0.9717 dari 1 poin. Survei ini menggunakan metodologi berdasarkan tiga pilar utama yaitu Online Service Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII), dan Human Capital Index (HCI).



Gambar 1 Tangkapan layar United Nations (UN) E-Government Survey 2022

Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai negara dengan sistem e-Government terbaik pada tahun 2022. Singapura menduduki peringkat teratas dengan skor EGDI 0.9133 poin dan peringkat ke-12 dunia, diikuti Malaysia (0.7740), Thailand (0.7660), dan Brunei Darussalam (0,7270). Di bawah Indonesia, ada Filipina (0.6523), Kamboja (0.5056), Myanmar (0.4994), Timor Leste (0.4372), dan Laos (0.3764) sebagai negara dengan skor EGDI terendah di Asia Tenggara.

10 Negara dengan Skor Indeks Pengembangan E-Government/
EGDI Tertinggi (2022)



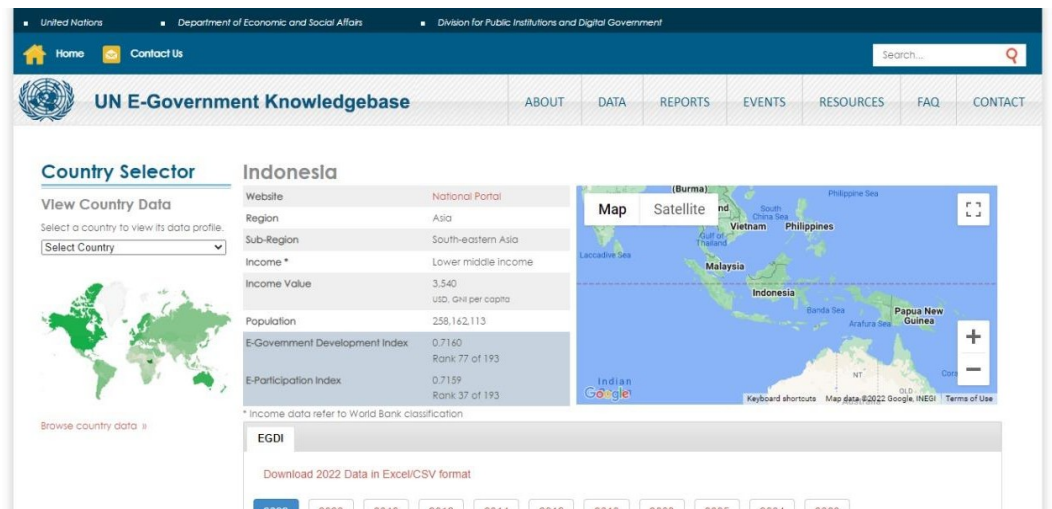
Sumber:
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Informasi Lain:

Gambar 2 10 Negara dengan Skor Indeks Pengembangan E-Government/ EGDI Tertinggi (2022)

Pemerintah Indonesia telah mendorong penggunaan e-Government melalui berbagai kebijakan seperti Inpres No. 6 Tahun 2001, Inpres No. 3 Tahun 2003, dan Perpres No. 96 Tahun 2014 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) juga digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, serta transparansi. Berdasarkan UN E-Government Survey 2022, Indonesia berada di peringkat 77 dunia, naik dari peringkat 88 pada tahun 2020 dan 107 pada tahun 2018. Indonesia masuk dalam kelompok High EGDI dengan skor 0.71600. Pada penilaian tiga dimensi, Indonesia mencatat skor di atas rata-rata dunia. Dalam E-

Participation Index, Indonesia naik peringkat 20 menjadi 37 dengan skor 0.71590, di atas rata-rata dunia, Asia, dan Asia Tenggara. Indonesia juga masuk kategori Indeks Data Pemerintahan Terbuka Sangat Tinggi dengan skor 0.9014.



Gambar 3 Tangkapan layar United Nations (UN) E-Government Survey 2022

Namun implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi pembangunan (Soares, dkk, 2015; Hapsari, dkk. 2020). Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan e-government sebagai media komunikasi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat karena keterbatasan saluran komunikasi dari bawah ke atas (Hapsari, dkk, 2020). Padahal e-government seharusnya tidak hanya sebatas penyediaan informasi dan layanan, namun juga sebagai alat partisipasi dan menghasilkan kebijakan yang melibatkan

masyarakat (Myeong, dkk, 2014).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan e-government sebagai media komunikasi digital dalam proses sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Dengan memanfaatkan fitur-fitur interaktif e-government, diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dua arah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Pemerintah perlu terus fokus memperbaiki penerapan SPBE terutama penguatan infrastruktur telekomunikasi agar pemanfaatan e-government dapat lebih optimal.

B. Permasalahan Penelitian

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur dalam UU No 25 Tahun 2014. Dalam UU tersebut memiliki tujuan untuk bertujuan untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah maka berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini gubernur punya tanggung jawab mensinkronisasikan rencana pembangunan dari

pendekatan dari bawah- atas dan pendekatan atas bawah dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah agar tercipt pembangunan yang efisien, efektif, serta berintegrasi sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Gubernur dalam hal ini BAPPEDA bertanggung jawab dalam optimilisasi penyesuain antara RPJP nasional dengan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan RPJM Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri menyiapkan rancangan RPJP dan RPJM nasional dan pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP dan RPJM daerah sebagai bahan untuk pelaksanaan Musrenbang. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional fungsi sinkronisasi dan koordinasi menjadi penting untuk dilakukan. Peran Gubernur dalam hal ini Bappeda untuk melakukan sinkronisasi ada hal yang sangat penting.

Untuk melaksanakan proses sinkronisasi perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam UU No 25 Tahun 2014 pasal 33:

1. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
3. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

Berdasarkan hal ini proses perencanaan pembangunan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dibantu oleh BAPPEDA dan proses Sinkronisasi, Integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota menjadi tanggung jawab gubernur yang dibantu oleh BAPPEDA. Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat maka didukung oleh suatu sistem informasi sebagaimana yang disebutkan dalam pemengagri no 26 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pasal 1 poin 67 disebutkan bahwa:

“Sistem pembangunan informasi daerah yang selanjutnya di singkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan mengadminstrasikan serta mengolah data pembangunan daerah”.

Berdasarkan hal ini Gubernur yang di bantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar kabupaten di Sulawesi Barat semestinya didukung oleh sistem informasi yang berbasis teknologi e- government yang mendokumentasikan, mengadminstrasikan, dan mengolah data pembangunan dari bawah-atas dan dari atas -bawah.

Salah satu provinsi yang memiliki kompleksitas masalah dalam singkronisasi perencanaan pembangun yakni provinsi Sulawesi Barat. Untuk menguatkan singkronisasi dalam perencanaa, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Barat. Dalam peraturan Gubernur ini menekankan bahwa

pelaksanaan pemerintahan harus berbasis pada elektronik termasuk didalamnya terkait perencanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi barat telah memanfaatkan aplikasi E-government dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan aplikasi ini bukan hanya pada level pemerintah provinsi saja, tetapi juga pada SKPD maupun pemerintah kabupaten/kota. Bahkan pemanfaatan komunikasi digital di provinsi Sulawesi Barat dianggap cukup signifikan. Bahkan aplikasi yang tersedia untuk penerapan E-Government mencapai ratusan. Adapun aplikasi pendukung yang ada yakni sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Aplikasi Pendukung penerapan E-government di Sulawesi Barat

Nama	Total
Aplikasi Internal	59 Aplikasi
Aplikasi Eksternal	49 Aplikasi
Website	56 Website
Domain	1 Domain
Sub Domain	110 Sub Domain

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data Sekunder, 2023

Data ini menunjukkan bahwa Pemprov Sulbar telah memiliki infrastruktur teknologi yang lumayan lengkap dalam menjalankan pemerintahan berbasis digital atau yang lebih kenal dengan E-Govermen. Namun demikian, ketersediaan ratusan aplikasi serta puluhan website ini tidak berjalan optimal, bahkan beberapa diantaranya tidak aktif. Berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berikut klasifikasi aplikasi di pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat yang aktif dan tidak aktif:

Tabel 1. 2 Aplikasi yang ada Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

INTERNAL – 59 Aplikasi (Server lokal)	
Aktif	Tidak Aktif
1. Simda Perencanaan	1. Boyang Aplikasi/ Rumah Aspirasi
2. Simda Keuangan	2. E-FORMASI
3. Sipamandar	3. SSP. ONLINE
4. Covid19.sulbarprov.go.id	4. SISKUM
5. Bursa Kerja On-Line	5. SILAPPDA (Pelaporan Kinerja OPD)
6. Pantau Covid Sulawesi Barat	6. SIM ASET TANAH PENATAAN ASET
7. Core-SIDD (Sistem Informasi Data Dinamis)	7. SISTEM INFORMASI PERSURATAN
8. download.sulbarprov.go.id/Cloud Storage Sulbar	8. ADMICARA (Pengaturan Jadwal Acara Pimpinan)
9. Service Android	9. SILARIANG (Pencatatan Barang)
10. Portal-ats	10. SI PATRIK (Pendataan ketenagalistrikan)
11. Siamasei	11. SIAP (Pendataan Kepegawaian)
12. Siapma	12. Aplikasi Pendamping Ibu Hamil
13. Simaya.sulbarprov.go.id	13. Aplikasi data Input SKPG Ketapang
14. Suratcintaku	14. PENY. PETA (FSVA)
15. WBS.sulbarprov.go.id	15. DEMAPAN Ketapang
16. Siti Belajar (Aplikasi Tugas Belajar Online)	16. SIRAFIK (Realisasi Keuangan dan Fisik) Dinas PU
17. Sidian (Aplikasi Aset Internal)	17. DPPASULBAR (PELAPORAN)
18. SMS Gateway (Pelaporan Bencana)	18. SIMTAP Penanaman Modal
19. Simda BMD	19. SIPK OPD Koperindag
20. Sipada (Perjalanan Dinas BPKPD)	20. SIKD (KEARSIPAN DINAMIS)
21. PDE SAMSAT	21. SIPKALABBI (Informasi Lahan) Pertanian
22. SIEVA (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi) 23. JDIH	22. SPDPT DISTAN SULBAR PERTANIAN
23. E-PPAD	23. SI PER MOM RSUD
24. SRIKANDI	24. SIM-RS RSU
25. Sipemimpin	
26. PAM Sulbar	
27. SIPBM Mateng	
28. SIPBM Majene	
Total 29 Aplikasi Aktif	

INTERNAL – 59 Aplikasi (Server lokal)	
Aktif	Tidak Aktif
	25. SIMLANAS RSU
	26. TAKI MAPIA
	27. e-Planning
	28. Sapo Aspirasi/ Rumah Aspirasi
	29. Disposisi Online
	30. Webgis-perumkin
	Total 30 Aplikasi pasif

Sumber: website Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Data ini menunjukkan bahwa penerapan E-government tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena 59 aplikasi yang ada, hanya 29 aplikasi yang aktif sementara 30 yang pasif bahkan tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjalankan komunikasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal perencanaan pembangunan masih sangat rendah. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam perencanaan pembangunan karena dengan tidak aktifnya beberapa aplikasi, maka perencanaan dilakukan secara manual.

Masalah yang menyebabkan pelaksanaan pemerintah berbasis digital tidak berjalan dengan baik salah satunya disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia. Dimana pegawai yang mampu mengelola database website Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat terbatas. Kurangnya tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengelola menjadi penghambat dalam penerapan E-Government. Disamping itu, keterbatasan SDM dalam hal ini pegawai membuat beban kerja semakin tinggi. Hal ini membuat pengelolaannya belum optimal. Berikut data jumlah pegawai yang mengelola website di pemerintah Provinsi maupun kabupaten yang ada di Sulawesi Barat:

Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia yang Menangani Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

No	BAPPEDA	Jumlah SDM
1	Provinsi Sulawesi Barat	3
2	Kabupaten Mamuju	2
3	Kabupaten Mamuju Tengah	1
4	Kabupaten Majene	1
5	Kabupaten Polewali Mandar	1
6	Kabupaten Mamasa	1
7	Kabupaten Pasang Kayu	1

Sumber : Data Olahan Dari berbagai Sumber 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan sumberdaya manusia menangani Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat terbatas. Dari data ini diketahui bahwa yang menangani SIPPD di 5 kabupaten hanya di isi oleh 1 orang, sementara Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi hanya di isi oleh 2 orang, sementara provinsi hanya terdapat 3 orang. Hal ini menandakan rendahnya ketersediaan sumber daya yang mengelola perencanaan berbasis digital di Sulawesi Barat.

Selain banyaknya aplikasi yang tidak aktif serta terbatasnya sumber daya manusia, masalah lainnya yakni komitmen kepala daerah. Dimana baik Gubernur maupun bupati di Sulawesi Barat memiliki janji politik yang berbeda-beda. Sehingga menyebabkan sulitnya melakukan sinkronisasi secara vertikal antara Provinsi dan Kabupaten pada program pembangunan masing – masing. Hal ini menyebabkan misi antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Bupati-bupati sulit untuk di sinkronisaikan.

Sinkronisasi secara horizontal antara SKPD dalam provinsi

maupun kabupaten ditemukan berbagai masalah. Hal ini karena adanya ego masing-masing. Dimana dalam observasi awal penulis, pimpinan SKPD cenderung memiliki ego sektoral dan berlomba – lomba ingin menunjukkan prestasi kepada kepala daerahnya.

Beberapa fenomena ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti terkait penggunaan teknologi digital dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Dasar dan Renstra Pengadaan dan Pengembangan E-Government di Propinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana sinkronisasi perencanaan program Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten /Kota?
3. Bagaimana Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan e-government dalam menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah?
4. Bagaimana Proses Transformasi E-government di Indonesia dan Sulawesi Barat dari Manual ke Digital dalam melayani Publik ?
5. Bagaimana pola penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat?
6. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun terakhir setelah penerapan E-Government di bidang perencanaan pembangunan

daerah Di Provinsi Sulawesi Barat?

7. Apa yang menjadi tantangan sektor paling krusial yang dihadapi menunjang sinkronisasi perencanaan
8. Bagaimana Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan sistem *E-Government* di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat?
9. Bagaimana Sinkronisasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara Provinsi dan Kabupaten Di Sulawesi Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Dasar dan Renstra Pengadaan dan Pengembangan E-Government di Propinsi Sulawesi Barat?
2. Menjelaskan dan menganalisis sinkronisasi perencanaan program Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten /Kota?
3. Menjelaskan dan menganalisis Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan e-government dalam menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah?
4. Menjelaskan dan menganalisis Proses Transformasi E-government di Indonesia dan Sulawesi Barat dari Manual ke Digital dalam melayani Publik ?
5. Menjelaskan dan menganalisis pola penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat?
6. Menjelaskan dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam 5

tahun terakhir setelah penerapan E-Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat?

7. Menjelaskan apa yang menjadi tantangan sektor paling krusial yang dihadapi menunjang sinkronisasi perencanaan
8. Menjelaskan dan menganalisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan sistem *E-Government* di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat?
9. Menjelaskan dan menganalisis Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara Provinsi dan Kabupaten Di Sulawesi Barat?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademik maupun secara pragmatis.

1. Secara akademik

Secara akademik, penelitian ini memiliki manfaat signifikan dalam konteks ilmu komunikasi, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang proses sinkronisasi perencanaan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Barat, penelitian ini memperkaya literatur akademis tentang komunikasi dan koordinasi dalam konteks pembangunan daerah. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana komunikasi efektif antara berbagai tingkat pemerintahan dapat memfasilitasi proses perencanaan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Analisis terperinci tentang implementasi kebijakan e-government mengungkapkan bagaimana teknologi digital mempengaruhi komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Ini memberikan

pandangan penting bagi penelitian masa depan dalam bidang komunikasi publik dan teknologi informasi, khususnya terkait dengan efektivitas komunikasi pemerintah dalam era digital.

Dengan menyoroti pola penerapan e-government dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan, penelitian ini menyediakan data empiris yang berguna untuk studi banding dan penelitian lebih lanjut dalam bidang komunikasi organisasi dan pemerintahan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana komunikasi digital dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas administrasi.

2. Manfaat pragmatis

Secara umum hasil-hasil kajian ini dapat memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi praktis yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai panduan penting dalam implementasi e-government yang efektif. Dengan menganalisis kebijakan yang ada dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini menyediakan wawasan berharga tentang cara terbaik mengaplikasikan teknologi e-government untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Lebih lanjut, temuan ini juga memberikan kontribusi penting terhadap pembuatan kebijakan publik. Selain itu, dengan mempertimbangkan hasil kajian ini, pemerintah daerah dapat merancang dan mengimplementasikan strategi e-government yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih inklusif dan terintegrasi, sehingga memastikan

pelayanan publik yang lebih baik dan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memetakan kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan e- government dalam menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian mampu memetakan pola penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat dan mengetahui hasil serta tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun terakhir setelah penerapan e-Government di bidang perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat, terutama berkaitan dengan sektor yang paling krusial yang dihadapi dalam mendukung sinkronisasi perencanaan di Sulawesi Barat.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan dalam proses penerapan e-government dalam mendukung perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat dalam upaya mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Provinsi Sulawesi Barat.

G. Limitasi dan Delimitasi Penelitian

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui kebijakan, pola dan model penerapan e-government dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah provinsi di Sulawesi Barat, kemudian sektor mana yang paling maksimal dan krusial yang dihadapi dalam menunjang

sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Di Provinsi Sulawesi Barat. Ruang lingkup (delimitasi) penelitian ini adalah pengkajian penerapan e-government, pemerintah dalam mengsinkronisasikan antara perencanaan Pembangunan Daerah antar kabupaten dengan Perencanaan Daerah Provinsi di Sulawesi Barat.

H. Nilai kebaruan (novelty) Penelitian

Penelitian tentang penggunaan komunikasi digital dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dilakukan, namun memiliki fokus dan lokus yang berbeda. Baik dalam proses perencanaan, komunikasi digital maupun pada sinkronisasi berbasis E-Government. Dinamika dan karakteristik serta kompleksitas komunikasi antar pemerintah menjadikan kajian komunikasi politik yang diterapkan dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang menarik untuk dikaji serta melahirkan temuan model maupun konsep-konsep terbaru.

Dari berbagai riset menunjukkan bahwa ditemukannya beberapa varian yang beragam seperti penelitian yang dilakukan Oktavya (2015) dengan judul penerapan E-Government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government belum optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia yang belum memadai; anggaran yang belum memadai; serta kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur (2014) dengan judul Penerapan E-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan Di Kota Palu menunjukkan bahwa penerapan E-Government belum dapat dikatakan

berhasil dikarenakan Pemerintah Kota Palu masih “setengah hati” dan “kurang serius” dalam mendukung pelaksanaan e-government dalam pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Rasyid (2013) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Papua menemukan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD.

Mengamati ketiga riset ini serta beberapa riset lainnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan tersendiri dari penelitian ini. Dimana penelitian pertama lebih menekankan pada penerapan komunikasi digital berbasis teknologi dalam pelayanan publik, sementara penelitian kedua lebih pada penerapan teknologi berbasis E-government di masing – masing SKPD, sementara penelitian ketiga lebih pada ketidak konsistenan perencanaan dan penganggaran pada SKPD.

Perbedaan signifikan penelitian ini dengan penelitian lainnya fokus kajian yang lebih pada penerapan komunikasi digital dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Dimana akan membahas lebih komprehensif terkait sejauh mana efektifitas komunikasi digital dalam mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan antara provinsi dan kabupaten di Provinsi

Sulawesi Barat. Perbedaan lainnya juga pada analisis komitmen kepala daerah dalam menjalankan aplikasi perencanaan pembangunan yang ada di SKPD masing - masing serta pada aplikasi perencanaan yang dimiliki pemerintah pusat.

Kebaruan lain dari penelitian ini yakni pada kemampuan komunikasi digital mensinkronisasikan perencanaan pembangunan antara SKPD dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten. Hal ini menarik karena masing-masing kepala daerah memiliki janji politik dan visi masing-masing yang perlu di akomodir. Sehingga kehadiran perencanaan pembangunan berbasis komunikasi digital dapat mempermudah sinkronisasi dan tidak mudah diubah-ubah berdasarkan selera pimpinan tanpa mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di daerah masing-masing. Serta memberi peluang kepada publik dapat melakukan control langsung atas perencanaan pembangunan dan realisasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari Latin *communis* yang berarti “sama”, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti membuat sama (to make common). Istilah pertama (*communis*) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2005)

Definisi komunikasi menurut Harold D. Laswell, bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah dengan cara menjawab pertanyaan: siapa yang menyampaikan (komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (komunikan), dan apa pengaruhnya (efek). Sedangkan menurut Carl I. Hovland pada tahun 1953 komunikasi adalah proses yang dimana seseorang (komunikator) menyampaikan rangsang (biasanya lambanglambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain (komunikan) (Purba dkk, 2006)

Komunikasi sangatlah penting dilakukan oleh setiap orang. Adanya komunikasi maka akan mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Trenholm dan Jensen dalam Fajar (2009) komunikasi merupakan suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Suatu proses yang mentransmisikan pesan kepada penerima

pesan melalui berbagai media yang dilakukan oleh komunikator adalah suatu tindakan komunikasi. Komunikasi digital merupakan pondasi yang menyediakan jalan untuk menghubungkan antara audiens (Vasiliu, 2020). Komunikasi Digital adalah, bentuk interaksi yang dilakukan dengan tidak langsung bertemu, melainkan menggunakan alat bantu digital seperti komputer atau handphone yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu seperti facebook, instagram, whatsapp.

2. Unsur-Unsur Komunikasi

Dalam suatu proses komunikasi terdapat tujuh komponen atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain (Cangara, 2006) antara lain:

- a. Sumber (*Source*) Sumber yaitu sebagai pembuat atau pengirim informasi. Sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber disebut pengirim (sender), komunikator (encoder).
- b. Pesan (*Message*) Pesan adalah hal-hal yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun simbol non verbal yang berisi ide, sikap, dan nilai dari pengirim (sender). Pesan memiliki ketiga komponen, yaitu: 1) Makna 2) Simbol yang digunakan dalam penyampaian makna, serta 3) Bentuk atau organisasi pesan
- c. Saluran (*Channel*) Saluran adalah alat atau wahana yang digunakan sumber atau sender untuk menyampaikan pesan kepada penerima atau receiver.
- d. Penerima (*Receiver*) Penerima yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi.
- e. Hambatan (*Barriers*) Hambatan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemaksaan pesan yang pengirim (sender) sampaikan kepada penerima (receiver). Hambatan ini berasal dari kata pesan, saluran, dan pendengar. Ada beberapa teori yang menggunakan istilah derau atau noise untuk menyebut elemen pengganggu. External noise meliputi latar belakang pembicaraan, lingkungan dan teknis saluran, sedangkan internal noise meliputi aspek psikologi peserta komunikasi maupun aspek semantic, misalnya sebuah kata yang mengandung ambiguitas. Hambatan komunikasi meliputi perbedaan persepsi, permasalahan Bahasa, kurang mendengarkan, perbedaan emosional, dan perbedaan latar belakang.
- f. Tanggapan (*feedback*)

Tanggapan adalah reaksi atau respons pendengar atas komunikasi yang sender lakukan. Tanggapan bisa dalam bentuk komentar langsung, tertulis atau polling. Tanggapan mengatur aksi komunikasi kita. Tanggapan negative bisa berupa kritik penolakan, sedangkan tanggapan positif biasanya berupa pujian.

g. Lingkungan

Lingkungan yaitu faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis dan dimensi waktu.

3. Proses Komunikasi

Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). proses komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian (Effendy, 2003:11-12), yaitu:

a. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu lambang (simbol) sebagai media atau saluran. lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan.

b. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikatormenggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasaran berada ditempat yang relative jauh dan berjumlah banyak. Seperti surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, internet, media sosial dan banyak lagi yang merupakan media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi. Dalam hal ini bahasa juga dianggap sebagai media komunikasi. Hal ini disebabkan karena bahasa sebagai lambang (symbol) beserta isi (content) yaitu pikiran dan atau perasaan yang dibawahnya menjadi totalitas pesan (message) yang tampak tidak dapat dipisahkan, seolah-olah tanpa bahasa manusia tidak dapat berkomunikasi.

B. Komunikasi Pemerintah

1. Pengertian Komunikasi Pemerintah

Sebelum membahas mengenai komunikasi pemerintah, perlu diketahui terlebih dahulu yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah

merupakan sebuah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sedangkan pemerintahan merupakan semua aktifitas, proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenang untuk mencapai tujuan negara.

Maka yang dimaksud dengan komunikasi pemerintah sendiri merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan, baik antar individu maupun lembaga instansi lainnya dalam konteks aktivitas pemerintahan.

Dalam bukunya, Yusuf mengatakan bahwa:

“Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan bagian dari komunikasi organisasi.”

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Yusuf bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemerintah dan pemerintahan. Karena memang saat ini belum banyak referensi yang bisa digunakan untuk mendefinisikan pengertian dari komunikasi pemerintah ataupun komunikasi pemerintahan. Lebih lanjut lagi Yusuf mengemukakan pendapat bahwa dalam komunikasi pemerintahan terdapat dua tipe saluran komunikasi, yaitu :

- a. Pertama, memudahkan komunikasi intern. Proses birokrasi internal ini memiliki tiga aspek yakni:
 - 1) Informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan; 2
 - 2) Putusan dan dasar alasannya harus disebarkan agar anggota- anggota organisasi itu melaksanakannya;
 - 3) Media untuk “pembicaraan organisasi”, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan, dan pembicaraan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam melaksanakan tugas menciptakan keanggotaan yang bermakna dalam tatanan social yang sedang berlangsung.
- b. Kedua, media untuk berkomunikasi secara eksternal. Dalam dinas pemerintahan misalnya, media yang mencakup saluran untuk berkomunikasi kepada warga masyarakat pada umumnya, klien kepentingan khusus, legislatif,

dan instansi pemerintahan yang lain. Komunikasi pemerintahan menurut Myers dan Myers (1982) merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintah:

“Komunikasi pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi pemerintahan, baik untuk managing staff maupun managing people.”

Komunikasi pemerintah untuk managing staff merupakan komunikasi internal organisasi dan bertujuan agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami segala sesuatu yang harus dikerjakan, cara mengerjakan, dan eksekutif pemerintah mendapat informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang semuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien.

Adapun komunikasi pemerintahan untuk managing people merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi- organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, sekaligus mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan juga informasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi.

2. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi Pemerintahan

Komunikasi dalam sebuah organisasi memang memiliki kedudukan yang sangat penting, mengingat bahwa dalam sebuah organisasi terdiri dari anggota-anggota organisasi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga komunikasi menjadi salah satu yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Hal ini juga yang mendasari betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi pemerintahan karena memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan

pemerintah. Sendaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan sebagai berikut :

a. Fungsi Informatif

Sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam organisasi pemerintahan berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi dapat diperoleh dari pimpinan, wakil dan bawahan sehingga dengan adanya informasi tersebut memungkinkan setiap anggota organisasi menjalankan tugasnya secara pasti dan lebih baik.

b. Fungsi Regulatif

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan;
- 2) Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan sehingga dengan komunikasi dapat mencegah ketidakpastian.

c. Fungsi Persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataan ini menyebabkan banyak pimpinan yang lebih menyukai untuk mempersuasif bawahannya daripada memberi perintah. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dilakukan atas perintah pimpinan yang sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.

d. Fungsi Integratif

Setiap organisasi akan berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.

Saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut yaitu :

- 1) Saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi (buletin, *newsletter*) dan laporan kemajuan organisasi;
- 2) Saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata.

Pelaksanaan aktivitas akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Dengan adanya saluran komunikasi seluruh anggota organisasi dapat mengerjakan tugas dengan tepat, selain itu pula akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam organisasi.

3. Komunikasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Praktik komunikasi pemerintahan ditentukan oleh sistem pemerintahan. Menurut Tatang, sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema dalam melakukan tata cara suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan sekumpulan unsur yang ada di dalam organisasi pemerintahan yang diproses untuk mencapai tujuan pemerintahan. Nazzmuzzaman mengemukakan pendapat bahwa terdapat perbedaan komunikasi pemerintahan dari masa ke masa di Indonesia, perbedaan tersebut sebagai berikut:

a) Komunikasi dalam Pemerintahan Orde Baru

Komunikasi pemerintahan Orde Baru lebih menekankan *downward communication* dengan arus informasi satu arah. Implikasi dari komunikasi pada sektor publik era Orde Baru yang sentralistik menyebabkan arus informasi

cenderung kaku dan lamban.

Dalam berkomunikasi dengan warga, pemerintah cenderung memperlihatkan sikap kaku. Komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru menjadi *Chief Executif Officer* (CEO) birokrasi, seperti presiden, gubernur, bupati dan walikota menjadi sentral informasi dan *feedback* kurang dihargai. Semua informasi publik seperti kebijakan dan keputusan lain bergantung pada pemerintah dan ditetapkan oleh sentral pemerintahan.

b) Komunikasi Pemerintahan Pasca-Orde Baru

Komunikasi pemerintahan Pasca-Orde Baru yang desentralik relatif demokratis karena telah menempatkan bawahan (dalam komunikasi internal), warga dan dunia usaha (dalam komunikasi eksternal) sebagai *sender*.

Arus informasi, terutama informasi untuk pembuatan kebijakan berjalan lancar atau memperlancar aliran informasi secara dua arah informasi publik tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Keharusan bagi pemerintah untuk menyebar informasi kepada warga dan memanfaatkan *public opinion* dari masyarakat mengurangi atau mempersempit kesenjangan informasi (*asymmetric information*) antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pra-penetapan kebijakan (*ex ante*), pembahasan kebijakan (*interim*), dan pasca-penetapan kebijakan (*ex post*).

c) Komunikasi Pemerintahan Masa Reformasi

Komunikasi masa reformasi yang menekankan demokrasi partisipasi menjadikan bawahan tidak hanya sebagai komunikan atau *receiver* yang sekedar menerima informasi dari atasan, tetapi juga berperan sebagai komunikator sehingga arus informasi berasal dari bawah ke atas. Pada masa ini, lebih didominasi oleh komunikasi dari masyarakat, karena pada masa ini masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik individu maupun kelompok

sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah. Dari masyarakat inilah yang kemudian dijadikan sumber informasi oleh pemerintah.

Dengan demikian, masa reformasi telah mengubah pola komunikasi *downward* dominan menjadi komunikasi *upward* dominan. Dalam praktiknya, komunikasi pemerintahan pada masa ini menganut *good governance* yang menekankan pada empat pilar yaitu ketanggapan (*responsiveness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan partisipasi (*participation*).

Dalam dunia komunikasi, pada masa reformasi terjadi perkembangan baru, antara lain dicabutnya Keputusan Menteri Penerangan tentang Peraturan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sehingga pengurusannya menjadi lebih mudah, terbangunnya keberanian moral dalam menyampaikan aspirasi dan koreksi meskipun kadang-kadang tidak sejalan dengan pemerintah, adanya toleransi yang tinggi dalam perbedaan pendapat, penggunaan media massa yang semakin berani dalam menyajikan fakta atau opini serta berbagai perkembangan lain yang pada akhirnya bermuara pada suatu komitmen, yaitu persatuan dan kesatuan tetap dapat dipelihara dalam dinamika yang sedang berkembang saat ini.

4. Komunikasi dan Informasi dalam Organisasi

Salah satu gagasan paling berpengaruh dalam teori komunikasi organisasi adalah pemikir Karl Weick mengenai informasi organisasi yang berada di bawah naungan pemikiran sibernetika. Sibernetika menempatkan komunikasi pada tataran terdepan dalam studi mengenai organisasi.

Teori informasi organisasi memiliki kedudukan penting dalam ilmu komunikasi karena menggunakan komunikasi sebagai dasar atau basis bagaimana mengatur atau mengorganisasikan manusia dan memberikan

pemikiran rasional dalam memahami bagaimana manusia berorganisasi.

Menurut teori ini, organisasi bukanlah struktur yang terdiri atas sejumlah posisi dan peran, tetapi merupakan kegiatan komunikasi sehingga sebutan yang lebih tepat sebenarnya adalah *organizing* atau *mengorganisasi* (yang menunjukkan proses) daripada *organization* atau organisasi, karena organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan.

Beberapa ahli teori komunikasi organisasi menggambarkan organisasi sebagai suatu sistem yang hidup (*living system*) yang melakukan proses kegiatan untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan fungsinya. Suatu organisasi harus memiliki suatu prosedur untuk mengelola seluruh informasi yang ingin diterima atau dikirimkan untuk mencapai tujuannya.

Fokus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Sangatlah jarang satu orang atau satu bagian pada sebuah organisasi atau perusahaan memiliki seluruh informasi yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tugasnya.

Informasi yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber. Namun demikian, tugas mengelola atau memproses informasi tidaklah sekedar bagaimana memperoleh informasi, bagian tersulit adalah bagaimana memahami informasi dan mendistribusikan informasi yang diterima itu di dalam organisasi.

Terdapat beberapa asumsi yang dikemukakan oleh Karl Weick yang mendasari teori informasi organisasi, antara lain sebagai berikut :

a) Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi

Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi, ini berarti bahwa organisasi bergantung pada informasi

untuk dapat berfungsi secara efektif dan untuk dapat mencapai tujuannya. Setiap hari, organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali informasi yang berasal dari lingkungannya, namun tidak semua informasi dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, organisasi dihadapkan dengan tugas untuk memilih yang mana dari sekian banyak informasi itu bermakna dan penting bagi organisasi, dan selanjutnya organisasi dan para anggotanya akan memfokuskan perhatiannya untuk mengolah informasi tersebut.

Pada dasarnya, organisasi memiliki dua tugas utama untuk dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan berhasil, yaitu :

1. organisasi harus menafsirkan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan informasi mereka; dan
2. organisasi harus mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi anggota organisasi dan tujuan organisasi.

b) Informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya.

Asumsi kedua yang dikemukakan Weick menyatakan bahwa:

“Informasi diterima suatu organisasi berbeda-beda dalam hal tingkat kepastiannya.”

Dengan kata lain, suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Organisasi selalu bergantung pada informasi dan menerima informasi dalam jumlah besar. Tantangannya terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang diterima. Organisasi perlu memutuskan suatu rencana untuk memahami informasi. Weick juga menyatakan bahwa:

“Tantangan organisasi tidak terletak pada sedikitnya informasi yang diterima, tetapi pada begitu banyaknya informasi yang diterima sehingga menimbulkan multi-tafsir.”

Untuk dapat menafsirkan informasi yang sangat multi-interpretasi dibutuhkan kegiatan komunikasi yang sama kompleksnya dengan informasi yang

diterima sehingga dalam mengartikan informasi tersebut akan dapat memberikan kemudahan. Untuk dapat memproses informasi dengan berhasil maka organisasi harus melakukan sejumlah tindakan setara dengan tingkat kerumitan informasi yang diterima guna meminimalisir multi-tafsir. Dengan harapan semua anggota organisasi memiliki kesepahaman pada informasi yang diterima.

c) Organisasi berusaha mengurangi ketidakpastian informasi

Dalam upaya mengurangi ambiguitas informasi, maka asumsi Weick ketiga mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi, menurut Weick:

“Kegiatan organisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi dan proses untuk mengurangi ketidakpastian merupakan kegiatan bersama diantara para anggota organisasi”

Bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi bergantung satu sama lain dalam upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Derajat ketidakpastian bervariasi antara satu situasi dengan situasi lainnya, namun seringkali cukup besar dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian akan memberikan implikasi besar secara positif terhadap organisasi.

C. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengertian Perencanaan

Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri (Nursini, 2010). Waterston dalam Nursini, (2010) Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih

alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu D. Conyers dan Hills (1984) dalam Nursini, (2010) perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Pengertian perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Tjokroamidojo (2003) Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan

rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut.

2. Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam ilmu manajemen, Kepala Daerah ini berperan sebagai top manager. Menurut Amirullah (2004) top manager bertanggungjawab terhadap perusahaan (pemerintah daerah) secara keseluruhan, dengan tugas utama yaitu menetapkan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan secara umum, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh manajer di bawahnya. Top manager lebih berperan dalam merumuskan perencanaan strategis, sedangkan birokrasi lebih berperan dalam perencanaan operasional.

Legislatif adalah forum yang sangat penting dimana masalah masyarakat dan kebijakan di alamatkan kepadanya untuk diminta. Sebagian besar kebijakan yang dipersiapkan oleh eksekutif terutama yang bersifat makro atau mempunyai dampak bagi masyarakat, membutuhkan pengesahan dari legislatif.

Berdasarkan aktor yang melakukan proses penyusunan perencanaan pembangunan, Innes (2000) membedakannya dalam beberapa model yaitu:

1) Technical Bureaucratic Planning

Perencanaan ini berbasis kepada penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, untuk membuat suatu rekomendasi bagi pengambil keputusan berdasarkan informasi dan penilaian atas dampak politik dan perubahan yang dikehendaki.

2) Political Influence Planning

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari masing-masing kontituennya.

3) *Social Movement Planning*

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama.

4) *Collaborative Planning*

Dalam model ini setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian atas masalah dan perjanjian yang mereka butuhkan, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang diperjanjikan bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

3. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari

6 (enam) langkah, sebagai berikut:

1) *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

3) *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternative tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

6) *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Mayer (1985) menambahkan bahwa perencanaan erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan (policy making). Bahkan keduanya sering dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang melekat pada istilah. Anderson (1978) mengatakan bahwa kebijakan adalah *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Islamy (2003) membagi proses perencanaan dalam beberapa tahap (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (agenda setting), (c) perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan (f) penilaian kebijakan. Menurut pendapat penulis, langkah kelima dan keenam bukan termasuk dalam proses perumusan kebijakan tetapi termasuk dalam siklus kebijakan.

1) Perumusan Masalah

Menurut Dimock dalam Sunarko (2000) menyatakan bahwa: *"public policy is the reconciliation and crystallization of views and wants of many people and groups in the body social"*. Masalah tidak dapat terumuskan dengan sendirinya. Para pembuat kebijakan harus mencari dan menentukan identitas masalah yang berupa pendapat-pendapat atau keinginan anggota masyarakat, sehingga kemudian dapat merumuskan masalah kebijakan tersebut dengan benar.

Tidak semua permasalahan akan dipilih untuk diselesaikan. Untuk dapat memilih masalah mana yang akan diselesaikan diperlukan langkah-langkah perumusan masalah (Islamy, 2003) adalah:

- a) Mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi/dipecahkan.
- b) Mengidentifikasi masalah umum. Masalah Umum atau problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi serta mempunyai akibat yang luas kepada masyarakat.

- c) Mengidentifikasi Isu. Isu adalah masalah yang dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu.

Menurut Eyestone dalam Sunarko (2000) menyatakan bahwa *“An issue arises, when a public with a problem action, and there is public disagreement over the solution to the problem”*

Untuk dapat merumuskan masalah tersebut dibutuhkan kemampuan-kemampuan para aktor yang meliputi (Islamy, 2003):

- a) Kesadaran dan kepekaan masyarakat untuk melihat problemnya sendiri,
- b) Kesadaran, kepekaan dan kemampuan pembuat keputusan melihat problem yang dihadapi masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya untuk diatasi.

2) Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Cobb and Elder (Lester, 2000) mendefinisikan agenda setting sebagai: *“a set of political controversies that will be viewed as falling within the range of legitimate concerns meriting the attention of the polity; a set of items scheduled for active and serious attention by decision making body”*

Isu dapat masuk ke dalam pengambil keputusan melalui dua agenda (Lester, 2000) yaitu:

- a) *Systemic Agenda*, mencakup seluruh isu yang sedang dibicarakan secara luas, yang diharapkan dapat diselesaikan oleh pemerintah.
- b) *Institutional Agenda*, bahwa isu tersebut sudah menjadi diterima oleh pengambil keputusan dan sedang dirumuskan cara pemecahannya.

Menurut Howlett (1995) bahwa pengelolaan isu meliputi:

- a) *Outside initiation model*. Isu berasal dari luar pemerintah, yang kemudian dikembangkan ke dalam systemic agenda dan akhirnya masuk dalam institutional agenda. Dalam tipe ini peran kunci dipegang oleh kelompok sosial.
- b) *Mobilization model*. Dalam model ini inisiatif berasal dari pemerintah, namun pemerintah meminta dukungan dari masyarakat. Isu masuk dulu ke institutional agenda, baru kemudian ke systemic agenda.
- c) *Inside initiation model*. Inisiatif berasal dari pemerintah, dan langsung dimasukkan dalam institutional agenda.

3) Perumusan Usulan Kebijakan (*Policy Proposals*)

Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam kegiatan ini berupa (1) mengidentifikasikan alternatif, (2) mendefinisikan dan merumuskan alternatif, (3) menilai alternatif, (4) memilih alternatif yang memuaskan (Islamy, 2003).

Langkah-langkah yang disampaikan Islamy diatas adalah model rasional komprehensif. Model lainnya adalah inkremental yang ditempuh apabila ada keterbatasan waktu, biaya dan informasi yang dimiliki. Model ini bersifat upaya untuk memodifikasi terhadap program-program yang sudah ada. (Solichin, 2004; Wibawa, 1994).

4) Pengesahan Kebijakan (*Policy Legitimation*)

Usulan kebijakan akan menjadi kebijakan (*policy decision*) yang sah bila sudah diadopsi atau diberi legitimasi oleh seseorang atau badan yang berwenang yang biasanya dilakukan oleh pihak legislatif. Menurut Tjokroamidjojo (1996), rencana pembangunan supaya mendapatkan kekuatan dalam pelaksanaannya perlu mendapat status formal atau dasar hukum tertentu. Tiga pola tersebut adalah:

- a) Pola pertama, perencanaan pembangunan dilakukan pembahasan serta harus disyahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat, biarpun penyusunannya tentu saja dilakukan oleh badan-badan perencanaan yang bersifat teknis.
- b) Pola kedua, perencanaan pembangunan lebih merupakan suatu kebijakan pemerintah saja.
- c) Pola ketiga, garis-garis besar kebijakan dasar suatu rencana pembangunan disetujui dan ditetapkan oleh lembaga perwakilan, sedangkan kebijakan dan program-program pembangunan selanjutnya menjadi keputusan pemerintah.

Menurut Munir (2002) dengan memperhatikan pedoman-pedoman perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima tahapan

yaitu (a) penyusunan kebijakan (b) penyusunan program (c) penyusunan pembiayaan (d) pemantauan dan evaluasi kinerja (e) penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan tahapan perencanaan. Selengkapnya proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu:

a) Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Tinjauan keadaan, (2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, (4) Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, (5) Persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program, dan kegiatankegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan kegiatan disebut pemrograman yaitu suatu rencana tahunan yang berisi langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran sumberdaya (SDM, biaya, peralatan dsb) yang diperlukan untuk itu. Karena program berisi kegiatan sehingga program dapat diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran

Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan

asas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan. Asas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen pembiayaan. Penyusunan pembiayaan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Abdullah (1995) anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif (uang) yang disusun secara sistematis dalam perkiraan pendapatan, belanja (dan pembiayaan), sedangkan Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam Bastian (2001) mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi (Kepmendagri 29/2002): (1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan program/kegiatan, (2) Penyusunan rancangan APBD, (3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, (4) Penetapan APBD. Namun sebelum terjadi proses penganggaran berbentuk menjadi kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja sampai dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat dipisahkan yaitu adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Kelurahan, diteruskan ke Tingkat Kecamatan dan akhirnya di Tingkat Kota.

Dari beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tahap-tahap:

a. Penyusunan Agenda Setting GTZ (2000)

Tentang Local Development Planning menyebutkannya sebagai local policy statement yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan politik yang berfungsi memberikan arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan. Langkah-langkah penetapan kebijakan yaitu:

- a) Tinjauan keadaan dan perumusan masalah
- b) Penetapan tujuan,
- c) Penetapan arah kebijakan yang berisi caracara/strategi yang bersifat indikatif.

b. Penyusunan policy formulation GTZ (2000)

Sebagai local development program yang merupakan pengejawantahan dari kewenangan administratif sebagai pelaksanaan dari kebijakan (agenda setting) yang telah ditetapkan. Langkah-langkah:

- a) Penentuan tujuan program dengan mengacu kepada local policy statement.
- b) Penilaian atas kebutuhan
- c) Penentuan sasaran program
- d) Penentuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan program tetap berpedoman kepada asas prioritas. Penyusunan Budgeting Anggaran adalah proses penjabaran rencana kerja ke dalam angka kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta sebagai alat pengendalian.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Kualitas Perencanaan Pembangunan Beberapa definisi yang dikutip oleh Yamit (2001) yaitu:

- a) Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (W Edwards Deming).
- b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan (Philip B Crosby),
- c) Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi (Joseph M Juran).

Garvin (1994) yang dikutip Yamit (2001), tujuan mengidentifikasi lima pendekatan perspektif kualitas yaitu:

- a) *Transcendental Approach*, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur.
- b) *Product Based Approach*, adalah suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur,
- c) *User Based Approach*, adalah kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera (fitness for used) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.
- d) *Manufacturing Based Approach*, adalah bersifat supply based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan prosedur.

Untuk mengukur kualitas rencana, Keban (2001) memberikan pernyataannya sebagai berikut: "Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan aspirasi dan kehendak para stake holders nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada". Menurut Solihin (2008), perencanaan yang ideal harus memenuhi:

- (a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya,
- (b) Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terusmenerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran,

- (c) Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan,
- (d) Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system),
- (e) Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

Lebih lanjut Solihin (2008), syarat perencanaan harus:

- (a) Faktual dan realistis, yang mengacu kepada dinamika yang ada
- (b) Logis dan rasional, yaitu perencanaan yang masuk akal dan dapat dimengerti,
- (c) Fleksibel, yaitu rencana yang luwes dengan memperhatikan kendala dan limitasi lingkungan sosial maupun fisik,
- (d) Objektif, yaitu memenuhi komitmen terhadap kepentingan umum
- (e) Komprehensif atau menyeluruh.

Menurut Bappenas (2003) pembaharuan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pokok dalam manajemen pembangunan, antara lain:

- a) Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- b) Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c) Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan;
- d) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik;
- e) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota. Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) sebagai arah kebijakan umum APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan mengacu pada: Program Pembangunan Daerah (Propeda); Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program. Untuk keperluan koordinasi tersebut,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota. Kualitas RKPD menunjukkan kinerja tenaga perencana pada masing-masing SKPD.

Menurut Bappenas (2003) tentang pedoman koordinasi pembangunan nasional disebutkan bahwa dalam penetapan tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip SMART, yaitu:

- a) Tujuan harus bersifat khusus, spesifik (specific)
- b) Tujuan tersebut harus terukur (measurement)
- c) Tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (achievable)
- d) Tujuan tersebut harus realistis, rasional dan logis (realistic)
- e) Tujuan harus mempunyai rentang waktu untuk dicapai (timely).

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ;

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan

mengacu pada RPJM Daerah kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya Bappeda telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan terbitnya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebabkan kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih luas lagi. Sebagai konsekuensi logis terbitnya UU tersebut, beban kerja Bappeda kabupaten/kota sebagai salah satu satuan kerja akan semakin bertambah.

Berbagai permasalahan di daerah memerlukan solusi yang tepat yang diperoleh melalui perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan terpadu antar sektor dan regional baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai lembaga penanggung jawab perencanaan pembangunan di daerah dirasakan akan semakin berat. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan revitalisasi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara lebih komprehensif, terpadu, cepat dan tepat.

a) Tugas dan Fungsi Bappeda

Beban tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota setelah revisi UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan terbitnya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Adapun tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten/Kota setelah revisi dan terbitnya undang-undang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten/Kota.
- 2) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota.
- 3) Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan jangka Menengah (Musrenbang-JM) Kabupaten/Kota.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kabupaten/Kota sebagai penjabaran RPJM Kabupaten/Kota.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- 6) Menyelenggarakan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD).
- 7) Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- 8) Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 9) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di daerah.
- 10) Mengembangkan pola kerjasama antar pemerintah dan atau dengan pihak ketiga dalam upaya menciptakan pembangunan yang bersinergi dan menggali sumber dana dari berbagai donor baik dari dalam maupun luar negeri.
- 11) Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat tupoksi dan non tupoksi berdasarkan perintah atasan, antara lain:
 - (a) Menyusun Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi Prioritas (SP),
 - (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 - (c) Menyusun RAPBD dan PAPBD,
 - (d) Menyusun Rencana dan Pengembangan Wilayah Daerah dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis (Tata Ruang Wilayah),
 - (e) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan satuan kerja (satker),
 - (f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan proyek APBD/APBN,
 - (g) Menyusun konsep kebijakan kepala daerah tentang standar/ketentuan teknis perencanaan dan kebijakan perencanaan lainnya serta pengendalian atas pelaksanaannya,
 - (h) Memberikan masukan yang perlu kepada Bupati/Walikota dan Sekda sesuai bidang tugas dan fungsinya.

D. Teknologi Komunikasi dan Informasi

1. Pengertian Teknologi

Teknologi pada hakikatnya adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah menghasilkan produk yang bermanfaat (Munir, 2009). Adapun menurut Adler, Martin dan Lucas dalam Kadir (2003) teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data.

Menurut Fauziah dan Hedwig (2010:4) teknologi (*technology*) adalah sebagai pengetahuan tata cara pemakaian perangkat-perangkat teknik (baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer) yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah sehingga peralatan yang digunakan dapat bekerja secara efisien, mudah dan baik. Besari (2008) teknologi adalah ilmu pengetahuan dan seni yang ditransformasikan ke dalam produk, proses, jasa dan struktur terorganisasi yang pada dasarnya merupakan seperangkat instrumen ekspansi kekuatan manusia sehingga dapat menjadi sumber daya cara baru untuk menciptakan kekayaan melalui peningkatan produktivitas. Lebih lanjut menurut Nazarudin (2008: 2) teknologi dapat dipandang sebagai kemampuan manusia yang mencakup:

- a. Teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan dan produk (*object embodied technology*).
- b. Teknologi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan (*human embodied technology*).
- c. Teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen (*organization embodied technology*).
- d. Teknologi yang terkandung dalam dokumen (*document embodied technology*).

2. Pengertian Informasi

Informasi (information) adalah sebagai hasil dari kegiatan pengolahan data yang disajikan sedemikian rupa dan memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian dan memberikan arti bagi penggunanya. Atau informasi dapat diartikan sebagai pesan yang diterima dan difahami artinya bagi si penerima informasi (Fauziah dan Hedwig, 2010).

Azmi (2009) informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang. Sutabri (2005: 23) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pengertian Teknologi Informasi

Prasojo dan Riyanto, (2011) teknologi informasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Teknologi

informasi merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai hal seperti:

sistem komputer hardware dan software, LAN (local area network), MAN (metropolitan area network), MAN (Metropolitan area network), WAN (Wide are network), sistem informasi manajemen (SIM), sistem telekomunikasi dan lain-lain.

Menurut Hariningsih (2005: 4-10) teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Menurut Information Technology Association of America (ITAA) (Sutarman, 2009) teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektrik dan perangkat lunak

komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisi dan memperoleh informasi secara aman.

Menurut Sutarman (2009: 18) teknologi informasi memiliki enam fungsi sebagai berikut:

- a. Menangkap (Capture)
- b. Mengolah (Processing)
Mengolah (Processing) adalah mengkomplikasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic dll. Mengolah/memroses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), perhitungan (kalkulasi) sintesis (penggabungan) segala bentuk data dari informasi.
 - 1) Data processing adalah memroses data atau mengolah data menjadi suatu informasi.
 - 2) Informasi processing adalah suatu komputer yang memroses data mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi suatu tipe/bentuk yang lain dari informasi.
 - 3) Multimedia system adalah suatu sistem komputer yang dapat memroses berbagai tipe/bentuk informasi secara bersamaan (simultan).
- c. Menghasilkan (Generating)
Menghasilkan (generating) adalah mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik dan sebagainya.
- d. Menyimpan (Storage)
Menyimpan (storage) adalah merekam atau menyimpan data informasi suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya harddisk, tape, disket, compact disc (CD).
- e. Mencari kembali (Retrival)
Mencari kembali (retrival) menelusuri atau mendapatkan kembali informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan.
- f. Transmisi(Transmission)
Transmisi (Transmission) adalah mengirim data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan computer

Menurut Sutarman (2009) penggunaan teknologi informasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- 1) Kecepatan (Speed) adalah komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih dari cepat dari pekerjaan yang dikerjakan manusia.
- 2) Konsistensi (Consistency) adalah hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit untuk menghasilkan yang sama persis.

- 3) Kecepatan (Precision) adalah komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi perubahan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sangat sulit.
- 4) Keandalan (Reliability) adalah apa yang dihasilkan komputer dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

Menurut Fauziah dan Hedwig (2010:4) pengertian tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information Communication And Technology (ICT)* adalah teknologi yang digunakan untuk menangani informasi dan membantu cara komunikasi (pengolahan informasi) dengan bantuan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk mengkonversikan atau mengubah, menyimpan, mengolah, mengirim dan menerima informasi.

Teknologi komunikasi adalah proses bagaimana menyampaikan sebuah informasi atau pesan kepada objek yang dituju, teknologi komunikasi adalah cara menyampaikan pesan dalam beragam bentuk yang diinginkan, adakalanya pesan cukup disampaikan dengan komunikasi interpersonal, atau disampaikan menggunakan media telepon maupun internet, bergantung pada kebutuhan saat itu, proses memilih dan mengirim pesan dalam berbagai bentuk inilah disebut teknologi komunikasi. Sedang Teknologi Informasi adalah proses mengolah sebuah pesan agar lebih mudah sampai dan diterima oleh objek yang dituju, dengan cara merubah dalam beragam bentuk (Zubaidih).

4. Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Tata Kelolah Pemerintahan

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam upaya pembangunan (Hanna, 2010). Dimana penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan:

1. Meningkatkan efisiensi, penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan.
2. Meningkatkan pelayanan, penggunaan TIK dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, penggunaan TIK dapat membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu.
4. Membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, penggunaan TIK dalam egovernment dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, penggunaan TIK telah mengubah atau mereformasi berbagai bidang, seperti: memperbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi. (Praditya, 2014)
6. Meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya, penggunaan TIK dapat meningkatkan good governance melalui peningkatan transparansi, mengurangi korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah.

E. E-Government untuk Pemerintahan yang Lebih Baik

1. Mengapa e-government penting?

a. E-Government meningkatkan efisiensi

TIK membantu meningkatkan efisiensi dalam tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat menghasilkan penghematan dalam pengumpulan dan transmisi data, penyediaan informasi, dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi masa depan yang signifikan kemungkinan besar tercapai melalui berbagi data yang lebih besar di dalam dan antara pemerintahan.

b. E-Government meningkatkan layanan

Mengadopsi fokus pada pelanggan adalah elemen inti dari agenda reformasi negara-negara OECD. Layanan yang berhasil (baik online maupun offline) dibangun berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Fokus pada pelanggan mengimplikasikan bahwa seorang pengguna tidak harus

memahami struktur pemerintahan dan hubungan yang kompleks untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memungkinkan pemerintah untuk muncul sebagai organisasi yang bersatu dan memberikan layanan online yang mulus. Seperti halnya semua layanan, layanan e-government harus dikembangkan dengan memperhatikan permintaan dan nilai pengguna, sebagai bagian dari strategi layanan multi-kanal secara keseluruhan.

c. E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu

Internet dapat membantu para pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian hasil kebijakan tertentu. Sebagai contoh, informasi online dapat meningkatkan penggunaan program pendidikan atau pelatihan, berbagi informasi di sektor kesehatan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya dan perawatan pasien, dan berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memfasilitasi kebijakan lingkungan. Namun, berbagi informasi tentang individu dapat menimbulkan masalah perlindungan privasi, dan dampak potensial perlu dievaluasi dengan hati-hati. Kerangka waktu untuk inisiatif perlu realistis, karena bisa ada keterlambatan yang cukup lama sebelum manfaat tercapai.

d. E-Government dapat berkontribusi pada tujuan kebijakan ekonomi

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pada pemerintah, dan dengan demikian berkontribusi pada tujuan kebijakan ekonomi. Dampak khusus melibatkan pengurangan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi, dan peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh TIK dan peningkatan informasi pemerintah. Mengingat jangkauan dan pengaruh

pemerintah, inisiatif e-government mempromosikan masyarakat informasi dan tujuan e-commerce. Konsumsi pemerintah terhadap produk dan layanan TIK juga dapat mendukung industri TIK lokal. Namun, dampak dalam bidang ini sulit untuk diukur.

e. E-Government dapat menjadi kontributor utama untuk reformasi

Semua negara OECD menghadapi masalah modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini – globalisasi, tuntutan fiskal baru, perubahan masyarakat, dan harapan pelanggan yang meningkat – berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. TIK mendukung reformasi dalam banyak bidang, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi berbagi informasi, dan menyoroti inkonsistensi internal.

f. E-Government dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara

Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara adalah fundamental untuk tata pemerintahan yang baik. TIK dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan partisipasi warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan benar, e-government dapat membantu suara individu untuk didengar dalam debat yang luas. Ini dilakukan dengan memanfaatkan TIK untuk mendorong warga negara untuk berpikir secara konstruktif tentang masalah-masalah publik dan menilai dampak penerapan teknologi untuk membuka proses kebijakan. Namun, sedikit yang mengharapkan pengaturan e-government dapat sepenuhnya menggantikan metode tradisional penyediaan informasi, konsultasi, dan partisipasi publik dalam waktu dekat.

2. E-Government dan Layanan Berdampak Tinggi (HIS)

Layanan Berdampak Tinggi (HIS) adalah istilah yang digunakan di Meksiko untuk merujuk pada layanan pemerintah yang paling penting dan paling banyak digunakan. Tujuan pemerintah adalah untuk menyediakan layanan yang personal kepada sebagian besar penduduk Meksiko. HIS diklasifikasikan berdasarkan tema sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berdasarkan aturan 80/20 yang menetapkan kriteria identifikasi - 20% informasi paling relevan yang paling sering dicari oleh 80% pengguna. Klasifikasi layanan berdampak tinggi dilakukan berdasarkan saluran yang diidentifikasi oleh profil pengguna (misalnya warga, perusahaan, pejabat publik, dll.). Beberapa contoh layanan berdampak tinggi adalah janji paspor, surat izin mengemudi, aplikasi pekerjaan, asuransi kesehatan, hak-hak tenaga kerja, dan informasi kesehatan wanita.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah dan penggunaan layanan transaksional dengan cara yang sederhana sesuai dengan profil pengguna, dan untuk memperkuat strategi manajemen sumber daya pelanggan dan pengiriman multi-kanal melalui konvergensi teknologi. Ini akan memungkinkan agensi pemerintah federal untuk menggabungkan layanan yang terdigitalisasi saat ini ke dalam lingkungan bisnis mereka sendiri dan menghasilkan layanan baru dalam format elektronik. Di beberapa organisasi, layanan berdampak tinggi telah diidentifikasi sebagai target khusus untuk pengembangan fungsionalitas Internet. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri memiliki 60 layanan dalam registri prosesnya, dan 12 yang diidentifikasi sebagai layanan berdampak tinggi telah dikembangkan fungsionalitas Internet untuk mereka.

3. E-Government Berfokus pada Pengguna

a. Bagaimana memperkuat fokus pada pengguna dalam pemerintahan?

- 1) Secara bertahap, harapan publik adalah agar penyediaan layanan pemerintah diatur berdasarkan kebutuhan pengguna daripada berdasarkan birokrasi pemerintah. Pemerintah berusaha memenuhi harapan ini. Melakukannya juga dapat memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintah.
- 2) Menyediakan layanan yang berfokus pada pengguna akan memerlukan hubungan dinamis antara pengguna dan pemerintah di mana pemerintah mendidik pengguna, memasarkan layanan baru, dan menyesuaikan layanan berdasarkan umpan balik dan penelitian pengguna.
- 3) Pemerintah harus mendasarkan inisiatif e-government mereka pada penelitian yang lebih baik dan pemahaman terhadap kebutuhan, preferensi, dan prioritas pengguna, baik untuk memberikan layanan yang memiliki nilai nyata sesuai harapan pengguna, maupun untuk memaksimalkan manfaat pengeluaran publik pada e-government.
- 4) Tingkat adopsi layanan elektronik adalah ukuran baik atau tidaknya layanan tersebut memberikan nilai bagi pengguna.
- 5) Mengembangkan layanan yang berfokus pada pengguna memiliki implikasi struktural bagi pemerintah - layanan harus diorganisir berdasarkan pengguna, bukan agensi pemerintah. Namun, hanya sedikit negara yang telah melakukan perubahan semacam ini sejauh ini.

b. Pengiriman Layanan Melalui Beberapa Saluran: Bagaimana cara efektif menyampaikan layanan melalui beberapa saluran?

- 1) Strategi multi-saluran menentukan bagaimana ICT dapat digunakan untuk keuntungan semua layanan pemerintah, tanpa memandang apakah layanan itu disampaikan secara daring atau tidak. Strategi pengiriman layanan multi-saluran harus mempertimbangkan masalah seputar aksesibilitas dan kegunaan layanan, misalnya bagi penyandang disabilitas dan orang yang terkena kesenjangan digital.
- 2) ICT memfasilitasi "inovasi layanan" pemerintah - reorganisasi besar-besaran dari desain dan pengiriman layanan. Inovasi layanan memerlukan integrasi kesadaran terhadap isu-isu ICT ke dalam proses pengembangan kebijakan.
- 3) Dalam beberapa kasus, tampaknya ada kebutuhan untuk mengintegrasikan kembali desain layanan (kebijakan) dan pengiriman layanan (operasi) berdasarkan pemahaman bahwa kedua tahapan tersebut sangat terkait dan saling berinteraksi.
- 4) Arsitektur perusahaan dan pengiriman layanan serta kerangka interoperabilitas adalah alat-alat kritis untuk pengiriman multi-saluran yang efektif. Arsitektur E-Government awalnya dimulai sebagai instrumen manajemen yang terutama berfokus pada sisi ICT pemerintah. Mereka sekarang berkembang menjadi alat-alat yang memetakan sisi bisnis pemerintah dan menghubungkannya dengan dimensi tata kelola dan teknologi pemerintah. Hal ini memerlukan partisipasi dari program, kebijakan,

dan anggaran, serta kantor TI dalam perancangan dan implementasi arsitektur layanan dan bisnis.

c. Mengidentifikasi Proses Bisnis Umum: Bagaimana mencapai proses bisnis yang kolaboratif?

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi di seluruh pemerintah, diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengorganisir proses bisnis umum serta mengembangkan solusi yang sejalan atau dibagikan di seluruh agensi.
- 2) Proses bisnis khusus agensi dapat menyebabkan duplikasi yang tidak perlu. Arsitektur perusahaan dan pengiriman layanan (yaitu pemetaan fungsi, layanan, dan proses bisnis pemerintah secara menyeluruh serta cara ICT dan data dapat mendukungnya) dan kerangka interoperabilitas (standar teknis umum yang memungkinkan sistem data dan informasi yang berbeda terhubung di sepanjang batas agensi dan layanan) menjadi kunci untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas e-government.
- 3) Negara-negara yang lebih terpusat cenderung menggunakan pendekatan top-down yang lebih terstruktur dan komprehensif. Hal ini mungkin menyebabkan identifikasi lebih banyak proses bisnis umum, tetapi tidak menjamin kerjasama agensi dalam mengimplementasikan dan menggunakan mereka.
- 4) Negara-negara yang kurang terpusat, dengan menggunakan pendekatan bottom-up lebih banyak, tampaknya mengidentifikasi lebih sedikit proses bisnis umum, tetapi dapat memiliki kerjasama agensi yang lebih besar dalam menggunakan solusi apa pun yang dikembangkan.
- 5) Manfaat Bisnis untuk E-Government: Bagaimana inisiatif e-government dapat didasarkan pada manfaat bisnis yang solid?
- 6) Pengeluaran e-government harus ditargetkan dan dibenarkan melalui penyusunan kasus bisnis yang konsisten untuk inisiatif e-government. Kasus bisnis memberikan perkiraan biaya dan manfaat yang diharapkan dari sebuah proyek serta kerangka evaluasi manfaat yang tercapai.
- 7) Kasus bisnis juga memungkinkan penilaian yang tepat apakah pengembalian investasi yang diharapkan dari e-government tercapai dan menawarkan tanggung jawab yang lebih jelas untuk memberikan hasil.
- 8) Pekerjaan pada kasus bisnis untuk e-government sedang meluas dari sekadar melihat manfaat bagi pemerintah dan pengguna untuk mencakup lebih banyak "manfaat publik" yang merata (misalnya kepercayaan publik).
- 9) Bukti saat ini dari kasus bisnis e-government menunjukkan bahwa ada manfaat di setiap tingkat kematangan e-government, dengan manfaat tertinggi berasal dari inisiatif e-government yang transformasional (yaitu inisiatif yang mengubah struktur dan/atau alur informasi di antara agensi untuk pemerintahan yang lebih baik).

d. Koordinasi E-Government: Bagaimana cara terbaik mengorganisir untuk mengatasi tantangan organisasional baru?

- 1) E-Government menantang negara-negara untuk memikirkan ulang struktur dan proses organisasi pemerintah, tetapi tidak ada cara tunggal yang terbaik untuk mengorganisir e-government secara keseluruhan.
- 2) Kebutuhan akan data, sistem komputer, dan proses bisnis untuk dapat terhubung satu sama lain di antara agensi (yaitu interoperabilitas) mungkin secara sekilas tampak mendukung inisiatif e-government yang lebih terpusat, tetapi pendekatan yang sepenuhnya terpusat tidak begitu umum, karena dukungan agensi sama pentingnya.
- 3) Pusat beberapa aspek e-government (misalnya standar teknis) pada gilirannya dapat memungkinkan desentralisasi keputusan lain (misalnya cara menggunakan ICT untuk benar-benar memberikan layanan).
- 4) Keprihatinan masa depan bagi pemerintah bukanlah sentralisasi versus desentralisasi. Negara-negara sekarang perlu mulai mengorganisir e-government sehingga sepenuhnya terintegrasi ke dalam tata kelola dan aktivitas setiap agensi.

F. E-government selama 10 Tahun: Analisis Perbandingan E-government di Beberapa Negara di Seluruh Dunia

Selama dekade terakhir, kita telah menyaksikan revolusi dalam penyediaan layanan pemerintah elektronik kepada warga negara. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuatnya memungkinkan untuk mengembangkan dan menerapkan layanan pemerintah elektronik, terdapat perbedaan mencolok dalam alasan di balik tingkat penggunaan layanan pemerintah elektronik yang bervariasi di berbagai negara. Sementara negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan banyak negara Eropa, memiliki infrastruktur TIK yang canggih, penggunaan layanan e-government oleh warga masih terbatas.

Negara-negara berkembang masih berjuang untuk mengembangkan dan menerapkan infrastruktur dasar untuk TIK, yang membatasi kemampuan orang untuk menggunakan layanan e-government yang sudah dikembangkan. Kontras ini menyajikan serangkaian isu unik, yang menantang warga negara untuk menggunakan layanan e-government secara efisien dan efektif. Studi ini meneliti

beberapa negara maju dan berkembang dari enam benua di seluruh dunia berdasarkan inisiatif pemerintah elektronik mereka di masa lalu dan saat ini, membahas tujuan dan manfaat serta tantangan dari layanan e-government. Negara-negara yang kami telaah meliputi: Amerika Serikat dan Kanada (Amerika Utara); Britania Raya dan Jerman (Eropa); India dan Pakistan (Asia); Australia dan Selandia Baru (Australia); Kenya dan Nigeria (Afrika); Argentina dan Brasil (Amerika Selatan). Kami menggunakan laporan yang telah dipublikasikan, arsip, dan laporan terkini untuk meneliti kematangan e-government di setiap negara. Memahami tren dan tantangan dalam e-government akan membantu para pembuat kebijakan, pengembang, dan penyedia layanan merancang dan menyampaikan layanan e-government yang lebih baik.

Mengakui manfaat peningkatan efisiensi dalam penyampaian layanan pemerintah melalui media elektronik, inisiatif e-government telah meningkat pesat dalam dekade terakhir (Weerakkody, Choudrie, & Currie, 2004). Contoh layanan sektor publik tersebut meliputi (namun tidak terbatas pada) pengajuan pajak, manajemen identitas (termasuk penerbitan dan perpanjangan kartu identitas, SIM, dan paspor), pengajuan online untuk pekerjaan pemerintah, penentuan kelayakan untuk manfaat pemerintah, perolehan akta kelahiran/izin nikah, perpanjangan SIM, pengajuan beasiswa sekolah menengah, pendaftaran sebagai pemilih, dan dalam beberapa kasus, pemilihan umum.

Sifat penyampaian layanan pemerintah telah mengalami transformasi cepat dalam beberapa tahun terakhir (Heeks & Bailura, 2007; Mosse & Whitley, 2009). Industri layanan baru, penyampaian layanan yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih cepat dan murah adalah beberapa hasil samping dari revolusi teknologi ini (Devadoss, Pan, & Huang, 2002).

Meskipun ide penggunaan komputer dan jaringan untuk penyampaian layanan pemerintah bukanlah hal baru, tantangan dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan e-government terus menghantui pembuat kebijakan, pengembang, dan penyedia layanan. Akibat tantangan politik, organisasional, dan teknis, banyak inisiatif e-government tertinggal dari harapan pengguna (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008). Meskipun tantangan serupa ada di sektor swasta, bisnis telah menerapkan praktik Business Process Management (BPM) untuk meningkatkan fleksibilitas, produktivitas, dan efektivitas operasional, dan sekarang ada tekanan yang semakin besar dari warga dan bisnis untuk sektor publik agar melakukan hal yang sama, karena e-government membangun pada prinsip e-business (Weerakkody et al., 2004). Untuk memanfaatkan efek teknologi modern, penting bahwa proses organisasi didokumentasikan, dipahami, dan dikoordinasikan dengan strategi teknologi informasi (TI) nya.

Implementasi e-government mengimplikasikan tujuan dan tingkat transformasi yang berbeda. Misalnya, di Amerika Serikat, tujuan utamanya adalah mengotomatisasi dan mengintegrasikan berbagai pulau informasi untuk menyederhanakan dan memaksimalkan manfaat teknologi (Iyer, Baqir, & Vollmer, 2006; Navarra & Cornford, 2003), sedangkan di Eropa, penekanannya adalah memodernisasi layanan publik dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada warga (Cuddy, 2003). Namun, apa pun tujuan utamanya, penyampaian efektif layanan e memerlukan integrasi proses dan sistem informasi (IS) serta koordinasi proses antara organisasi dan pemangku kepentingan yang berbeda.

Definisi e-government telah berkembang selama 10 tahun terakhir, dan upaya untuk menjelaskannya secara komprehensif dalam satu pernyataan

tampaknya mustahil. Namun, pemahaman umum adalah bahwa e-government merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya aplikasi berbasis web, untuk menyediakan akses dan pengiriman informasi atau layanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih efisien kepada masyarakat umum, bisnis, lembaga lain (non-profit), dan entitas pemerintah (Biancucci et al., 2001; Dearstyne, 2001; Palvia & Sharma, 2007). Hal ini pada gilirannya meningkatkan hubungan, memperluas basis pelanggan secara keseluruhan, dan meningkatkan operasi bisnis inti melalui peninjauan kembali proses internal.

Selama 10 tahun terakhir, beberapa ide penyediaan administrasi modern dan demokrasi dalam penyampaian layanan publik telah muncul, dengan komponen utama membawa transparansi dalam urusan publik. E-government dianggap sebagai "visi pemandu menuju administrasi modern dan demokrasi" (Wimmer & Traunmuller, 2000). E-government dilaporkan memiliki peran penting dalam membawa transparansi dalam urusan publik (Cho & Byung-Dae, 2004). Fokus e-government juga beralih ke konstituensi dan pemangku kepentingan di semua tingkatan, termasuk pemerintahan kota, kabupaten, negara, nasional, atau bahkan tingkat internasional (Palvia & Sharma, 2007). Pada dasarnya, ini terkait dengan transformasi yang harus dijalani oleh pemerintah dan administrasi publik di masa depan. Oleh karena itu, e-government bukanlah pilihan tetapi suatu keharusan agar pemerintah dapat meraih manfaat dari TIK dan tidak tertinggal. E-government juga dipandang sebagai "mentransfer kekuasaan kepada rakyat, dengan beroperasi secara satu pintu, tanpa henti, dan melakukan lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit" (Lawson, 1998). Penelitian tentang teknologi menekankan bahwa "teknologi hanyalah salah satu bahan struktural" (Nadler &

Tushman, 1997), menunjukkan bahwa e-government melampaui sekadar penggunaan IT. Tantangannya adalah untuk secara efektif mendesain ulang interaksi antara pemerintah, warga, dan bisnis, yang secara otomatis mengimplikasikan reorganisasi proses internal.

Secara historis, birokrasi yang terkait dengan organisasi pemerintah menghalangi efektivitasnya (Wilson, 1989). Bahkan setelah munculnya e-government, sebagian besar proses birokratis masih melibatkan pekerjaan manual dan memiliki banyak titik pemeriksaan. Ketika pemangku kepentingan dalam suatu proses bekerja sebagai entitas terpisah, masing-masing mengelola atau berurusan dengan silo pengetahuan dan informasi yang terputus, sangat sulit untuk menyampaikan layanan dengan efisien. Oleh karena itu, langkah pertama menuju penyampaian layanan yang efisien adalah memfasilitasi lingkungan jaringan transparan di mana pemerintah dapat benar-benar bermitra dengan pemerintah lain, bisnis, warga, dan pemangku kepentingan tambahan (GAO, 2003).

Karena pemerintah semakin melihat ke arah masa depan digital, e-government menjadi area penelitian yang menarik. Bab ini memberikan gambaran tentang metode pengukuran e-government utama yang menjadi dasar model kematangan e-government. Bab ini juga meninjau inisiatif e-government selama 10 tahun terakhir di beberapa negara maju dan berkembang dari empat benua (yaitu Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia) dan mengidentifikasi masalah utama dalam penggunaan layanan e-government. Ini juga melihat hasil analisis perbandingan antara negara-negara ini dan memetakannya pada model kematangan e-government. Diskusi mengenai kesulitan dan tantangan masa depan yang dihadapi warga ketika menggunakan layanan e-government akan

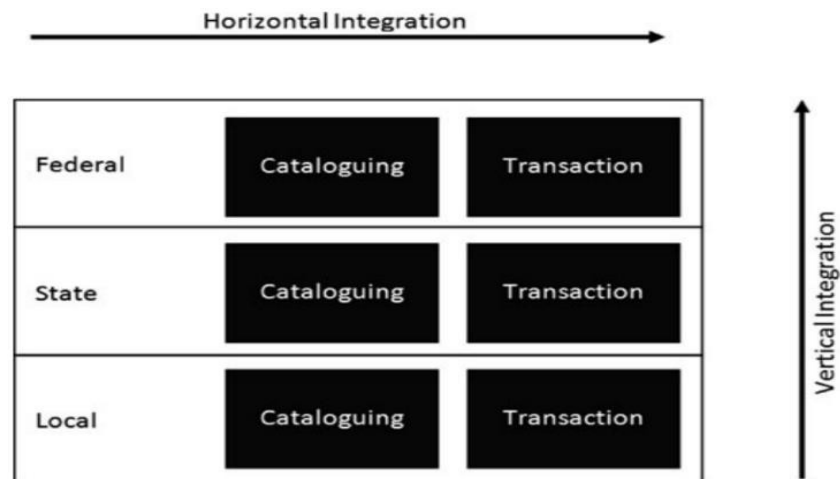
memberi manfaat bagi pembuat kebijakan, pengembang layanan, dan penyedia layanan dalam merancang dan menyampaikan layanan e-government yang lebih baik. Bab ini diakhiri dengan menyoroti tren dan tantangan masa depan untuk e-government.

1. Tahapan E-Government

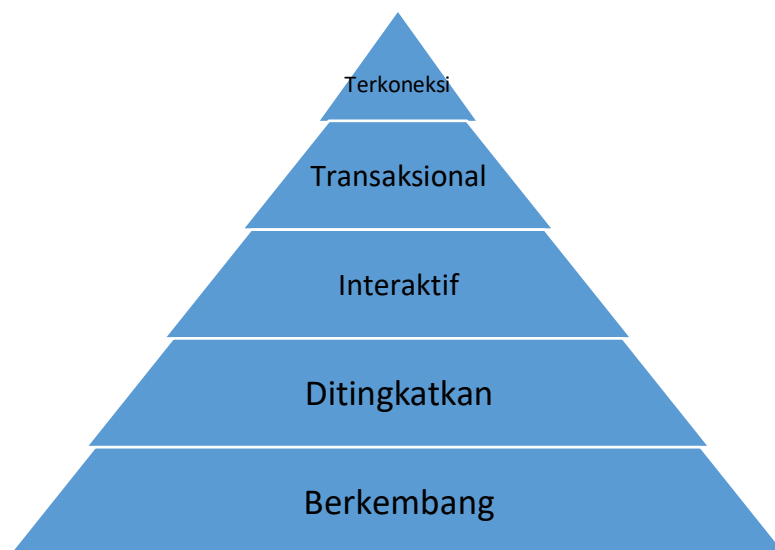
Untuk mengevaluasi kematangan e-government di beberapa negara di seluruh dunia, kami menyajikan dasar-dasar teoritis dalam bagian ini. Beberapa peneliti telah mengembangkan kerangka e-government dan rencana evaluasinya (Grant & Derek, 2005). Model yang banyak digunakan mengakui empat tahap pengembangan e-government: (1) katalog, (2) transaksi, (3) integrasi vertikal, dan (4) integrasi horizontal (Layne & Lee, 2001). Dalam tahap pertama, pemerintah membuat kehadiran online awal. Ini mencakup, dan seringkali terbatas, pada penyajian informasi online. Pemerintah, warga, dan bisnis tidak dapat melakukan transaksi apa pun.

Sebaliknya, upaya difokuskan pada pengumpulan informasi internal, (re)organisasi, dan penyajian akhir di Web. Namun, formulir mungkin diunduh, dicetak, dan kemudian dikirim kembali melalui sistem pos normal. Tahap kedua, transaksi, mencakup peningkatan layanan dan akses ke formulir online. Warga dan bisnis sekarang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pemerintah. Contoh melibatkan penggunaan formulir interaktif dan tanda tangan digital untuk tugas seperti mendaftarkan bisnis, mengajukan izin bangunan, atau mengajukan tunjangan pengangguran. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan upaya mereka dalam menghubungkan prosedur internal mereka ke dunia online. Sementara katalogisasi ditandai oleh integrasi yang jarang serta kompleksitas teknologi dan organisasi yang sederhana, integrasi horizontal ditandai oleh integrasi dalam setiap tingkat. Integrasi di sepanjang tingkat yang berbeda, lokal,

negara bagian, dan federal mencirikan integrasi vertikal. Gambar berikut menunjukkan representasi visual dari model ini:



Gambar 2. 1 Vertical dan Horizontal Integrasi (Layne & Lee, 2001)



Gambar 2. 2 Fase-fase Indeks Pengukuran Web (Laporan PBB, 2008)

Model terbaru (lihat Gambar 2.2) yang dikembangkan oleh studi PBB tahun 2008 tentang e-government, mengidentifikasi lima tahap untuk indeks pengukuran

Web. Tahapan ini meliputi: (1) muncul, (2) ditingkatkan, (3) interaktif, (4) transaksi, dan (5) terkoneksi. Sesuai dengan model ini, negara-negara menghadapi ambang batas yang berbeda dalam hal pengembangan infrastruktur, penyampaian konten, rekayasa bisnis, manajemen data, keamanan, dan manajemen pelanggan. Pada tahap pertama, situs web pemerintah mungkin menyediakan informasi dasar tentang departemen pemerintah. Pada tahap kedua, mereka mungkin memiliki informasi lebih banyak terkait tata kelola kebijakan publik. Pada tahap ketiga, pemerintah dapat menyediakan formulir yang dapat diunduh. Pada tahap keempat, pemerintah mungkin benar-benar terlibat dalam transaksi antara publik dan pemerintah.

Pada tahap terakhir, berbagai tingkat dan departemen pemerintah dapat mengubah diri mereka menjadi bentuk infrastruktur kantor belakang yang terintegrasi. Dari deskripsi kedua model ini, jelas bahwa selama dekade terakhir, sementara gagasan baru mungkin telah berkembang, pemahaman dasar tahapan tetap hampir sama. Oleh karena itu, bagian berikutnya tentang perbandingan negara memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana mengklasifikasikan negara-negara berbeda dalam kerangka yang dijelaskan. Bagi warga, bisnis, dan pemerintah, langkah-langkah agresif menuju integrasi yang meningkat diinginkan karena mereka menawarkan akses yang lebih baik ke sejumlah layanan pemerintah dan mengurangi hambatan fungsional dalam pemerintahan itu sendiri.

Selama 10 tahun terakhir, beberapa penulis telah melaporkan tentang keuntungan e-government dengan contoh konkret dari sistem e-government yang sebenarnya yang menghasilkan penghematan biaya nyata. Pada saat yang sama, ada beberapa publikasi yang melaporkan tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah e. Tabel 1.1 merangkum keuntungan dan keterbatasan ini yang

disajikan dalam literatur e-government (Accenture, 2004, 2009; Dhillon, 2001; Dillon, Deakins, & Chen, 2006; Iyer et al., 2006; Seifert & Petersen, 2002; Symonds, 2000; Tillman, 2003). Sementara keuntungan dan tantangan sebagaimana dijelaskan dalam literatur diberikan dalam satu tabel, lokasi mereka dalam table tidak selalu menunjukkan urutan peringkat atau mengimplikasikan hubungan langsung dengan keuntungan dan tantangan lainnya.

Tabel 2. 1 Ringkasan keuntungan dan tantangan terkait inisiatif e-government

Keuntungan	Tantangan
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Keberatan terkait privasi/keamanan/kerahasiaan
Meningkatkan komunikasi	Ketebalan informasi
Menghilangkan redundansi dan inkonsistensi	Cara menilai informasi
Meningkatkan transparansi	Situs web tidak berfungsi/telah kedaluwarsa
Memberikan peluang untuk bermitra dengan sektor swasta	Manfaat sering kali hanya terkait dengan tahap-tahap tinggi pembangunan
Dapat memiliki dampak pada seluruh ekonomi	Perlawanan internal/ketidakberlanjutan kepemimpinan
Mendorong adopsi internet	Kurangnya sumber daya/kemampuan/infrastruktur
Mengurangi biaya (komunikasi, informasi, tenaga kerja, dan bahan)	Investasi tinggi yang diperlukan
Meningkatkan kecepatan dan penyampaian layanan, memperluas jangkauan, mengatasi masalah jarak	Menghilangkan interaksi/kontak pribadi/kemungkinan untuk bertanya pertanyaan
Meningkatkan kenyamanan	Mengancam pekerjaan
Memberdayakan warga	Peluang periklanan terbatas dan oleh karena itu kurangnya kesadaran.
Menarik investasi, bisnis, dan tenaga kerja terampil	Ukuran besar dan sifat birokratis pemerintahan mengurangi fleksibilitas.
Meningkatkan jumlah informasi yang tersedia	Meningkatkan kepercayaan warga terhadap e-government.
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya	

2. Perbandingan Negara

Ide dan teknik inti yang terkait dengan menghadirkan pemerintahan secara online pertama kali muncul di negara-negara Barat yang paling berkembang pada pertengahan tahun 1990-an. Kemudian, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara lain juga telah mendirikan situs web e-government mereka sendiri. Bagi negara-negara maju, masalahnya bukan lagi apakah pemerintah ada atau seharusnya ada secara online, tetapi dalam bentuk apa dan dengan konsekuensi apa.

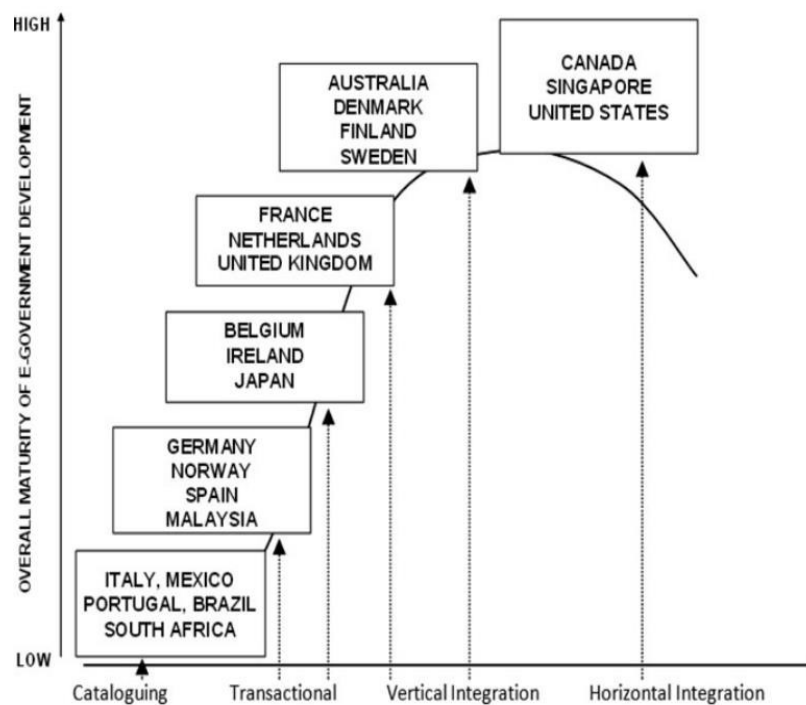
Negara-negara ini telah memperluas layanan partisipatif secara online melalui penggunaan portal e-partisipasi dan mekanisme konsultasi online yang mendorong umpan balik warga mengenai isu-isu kebijakan ekonomi dan sosial penting (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008).

Studi Accenture mengungkapkan bahwa pada tahun 2004 (Accenture, 2004), 173 dari 191 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengoperasikan situs web, dan 18 negara, terutama di Afrika, tetap sepenuhnya offline. Namun, hanya ada tiga negara yang pada tahun 2008 pemerintahnya belum memiliki kehadiran online, yaitu Republik Afrika Tengah, Somalia, dan Zambia. Pada tahun 2009, Republik Afrika Tengah dan Somalia adalah dua negara yang masih belum memiliki situs web resmi pemerintah.

Meskipun sebagian besar negara telah mengembangkan tingkat kehadiran online, penggunaan layanan e-government masih sangat terbatas (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008). Alasannya adalah bahwa seringkali penawaran sektor publik berbeda dari apa yang pengguna benar-benar inginkan. Selain itu, meskipun semua perbaikan yang telah dilakukan, hanya 15 pemerintah di dunia yang menerima komentar publik tentang isu kebijakan, dan hanya 32 yang memungkinkan transaksi online. Di negara-negara berkembang, sekitar 60% dari

semua proyek e-government gagal, dan sekitar setengahnya menghamburkan uang pajak (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008).

Berdasarkan dasar teoritis yang dikembangkan dalam bagian sebelumnya, indeks kematangan e-government dikembangkan dan ditampilkan dalam gambar 2.3. Gambar ini menampilkan posisi relatif negara-negara terpilih pada "indeks kematangan e-government" yang dikembangkan berdasarkan empat tahap Layne dan Lee (2001).

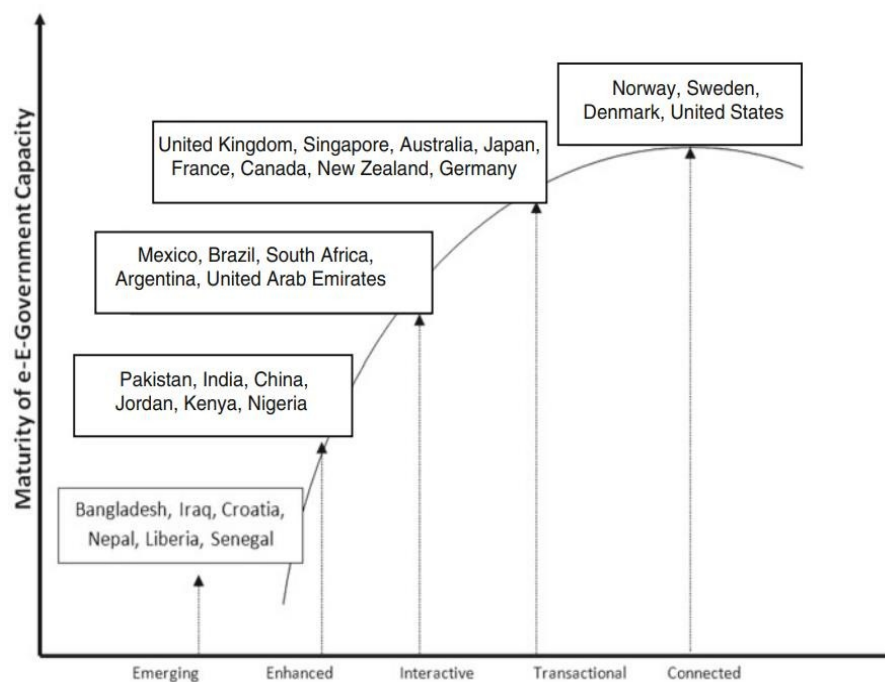


Gambar 2. 3 Model Kematangan E-government 2001 (Layne & Lee, 2001)

Dikarenakan studi UN tahun 2008 memberikan lebih banyak rincian dalam tahapan pengembangan e-government, model baru yang kami kembangkan didasarkan pada lima tahap tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam Fig. 1.4. Kedua model ini (Gambar 2.3 dan 2.4) mencerminkan perbedaan dalam perbandingan antara berbagai negara pada indeks kematangan e-government

dan bagaimana negara-negara ini telah lebih jauh berkembang atau mengalami penurunan dalam kematangan e-government mereka.

Kanada dan Singapura, yang menempati peringkat kematangan teratas pada tahun 2006, telah bertukar tempat dengan Denmark, Swedia, dan Norwegia. Pertukaran ini konsisten dengan survei yang dilakukan oleh UN pada tahun 2005 dan 2008. Sebagai contoh, Inggris turun peringkat dalam peringkat indeks e-partisipasi dari posisi 1 pada tahun 2005 menjadi 24 pada tahun 2008 (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008). Penurunan peringkat menandakan bahwa beberapa negara menghentikan upaya mereka untuk mengikuti inovasi layanan e-government, sementara yang lain terus melakukan perbaikan (Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2008)



Gambar 2. 4 Pembaruan pada Kematangan E-government

Peringkat ini didasarkan pada data kuantitatif dari studi Accenture tahun 2004, studi UN tahun 2005, studi UN tahun 2008, dan evaluasi kualitatif beberapa negara berdasarkan layanan e-government yang telah mapan, peningkatan sejak tahun 2006, dan inisiatif e-government baru sebagaimana dibahas dalam bagian berikutnya. Strategi e-government di negara-negara dari enam benua, yaitu Afrika, Asia, Australia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, dipresentasikan dengan lebih detail di bawah ini.

1) Afrika

Benua Afrika adalah rumah bagi populasi yang sangat beragam. Keragaman dalam bahasa, budaya, sejarah, agama, sumber daya, dan ekonomi terlihat dalam keragaman infrastruktur pemerintah di seluruh benua. Mulai dari demokrasi yang stabil hingga monarki, dan dari diktator militer hingga panglima perang yang melakukan pembantaian, konsep e-government dianggap asing dan dibangun di atas desain e-government yang diimpor. Afrika adalah satu-satunya benua di mana beberapa negara (Republik Afrika Tengah dan Somalia) bahkan tidak memiliki situs web pemerintah dasar.

Dalam beberapa kasus, individu atau kelompok telah mengembangkan situs web yang menyatakan itu sebagai "Situs Web pemerintah resmi" (misalnya, somaligovernment.org) untuk mengisi kesenjangan dari situs web pemerintah yang tidak diurus dengan baik.

Di beberapa bagian Afrika, upaya pengembangan infrastruktur e-government yang luas dimulai sejak akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Dari penggunaan Sistem Dukungan Informasi dan Keputusan (IDSS) untuk memfasilitasi komunikasi intra-pemerintah di Mesir (Kamel, 1998) hingga penggunaan sistem informasi geografis untuk mendaftarkan pemilih dan mendukung proses pemilihan di Afrika Selatan (Microsoft, 2000) menunjukkan

bahwa potensi e-government telah meningkat di Afrika seiring waktu. Meskipun masih ada beberapa tantangan terkait masalah teknis, hukum, institusional, manusia, dan kepemimpinan, dapat diharapkan bahwa negara-negara di Afrika akan melonjak lebih maju dari yang lain dengan belajar dari kesuksesan dan kegagalan e-government negara-negara lain.

a. Kenya

E-government di Kenya telah berkembang selama 10 tahun terakhir. Namun, sebagian besar manfaat pertumbuhan ini dirasakan oleh warga di pusat-pusat perkotaan besar seperti Nairobi, Mombasa, Nakuru, dan Kisumu. Pendirian direktorat e-government telah menghasilkan perkembangan di beberapa bidang. Direktorat ini telah berperan penting dalam menyediakan komputer, perangkat lunak, infrastruktur, dan pelatihan di berbagai lembaga pemerintah. Saat ini, direktorat e-government menyediakan konektivitas untuk pencarian pekerjaan dan aplikasi layanan publik; pelacakan status kartu identitas; dan paspor, pengajuan pajak, dan bea cukai.

Strategi e-government Kenya berfokus pada penyediaan sistem pesan dan kolaborasi pemerintah (EMACS), pengembangan pusat data, peningkatan portal web kementerian, implementasi e-aplikasi, dan pengembangan infrastruktur komunikasi informasi (Direktorat E-government di Kenya, 2009, www.e-government.go.ke). Kenya perlu lebih mengembangkan infrastruktur TI-nya untuk memperluas layanan kepada warga di daerah terpencil. Setelah tinjauan dan perbandingan yang cermat terhadap kematangan pemerintah dengan negara-negara lain, kami menempatkannya pada tingkat "Enhanced" dalam Gambar. 1.4.

b. Nigeria

E-government di Nigeria telah berkembang secara stabil selama beberapa tahun terakhir. Kerangka implementasi e-government telah meluncurkan beberapa "proyek berorientasi pada warga" (Agunloye, 2007). Meskipun jangkauan layanan e-government terbatas, layanan yang tersedia sudah sangat baik dikembangkan. Mulai dari registrasi online dan pengelolaan catatan warga dan bisnis hingga aplikasi paspor online, memberikan layanan pemerintah kepada warga di tempat tinggal mereka. Namun, infrastruktur TI tidak tersedia bagi sebagian besar populasi di luar beberapa area perkotaan besar. Setelah tinjauan yang cermat terhadap kematangan e-government di Nigeria, kami menempatkannya dalam kategori "Enhanced" dalam Gambar. 1.4.

2) Asia

a. India

Menurut Kementerian TI di India (Kementerian TI, 2005), sebagian besar negara bagian di selatan India telah melaksanakan beberapa proyek e-government setelah membangun infrastruktur TI yang cukup baik. Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, dan Chandigarh menempati peringkat terdepan dalam indeks kesiapan e-government untuk penyampaian e-government. Meskipun India telah menggunakan basis data terkomputerisasi untuk militer, pemilihan umum, perencanaan ekonomi, sensus nasional, dan pengumpulan pajak, baru pada tahun 1990-an warga dapat berinteraksi langsung dengan proyek e-government.

Proyek-proyek seperti Bhoomi (administrasi tanah untuk Karnataka), CARD (administrasi tanah untuk Andhra Pradesh), Gyandoot (layanan komputasi

untuk penduduk desa), e-seva (pembayaran tagihan utilitas di Andhra Pradesh), Akshaya (pelatihan komputer untuk penduduk desa di Kerala), Lokvani (berbagai layanan pemerintah), dan SARI (koneksi internet nirkabel untuk penduduk desa) merupakan contoh aspiratif dan indikatif dari minat publik-swasta dalam menciptakan lingkungan untuk mengembangkan dan menggunakan layanan e-government meskipun teledensity berada pada 12,74% (India Core, 2006), pertumbuhan telekomunikasi di beberapa negara bagian luar biasa. Dengan kapasitas link internasional sekitar 541 Gbps, yang perlu dilakukan hanya menciptakan dan membangun infrastruktur internal bagi penduduk yang tinggal di tempat terpencil di India. Kami menempatkan India pada tingkat "Enhanced" dalam Gambar

b. Pakistan

Infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk pembangunan dan penggunaan e-government. Awal milenium ini terbukti menjadi titik balik bagi infrastruktur teknologi informasi Pakistan. Teledensity di Pakistan telah tumbuh dari 2,80% pada tahun 2000 menjadi 64% pada tahun 2009 (Pakistan Telecommunication Authority [PTA], 2009). Jumlah pengguna internet tumbuh dari 10.000 pengguna di 10 kota besar pada tahun 1999 menjadi lebih dari 5 juta (asosiasi penyedia layanan internet mengklaim angka ini menjadi 10 juta) di lebih dari 400 kota pada tahun 2009 (PTA, 2009). Peningkatan penggunaan Internet berkecepatan tinggi (sebagian besar DSL/ADSL), menciptakan peluang bagi pengembangan lingkungan e-government.

Meskipun penggunaan Internet berkecepatan tinggi semakin berkembang, jumlah perusahaan yang menawarkan produk/layanan online sangat kecil (kurang dari 1% dari populasi). Dengan pertumbuhan infrastruktur yang besar selama

beberapa tahun terakhir, Pemerintah Pakistan mengambil beberapa inisiatif termasuk pendirian kementerian TI dan telekomunikasi, otoritas basis data dan registrasi nasional (NADRA—basis data dan manajemen identitas warga), kebijakan TI nasional, direktorat pemerintah elektronik, pencatatan elektoral terkomputerisasi, dan komputerisasi catatan kepemilikan tanah dan pengajuan pajak elektronik (Baqir & Parvez, 2000; Election Commission of Pakistan [ECP], 2009; Electronic Government Directorate [EGD], 2009; Mujahid, 2002).

Inisiatif-inisiatif ini ditambahkan pada langkah-langkah dalam rencana strategi implementasi e-government 5 tahun yang diberikan dalam. Meskipun rencana Pemerintah Pakistan menarik dan penuh aspirasi, bisnis online hampir tidak ada di negara ini. Hal ini menyebabkan situasi aneh di mana pemerintah menawarkan banyak cara kepada warganya untuk menggunakan layanan e-government tetapi warga tidak familiar dengan apa yang dapat dilakukan secara online.

Kurangnya konten bahasa lokal menjadi penghambat utama dalam kemampuan warga untuk menggunakan layanan e-government secara efektif. Juga kurangnya bukti statistik untuk menyelidiki sejauh mana inisiatif e-government ini benar-benar digunakan oleh warga. Selain masalah kepercayaan pada e-government, kontrol akses dan mekanisme keamanan menghambat penggunaan luas layanan online. Dengan memperhatikan perkembangan ini dalam kematangan e-government di Pakistan, kami menempatkannya dalam kategori "Enhanced" dalam Gambar. 1.4.

3) Australis – Selandis Baru

a. Australia

Australia dan Selandia Baru, di benua Australia, menyediakan berbagai layanan e-government kepada warganya. Kedua negara ini ditempatkan bersama negara-negara dengan layanan e-government yang bersifat transaksional. Literatur mengenai proyek, inisiatif, dan evaluasi e-government di Australia dan Selandia Baru sangat luas dan berfokus pada isu-isu transaksional dan konektivitas (Gauld, Gray, & McComba, 2009).

Meskipun pemerintah Australia telah menyediakan layanan e-government selama sekitar satu dekade, strategi menuju e-governance yang diluncurkan pada tahun 2006 telah menghasilkan berbagai isu penelitian terkait e-government. Tantangan utama yang dihadapi di Australia adalah melindungi data warga agar aman dan menciptakan operasi yang mulus antara lembaga-lembaga yang mungkin saat ini bekerja pada sejumlah sistem perangkat lunak atau teknologi yang berbeda. Fokus pada pengembangan layanan online yang terintegrasi dan berorientasi pada pelanggan untuk merespons lebih cepat sambil mengurangi biaya menempatkannya pada tingkat kematangan e-government "transaksional" dalam model kami. Namun, tantangan untuk menangani integrasi layanan pemerintah yang lebih canggih dan rumit tetap menjadi tantangan dan hambatan utama.

b. Selandia Baru

Layanan e-government dan tantangannya bukan hal baru di Selandia Baru. Implementasi e-government adalah kasus menarik di Selandia Baru. Negara ini hanya memiliki dua tingkat pemerintahan, sehingga konsep tradisional pemerintahan lokal, negara, dan federal tidak berlaku. Dari e-government di tingkat

lokal hingga tingkat federal, pandangan pembuat kebijakan sedang mengubah sifat pemerintahan di negara ini. Selandia Baru mengakui kebutuhan atau potensi kebutuhan pengumpulan dan berbagi informasi di antara warganya dan komunitas global.

Kesadaran mereka terlihat dalam berbagai inisiatif yang telah mereka pimpin di negara ini. Proyek-proyek seperti mendirikan infrastruktur yang menyediakan akses broadband yang lebih cepat dan lebih murah untuk mendorong inovasi dan menambah nilai, menggunakan teknologi sosial yang familiar termasuk situs jejaring sosial dan alat seperti blog, wiki, dan folksonomi—serta berbagai saluran digital—ponsel, pesan instan, podcast, dan TV digital, serta jalur Internet memberikan nilai tambah.

Sistem manajemen perpustakaan tunggal memberikan akses ke perpustakaan Auckland City, Manukau, North Shore, Rodney, dan Waitakere dengan menggunakan teknologi RFID untuk mengelola koleksi buku mereka. Namun, tantangan-tantangan yang ada sangat banyak. Tantangan terbesar adalah masalah kolaborasi antar lembaga; alat telah dikembangkan untuk mempromosikan kolaborasi online, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan dalam statistik yang berkaitan dengan penggunaan aktual. Mereka termasuk dalam kategori "Transaksional" dalam tingkat kematangan e-government seperti yang ditunjukkan dalam Gamb. 2.4.

4) Eropa

Eropa mewakili tingkat keragaman yang luas dalam hal kematangan e-government. Beberapa negara, terutama di Skandinavia, memiliki kematangan e-government yang sangat tinggi. Data dari survei UN 2008 juga menunjukkan bahwa Norwegia, Swedia, dan Denmark kini memimpin Amerika Serikat jika

partisipasi warga dalam e-government diperhatikan. Ada beberapa negara, terutama di Eropa Timur, yang masih berada pada fase berkembang atau ditingkatkan dari indeks kematangan Web. Pada tahun 2000, KTT Eropa di Lisbon dan Feira menentukan kembali ambisi e-government benua ini dengan menetapkan empat panduan. Agenda baru ini mencakup pengembangan berkelanjutan layanan berbasis Internet untuk meningkatkan akses ke informasi dan layanan, peningkatan transparansi administrasi publik, pemanfaatan penuh teknologi informasi, dan pendirian e-procurement. Tujuan-tujuan ini menunjukkan kemiripan tinggi dengan tujuan Amerika Serikat. Namun, seperti seringkali terjadi, target-target menantang ini belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Secara keseluruhan, sektor publik Eropa menghadapi kondisi ekonomi dan sosial yang menantang, perubahan institusional, dan tentu saja dampak teknologi informasi. Untuk meningkatkan pertumbuhan, efisiensi, dan produktivitas, kualitas layanan pemerintah masih perlu ditingkatkan. Saat ini, sekitar 67% layanan publik dapat diakses secara online. Karena angka-angka seperti ini selalu bergantung pada asumsi yang mendasarinya, mereka harus digunakan dengan hati-hati. Sementara persentasenya lebih tinggi jika melihat layanan publik hanya dari perspektif ketersediaan online, persentasenya lebih rendah jika fokus pada layanan publik yang sudah benar-benar transaksional. Di antara kategori layanan publik, layanan penghasil pendapatan (pajak dan kontribusi sosial) adalah yang paling berkembang, diikuti oleh layanan pendaftaran (registrasi mobil dan perusahaan baru) dan pengembalian, seperti jaminan sosial. Layanan terkait dokumen dan izin (sim, paspor) adalah yang paling kurang berkembang di Web. Layanan untuk bisnis mencapai 79% tingkat canggih online, sedangkan layanan untuk warga mencapai tingkat 58%. Secara keseluruhan, di satu sisi, Eropa

membuat kemajuan dalam e-government. Di sisi lain, jika melihat ukuran layanan sepenuhnya transaksional dan tahap-tahap pengembangan e-government yang sangat maju, hasilnya tampaknya lebih pesimis.

a. Inggris

Meskipun Inggris (UK) termasuk negara-negara Eropa yang memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi, pertumbuhan pemerintahan elektroniknya tampaknya melambat dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan awal pemerintah Inggris (pada tahun 2000) adalah membuat semua layanan publik tersedia secara elektronik pada akhir tahun 2005. Namun, proyek ini mengalami beberapa kali penundaan. Sejak tahun 2005, lebih dari satu miliar poundsterling telah diinvestasikan untuk meningkatkan penawaran pemerintah pusat Inggris secara online. Namun, meskipun penetrasi Internet tinggi (70,9% dari populasi memiliki akses internet), penggunaan layanan pemerintahan elektronik tetap rendah. Beberapa tantangan, isu, dan kompleksitas dalam mencapai tahap "transformasi" dalam pemerintahan elektronik diidentifikasi (Weerakkody et al., 2004). Sejauh ini, sekitar 70% layanan pemerintah dapat diakses melalui Internet. Angka tersebut diharapkan mencapai 80% pada akhir tahun 2005, tanggal di mana semuanya seharusnya telah "e-enabled." Namun, proyek-proyek ini sebenarnya tidak selesai karena ketidakefisienan yang melekat dalam modul komunikasi antara berbagai organisasi (Mosse & Whitley, 2009). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa di tempat-tempat di mana layanan tersebut sudah ada secara online, hampir tidak ada yang sepertinya menggunakannya.

Kebiasaan penggunaan pemerintahan elektronik oleh masyarakat Inggris, yang mirip dengan masyarakat Amerika, mengecewakan. Jumlah besar situs web yang berbeda, koordinasi yang diperlukan antara beberapa organisasi, serta

keharusan untuk mengunjungi beberapa situs sebelum menemukan informasi berharga, sekali lagi tampaknya menjadi masalah utama mengapa pemerintahan elektronik tidak benar-benar berkembang di Inggris. Selain itu, beberapa situs web pemerintah sudah ketinggalan zaman atau tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya, masyarakat Inggris secara tradisional skeptis terhadap inisiatif pemerintah mereka, mengingat contoh kegagalan di masa lalu. Itulah mengapa penerimaan terhadap layanan pemerintahan elektronik di Inggris terus menjadi masalah. Untuk masa depan, pemerintah Inggris masih berencana untuk meningkatkan pengeluaran pada pemerintahan elektronik dengan beberapa miliar dalam beberapa tahun mendatang. Kami menempatkannya dalam kategori "Transaksional" dalam Gamb. 2.4.

b. Jerman

Jerman berada dalam kelompok negara-negara dengan pertumbuhan dari rendah hingga sedang dalam siklus hidup. Penekanan masih pada penyediaan informasi di Web, dan dorongan yang benar-benar terlihat menuju tingkat transaksi belum tampak. Selain itu, pemerintahan elektronik tidak dianggap sebagai aspek penting dalam debat politik. Pemindahan BundOnline 2005 dari Kementerian Dalam Negeri ke Kantor Federal untuk Administrasi mendukung pandangan ini. Kurang dari separuh pengguna Internet reguler di negara ini pernah menggunakan layanan pemerintahan elektronik sama sekali. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintahan elektronik di Jerman adalah bahwa sebagian besar inisiatif sejauh ini ditargetkan pada tingkat federal. Meskipun jumlah portal dan situs pemerintah sangat besar, layanan yang paling signifikan bagi warga dan bisnis umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, Jerman adalah negara yang sangat tergabung dalam serikat pekerja, dan sejumlah besar hukum ketenagakerjaan

membuat strategi merekrut dan memberhentikan karyawan (seperti di Amerika Serikat) tidak mungkin dilakukan.

Ketakutan akan kehilangan sejumlah besar pekerjaan pemerintah daerah untuk kemajuan dalam pemerintahan elektronik sudah membatasi beberapa kegiatan di fase awal. Terakhir, Jerman sering didominasi oleh tuntutan keamanan, kepastian hukum, dan privasi data, yang sebagian dapat diatribusikan pada budaya dan kebiasaan kerja negara ini. Meskipun begitu, beberapa rencana seperti pengenalan paspor digital pada tahun 2008 telah memberikan hasil yang baik.

Pemikiran tentang jenis paspor ini, yang memerlukan tanda tangan digital, pertama kali muncul setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001. Implementasinya yang berhasil, bersama dengan kegiatan yang direncanakan lainnya, membawa Jerman kembali ke posisi kematangan pemerintahan elektronik yang lebih diinginkan. Infrastruktur dan kemampuan teknologinya jelas mendukung posisi yang lebih cenderung pada praktik inovatif dan tingkat kematangan yang lebih tinggi dan tidak menyerupai status kematangan rendah yang dimiliki negara ini saat ini. Dalam survei PBB tahun 2008 yang baru-baru ini dilakukan, Jerman mendapat peringkat sangat rendah dalam hal partisipasi warga negara dalam interaksi demokratis berbasis pemerintahan elektronik. Kami menempatkannya dalam kategori "Transaksional" dalam Gamb. 2.4.

5) Amerika Utara

Amerika Serikat (AS) dan Kanada di benua Amerika Utara telah memimpin dalam pengembangan infrastruktur pemerintahan elektronik selama beberapa tahun. Baru-baru ini, negara-negara lain khususnya di wilayah Skandinavia meninggalkan AS dan Kanada sedikit dalam peringkat survei pemerintahan

elektronik PBB yang terbaru. Namun, kedua negara tersebut telah mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pemerintahan elektronik secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

a. Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat saat ini termasuk dalam empat besar negara dengan kematangan e-government. Negara ini masih menjadi pemimpin dalam kesiapan jumlah informasi yang tersedia, layanan dan produk yang ditawarkan, serta infrastruktur pendukung seperti telepon, komputer, dan koneksi internet (United Nations Report, 2008). Sekitar 73% dari populasi memiliki akses ke Internet, dan penggunaan e-government cukup tinggi (United Nations Report, 2008). Selain itu, populasi negara ini terbiasa menggunakan internet dan mendukung gagasan peningkatan kenyamanan serta penghematan waktu dan biaya. Terakhir, legislasi lebih mendukung untuk mendorong strategi e-government daripada menghadirkan hambatan yang membatasi.

Amerika Serikat bersama dengan Inggris Raya, Kanada, dan Australia memimpin dalam peringkat pada tahun 2006 (Iyer et al., 2006), dengan mendirikan bentuk web presensi informasi dasar pada pertengahan tahun 1990-an dan mengembangkan apa yang dikenal sebagai e-government pada akhir tahun 1990-an. Pada tahun 2001, negara ini menerbitkan pernyataan visi e-government pertamanya, yang mematuhi tiga prinsip: berpusat pada warga, berorientasi pada hasil, dan berbasis pasar. Namun, negara-negara di wilayah Skandinavia, yaitu Norwegia, Swedia, dan Denmark, saat ini memimpin penggunaan e-government dan termasuk dalam empat besar negara yang memberikan layanan terkoneksi tertinggi kepada warganya. Di Amerika Serikat, tantangan dalam menjadikan e-government sukses hanya mungkin tercapai jika layanan bersifat berpusat pada warga (bukan berpusat pada lembaga seperti yang terjadi pada sebagian besar

infrastruktur e-government AS), dimungkinkan melalui perubahan proses, dan dipasarkan secara efektif kepada pelanggan.

b. Kanada

Inisiatif "Government On-Line (GOL)" Kanada yang dimulai pada tahun 1999 menjadi dikenal di seluruh dunia sebagai "pemerintah yang paling terhubung dengan warganya." Daftar komprehensif dari 130 layanan online berbeda mencakup penyediaan informasi hingga interaksi langsung dan aman secara real-time. Beberapa layanan e-government yang lebih menonjol mencakup formulir online, "akun pemerintah saya," alat dan kalkulator online, partisipasi publik, dan portal kesehatan Kanada. Pendekatan Kanada terhadap pengembangan infrastruktur e-government didasarkan pada prinsip desain strategis mereka yang berfokus pada "pusat klien." Upaya telah dilakukan untuk mengelompokkan layanan e-government secara logis dan memberikan kesan integrasi yang mulus di antara divisi pemerintah. Sebagai contoh, proses "e-pass authentication" menyediakan satu login untuk berbagai area pemerintahan. Meskipun Kanada berhasil mengembangkan infrastruktur e-government yang sangat baik, luasnya wilayah membutuhkan ekspansi terus-menerus dari infrastruktur TIK ke daerah pedesaan untuk mengatasi dampak kesenjangan digital. Kami menempatkan Kanada dalam kategori "Transaksional" pada Gambar. 2.4.

5) Amerika Selatan

Kematangan e-government di Amerika Selatan bervariasi secara signifikan. Di satu sisi, ada negara-negara yang termasuk sedikit di dunia yang telah mengembangkan sistem pemungutan suara yang sepenuhnya terkomputerisasi dan, di sisi lain, beberapa hanya memiliki tingkat kematangan e-government yang "muncul". Kemajuan teknologi di berbagai wilayah dalam satu

negara dapat berbeda secara signifikan, yang memengaruhi kemampuan warga untuk mengakses dan menggunakan layanan tersebut secara bermakna. Mengevaluasi literatur tentang pertumbuhan e-government di Amerika Selatan mengungkapkan bahwa kematangan e-government meningkat secara signifikan meskipun adanya tantangan. Kami telah memilih Argentina dan Brasil untuk melihat lebih dekat pada kematangan e-government mereka dalam 10 tahun terakhir.

a. Argentina

Pengembangan infrastruktur e-government dimulai dengan membawa transparansi ke layanan pemerintah dan kebebasan informasi. Rencana nasional untuk modernisasi negara (2006) yang diadopsi pada tahun 2006 menyerukan pengembangan ICT dan infrastruktur e-government untuk memimpin negara menuju modernisasi. Implementasi tanda tangan digital untuk komunikasi antar pemerintah dan transfer data memberikan dasar untuk peningkatan lebih lanjut dan pengembangan infrastruktur e-government. Situs Web e-government pusat menyediakan tautan interaktif ke beberapa layanan pemerintah di tingkat federal dan negara bagian. Rencana masa depan untuk peningkatan e-government menyerukan lebih banyak layanan dan aplikasi terintegrasi. Meskipun Argentina perlu meningkatkan infrastruktur ICT dasarnya, karena perkembangan baru-baru ini dalam layanan e-government untuk warganya, kami menempatkannya dalam kategori "Interaktif" dalam Gambar. 2.4.

b. Brazil

Perjalanan Brasil menuju adopsi e-governance telah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk struktur pemerintahannya, geografi, dan pendidikan masyarakatnya. Hal ini telah memengaruhi tingkat difusi teknologi yang esensial

untuk pertumbuhan infrastruktur e-government. Meskipun ada keterbatasan teknologi, negara ini telah melakukan implementasi yang signifikan. Brasil mulai bereksperimen dengan pemungutan suara elektronik pada tahun 1996. Saat ini, Brasil mengadakan pemilihan sepenuhnya elektronik. Pengembangan terbaru melibatkan portal web. Beberapa portal pemerintah saling terhubung. Portal Web utama pemerintah <http://www.e.gov.br> menyediakan informasi kontak dan dukungan untuk lebih dari 800 layanan pemerintah yang berbeda. Meskipun Brasil telah membuat kemajuan signifikan dalam kematangan e-government dalam 10 tahun terakhir dan antarmuka e-government bersifat interaktif dan dalam beberapa kasus transaksional, kami menempatkan Brasil dalam kategori "Interaktif" di Gambar. 2.4.

G. Tren Perkembangan E-Government

Siklus hidup e-government menunjukkan posisi relatif negara-negara dalam hal tingkat kematangan mereka. Salah satu tren yang muncul dalam e-government adalah bahwa perbedaan yang lebih besar dalam kematangan secara perlahan menghilang (Accenture, 2004, 2009). Negara-negara yang dulunya tertinggal berhasil mengejar mantan pemimpin industri. Ini terutama berlaku untuk beberapa negara dalam rentang kematangan menengah. Di sini, negara-negara sangat dekat satu sama lain, sehingga diferensiasi yang tepat hampir tidak mungkin, dan perbedaan dalam peringkat sering disebabkan oleh asumsi dasar yang berbeda. Tidak mengherankan bahwa terutama negara-negara dalam fase kematangan rendah atau menengah memiliki peluang lebih baik untuk membuat kemajuan yang lebih signifikan. Alasannya adalah bahwa menjadi lebih sulit bagi negara-negara yang sudah sangat matang untuk secara signifikan bersaing.

Kedua, ketika pemerintah memulai program online pertama mereka, penghematan biaya terserap oleh investasi besar dalam struktur e-government. Sementara beberapa pemerintah masih perlu berinvestasi secara besar-besaran, pemimpin industri sekarang mulai menyadari penghematan biaya yang nyata. Ketiga, faktor terbesar yang mendorong warga untuk lebih banyak menggunakan e-government adalah penghematan waktu dan biaya. Seperti yang sudah disebutkan, banyak layanan hampir tidak dikenal, namun. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan upaya promosi mereka. Beberapa negara sudah melaporkan upaya pemasaran yang terkonsentrasi yang menghasilkan hasil memuaskan. Alat yang digunakan dalam kampanye pemasaran seperti ini termasuk televisi dan radio, iklan di majalah, surat kabar, dan media lainnya. Keempat, beralih dari tahap transaksi ke tahapan integrasi vertikal dan horizontal masih menjadi hambatan utama bagi banyak negara.

Namun, karena tahap-tahap ini menggambarkan penyediaan pendekatan e-government yang benar-benar mulus, negara-negara juga meningkatkan upaya mereka untuk mencapainya. Bagi negara-negara yang sudah sangat maju, "medan perang" selanjutnya bisa menjadi integrasi pada tingkat internasional (Jaeger & Thompson, 2003). Terutama mengingat perkembangan saat ini dalam Uni Eropa, integrasi internasional akan menjadi bidang penelitian masa depan yang menarik. Akhirnya, layanan e-government mulai disesuaikan (Accenture, 2009). Ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya mencoba melayani publik secara keseluruhan dengan cara terbaik, tetapi juga mencoba menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan dan minat khusus. Sementara pengguna mendapatkan manfaat dari informasi yang lebih akurat dan sesuai, serta penghematan waktu, lembaga meningkatkan peringkat kepuasan pelanggan mereka dan memperkuat

lapisan partisipasi pengguna. Selain itu, data pengguna menjadi lebih dapat diandalkan, memungkinkan penargetan layanan masa depan yang lebih baik. Segmentasi menjadi mungkin melalui

1. Tantangan Masa Depan untuk E-government

Konsep pemerintahan elektronik (e-government) yang sepenuhnya terintegrasi mengasumsikan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang sempurna di antara berbagai tingkat dan fungsi pemerintah, dan oleh karena itu masih lebih bersifat konsep teoretis daripada kenyataan. Tantangan masa depan memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap negara. Seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya, bagi negara-negara berkembang, penting untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dasar hingga tingkat di mana warganya memiliki akses ke layanan e-government. Bagi negara-negara maju di mana konektivitas dasar ke internet dan layanan online bukan merupakan pertimbangan utama, tantangan utama adalah penyediaan layanan terintegrasi di mana data warga aman dan interoperabel untuk memungkinkan penyelesaian layanan e-government yang rumit dan canggih.

Seperti halnya sektor lain, sektor publik menghadapi konflik kepentingan, tujuan yang berbeda, batasan fungsional, pemikiran yang egosentris, dll. Masa depan akan menunjukkan negara-negara mana yang kemungkinan besar dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi di antara lembaga-lembaga untuk maju. Ini akan memerlukan sumber daya yang signifikan, pertama untuk menyediakan informasi dan layanan yang berharga yang terus diperbarui dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan kedua untuk terus memberi tahu pelanggan melalui inisiatif pemasaran. Tantangan lainnya adalah mengatasi masalah dan kekhawatiran privasi dan kerahasiaan. Seperti halnya berbelanja

online, warga masih merasa tidak nyaman memberikan data pribadi di web dan khawatir tentang penggunaan dan penyimpanannya. Oleh karena itu, pedoman yang jelas harus ada untuk menangani kekhawatiran tersebut secara internal dan berkomunikasi solusi secara eksternal. Peningkatan teknis seperti penerapan kontrol keamanan, sistem manajemen dokumen yang aman, serta peningkatan transparansi prosedur atau memberikan izin pengauditan independen dapat memecahkan sebagian dari masalah tersebut.

Secara internal, akan sangat penting untuk menjaga kepemimpinan yang berkomitmen dan mengembangkan ukuran evaluasi kinerja. Meskipun e-government membebaskan banyak sumber daya, itu tidak boleh menjadi alasan bagi karyawan untuk menghindari tanggung jawab atau tugas mereka hanya karena mereka tidak melihat atau berbicara secara fisik dengan warga lagi, atau menyalahkan teknologi sebagai alasan untuk semua masalah. Di dalam atau bahkan di antara negara-negara, variasi dalam ketersediaan teknologi dan kemampuan menggunakannya ada. Secara sederhana, tidak semua orang dapat mengakses dari mana saja di dunia. Salah untuk berinvestasi dalam strategi e-government di negara-negara yang memerlukan layanan lain dengan lebih mendesak (Haldenwang, 2004). Selain itu, seseorang yang hanya kekurangan pendidikan atau memiliki kemampuan terbatas tidak dapat dihalangi akses ke layanan pemerintah, dan di negara-negara di mana lebih dari satu bahasa digunakan, cara harus dipertimbangkan agar tidak mengecualikan sebagian dari populasi.

Terakhir, tantangan berbeda dapat terkait dengan berbagai tahap pada siklus hidup. Negara-negara dengan kematangan rendah harus memulai kegiatan yang dapat menjamin dasar untuk transformasi layanan dan menyediakan

rencana jangka panjang. Fokus harus pada layanan dengan permintaan tinggi, bisnis, dan kolaborasi. Negara-negara dengan kematangan sedang harus menargetkan baik warga maupun bisnis dan memastikan bahwa layanan dapat disampaikan dengan sesuai. Hambatan fungsional perlu dihilangkan untuk memungkinkan integrasi. Negara-negara dengan kematangan tinggi harus memikirkan cara inovatif agar tidak kehilangan posisi dan lebih membedakan diri mereka. Strategi yang hemat biaya perlu dicari yang menggantikan strategi lama dan menciptakan situasi saling menguntungkan. Tujuannya adalah mencapai strategi yang dapat mencapai integrasi penuh.

H. Kerangka E-Governance di Tingkat Pemerintahan Lokal

Teori-teori E-Government mendominasi dalam berbagai format dan konsep di seluruh dunia, negara, dan lembaga, namun tidak banyak contoh yang dapat dijadikan teladan dalam pengembangan kerangka komprehensif dari sistem E-Governance di periferi luar tingkatan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai teori yang dibangun di sekitar konsep E-Governance, tetapi fokus utamanya akan diberikan pada penetrasi sistem E-Government di tingkat akar rumput. Untuk lebih mempersempit, studi ini akan melakukan observasi analitis di beberapa ekonomi yang berkembang, sedang berkembang, dan transisi. Selanjutnya, agar lebih ringkas, penelitian ini akan secara khusus fokus pada implementasi E-Government di tingkat akar rumput yang menembus tingkatan pemerintahan terendah untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pengetahuan. Sebelum mencapai kesimpulan, penelitian ini akan mencoba menyajikan agenda penelitian masa depan, termasuk kerangka sistem E-Government di tingkat pemerintahan lokal.

Meskipun populer, bertenaga, dan presisi bentuk pemerintahan elektronik (e-government), tetapi masih belum terjamah oleh banyak negara dalam hal mengimplementasikan e-governance di tingkat terendah dalam sistem tata kelola. Secara teoritis, dikenal sebagai pemerintah lokal di hampir semua negara, dan dalam praktiknya, tingkat terendah dari sistem tata kelola selalu kekurangan insentif yang memadai, sumber daya yang memadai, manajemen yang memuaskan, dan terutama kerangka kerja standar (Das & Chandrashekhar, 2006; Gessi, Ramnarine, & Wilkins, 2007; Malhotra, Chariar, Das, & Ilavarasan, 2007; Zwahr & Finger, 2004).

Pemerintah di seluruh dunia berusaha mencari cara baru untuk memberikan layanan publik dengan lebih efisien dan efektif untuk mencapai masyarakat luas. Penggabungan bentuk pemerintahan elektronik (e-governance) di tingkat pemerintah lokal adalah opsi yang banyak dibahas, meskipun harapannya sering kali bervariasi. Perbedaan itu bersifat alamiah, budaya, praktik, kebiasaan, dan tempat tinggal di antara komunitas, wilayah, negara bagian, dan negara. Misalnya, beberapa orang mengantisipasi penurunan biaya penyampaian layanan, banyak yang mengharapkan penyediaan layanan publik yang adil, dan yang lain mengantisipasi perencanaan yang lebih baik di seluruh batas geografis. Berbagai motivasi sosial dan komitmen politik juga mungkin menjadi alasan perubahan ini (Bovaird, 2003; Das & Chandrashekhar, 2006; Rahman, 2009).

Selain itu, karena tidak tersedianya kerangka e-governance yang diterima (ini mungkin menimbulkan dimensi penelitian lain yang mendalam), beberapa negara dan lembaga implementasi masih berada pada tahap simulasi atau tahap eksperimen, atau tahap kebingungan, bahkan setelah bertahun-tahun operasi e-government yang berhasil di banyak negara. Negara-negara di negara

berkembang dan ekonomi transisi adalah korban utama dari situasi ini, karena sebagian besar waktu mereka hanya mencoba meniru sistem yang sudah mapan di suatu negara atau mencoba memanipulasi sendiri tanpa penelitian yang cukup dalam aspek ini atau mencoba mempopulerkan visi tanpa melihat kompleksitas di dalamnya. Konsekuensinya adalah bahwa tidak hanya pemerintah, tetapi juga pelaku pembangunan kembali mempertimbangkan konsep sistem e-government karena banyak proyek e-governance yang gagal di seluruh dunia. Beberapa lembaga internasional bahkan telah memindahkan fokus area pendanaannya. Mungkin, ini bisa disebabkan oleh faktor terkait desain, persepsi, budaya, ekonomi, transparansi, atau kegagalan sederhana karena kurangnya perhatian yang tepat (Malhotra et al., 2007; Rahman, 2007).

Pemerintah lokal dapat didefinisikan sebagai kota, kabupaten, paroki, township, munisipalitas, borough, ward, dewan, distrik, sub-distrik, atau subdivisi politik umum lainnya dari suatu negara atau wilayah. Dengan kata lain, itu adalah county, munisipalitas, kota, desa, township, otoritas publik lokal, distrik sekolah, distrik khusus, distrik intrastate, dewan pemerintahan, entitas pemerintah regional atau antarnegara bagian, atau agen atau instrumen pemerintah lokal; suku atau organisasi suku yang diotorisasi, desa atau organisasi pribumi; dan komunitas pedesaan, kota atau desa yang tidak tergabung, atau entitas publik lainnya, yang mengajukan permohonan bantuan oleh negara atau subdivisi politik dari suatu negara.

Ini adalah tingkat terendah dari lembaga formal negara, seperti pejabat tingkat distrik atau organisasi pengambilan keputusan dan penyediaan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, yang dibentuk sesuai dengan hukum nasional (seperti dalam pemilihan lokal). Struktur pemerintah lokal

mengambil berbagai bentuk di berbagai negara dan bervariasi dalam tingkat pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat setempat atau kepada pemerintah tingkat atas yang lebih tinggi.

Dalam pengertian administratif, empat tema utama dapat bertindak sebagai kunci untuk menjalankan wewenang pemerintah lokal; seperti kepemimpinan, komunikasi dan koordinasi, manajemen risiko yang langsung, dan kepercayaan, keyakinan, dan transparansi (Anttiroiko, 2004; Calista & Melitski, 2007; Chutimaskul & Chongsuphajaisiddhi, 2004; CTG, 2003). Saat menerapkan pemikiran tentang ICT, seseorang dapat mempertimbangkan sistem e-government lokal terdiri dari sumber daya online yang dirancang untuk membantu akses elektronik ke perantara penyediaan layanan pemerintah; memberikan keterhubungan homogen ke teknologi, kebijakan, dan manajemen organisasi; mempromosikan integrasi antar-organisasi di tingkat lokal ke pengembangan sistem informasi, manajemen, dan kemitraan institusional; menampung subsidi, hibah, dan fasilitas lainnya untuk memberdayakan komunitas lokal dengan otonomi yang lebih besar; memberikan konten yang efisien, berorientasi pada warga, dan hemat biaya untuk mempercepat partisipasi dan layanan e-partnership; mengintegrasikan komunitas, masyarakat, dan daerah ke inisiatif e-government lokal, nasional, regional, dan global; menyusun rencana strategis untuk mendukung penyampaian layanan pemerintah yang efisien; mengidentifikasi tingkat kesiapan organisasi pada konteks lokal untuk mempersiapkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan; dan menuju tujuan akhir transformasi untuk menawarkan layanan warga yang lebih baik di akar rumput (Austin City Council, 2008; CTG, 2002, 2003; Hoogwout, 2003; Kolsaker, 2005; Perotti & von Thadden, 2006; Rahman, 2008).

Negara-negara sering mempertimbangkan penggabungan pemerintah lokal sebagai cara untuk menurunkan biaya penyediaan layanan, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan keadilan, atau meningkatkan partisipasi dalam sistem pemerintah (Fox & Gurley, 2006). Tetapi, konsep e-government adalah membuat mereka lebih independen, memberikan lebih banyak otonomi, memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk bertindak, dan meresmikan kerangka institusional mereka dengan menegakkan semua manfaat pemerintah lokal melalui perwakilan terpilih (Pemerintah Pakistan, 2005; Kim, 2002; Rainford, 2006). Namun, penelitian ini merasa bahwa untuk merancang sistem e-governance yang tepat, ini bisa menjadi isu tambahan yang perlu dijelaskan, dihadiri, dan diselesaikan dengan otorisasi, eksperimen, dan validasi yang tepat. Lingkup bab ini akan menahan penjelasan tentang isu-isu yang sama dan justifikasinya. Ini akan menuntut penelitian yang lebih lanjut tentang isu-isu ini dan kekhawatiran lain yang mungkin muncul selama penyelidikan. Studi ini akan menekankan pada melakukan sintesis konsep e-government inti yang tampaknya layak dan berkelanjutan di negara-negara, dan selanjutnya, itu juga mensintesis berbagai kerangka e-governance di beberapa negara dengan fokus pada strategi e-government yang konsisten.

Meskipun pengiriman layanan elektronik tetap menjadi fokus utama kebijakan e-government di semua tingkatan, kontak komunitas yang lebih besar biasanya dianggap lebih praktis dan diinginkan pada tingkat lokal. Dalam beberapa waktu terakhir, fokus lebih besar diberikan pada e-government lokal di mana sejumlah besar interaksi "warga negara ke pemerintah" atau sebaliknya terjadi. Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah lokal saat ini berada di bawah pengaruh untuk menyediakan informasi dan layanan e-government yang efisien

dan efektif sebagai hasil dari peningkatan akuntabilitas dan manajemen kinerja (Shackleton, Fisher, & Dawson, 2004). Tujuannya adalah meningkatkan permintaan dan pilihan konsumen, meningkatkan persaingan lokal, mengurangi biaya pengiriman layanan di tingkat lokal, dan meningkatkan fungsi sistem pemerintah. Selain itu, pada tingkat lokal, otoritas, aktivitas, dan fungsi pemerintah lokal sangat penting.

Suatu studi perbandingan tentang strategi e-government dari enam negara diberikan dalam Tabel 2.1. Dari Tabel 2.1, seseorang dapat berspekulasi tentang munculnya e-governance di negara-negara tersebut. Negara-negara ini dipilih secara acak di antara negara-negara Asia, yang menjadi berkelanjutan dalam hal kesiapan digital dan/atau merancang e-government dalam sistem pemerintahan mereka atau mencoba bersaing di arena global. Namun, untuk referensi, kriteria preferensi mereka telah dijelaskan selanjutnya.

Bangladesh, salah satu negara terpadat di dunia, saat ini telah mengambil inisiatif "Digital Bangladesh" pada tahun 2009, meskipun infrastruktur informasi yang rapuh dan keahlian e-government yang belum matang; India - di mana pemerintah telah memulai Rencana Strategis Pemerintah Elektronik yang memberikan peta jalan untuk Pemerintah Elektronik selama 2003-2007, sementara Korea Selatan (negara maju di Asia) - menempatkan beberapa visi strategis dan terstruktur dalam strategi mereka pada waktu dan upaya yang tepat (lihat Gambar 2.1 yang menunjukkan strategi reengineering proses bisnis siklus tertutup, katalisator penting untuk pengembangan mandiri); Singapura - pemimpin dalam implementasi e-government dan secara berurutan meningkatkan platform e-governance mereka dalam beberapa tahun terakhir; Pakistan telah memasukkan langkah-langkah strategis dasar dalam kerangka e-government

mereka, sebagai urutan pemula pada tahun 2005, meskipun aktivitas terkait TIK telah dimulai di sana sejak dulu; dan Sri Lanka - pelopor dari banyak tahun di Asia - telah mencakup beberapa usaha pragmatis (lihat juga Gambar 2.2 yang menyediakan strategi e-government komprehensif berfokus pada perdamaian, keadilan, interaksi manusia, dan pengembangan) adalah negara-negara yang menarik dalam penelitian ini (Chauhan, 2009; Pemerintah Bangladesh, 2002; Pemerintah India, 2000; Pemerintah Pakistan, 2005; Kim, 2002; Lallana, 2004, 2005; Rainford, 2006).

Namun, hipotesisnya adalah bahwa konsep e-government yang berhasil harus bergantung pada institusionalisasi yang kaku, hukum dan peraturan yang liberal, teknologi yang dapat diadopsi, dan promosi nilai bisnis, sering disebut sebagai empat pilar e-government. Kesimpulan akan mencoba memvalidasi mereka dengan beberapa temuan lain.

Konsep dan strategi e-government ini (seperti yang digambarkan dalam Tabel 2.1, Gambar 2.1, dan Gambar 2.2) mengarah pada pengembangan kerangka e-governance yang konkret di suatu negara yang mencakup; pengembangan infrastruktur institusional, pembentukan infrastruktur informasi yang memadai, pembentukan infrastruktur hukum dan regulasi yang liberal, dan penciptaan nilai bisnis dari layanan ini. Namun, penelitian ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, berfokus pada kerangka e-governance di tingkat pemerintah lokal dan, dengan demikian, ingin menarik sintesis pembelajaran pola dari infrastruktur pemerintah lokal di beberapa negara. Ada kritik terhadap penelitian khusus ini yang mencakup negara maju dan berkembang ke dalam dimensi tunggal. Ini adalah untuk membandingkan konsep, strategi, dan kerangka kerja negara-negara tersebut, sehingga pembaca dan peneliti lain dapat melihat

perbandingan, dan pada saat yang sama dapat melihat kerumitan di antara pola-pola ini. Negara-negara studi sedang disorot di sini dengan fokus pada struktur pemerintah mereka dan strategi mereka dalam mempromosikan e-governance.

1) Bangladesh

Pemerintah lokal desa/regional, seperti yang diusulkan oleh komisi terbaru tentang pemerintah lokal pada tahun 1997, memiliki empat tingkat: Gram (Desa) Parishads (yang diubah kembali pada tahun 2003 sebagai Sarkers, dan kemudian diubah lagi) (40.392); Union Parishads (4451); Thana/Upazila Parishads (469); dan Zila (Distrik) Parishads (64). Daerah perkotaan memiliki seperangkat pemerintah lokal yang terpisah. Komisi Sensus Bangladesh mengakui 522 daerah perkotaan pada tahun 1991 (dengan populasi minimum sekitar 5.000 atau lebih), tetapi hanya sekitar 269 dari daerah perkotaan yang lebih besar di antara ini yang memiliki pemerintah lokal perkotaan. Enam kota terbesar memiliki status Korporasi Kota, sementara sisanya dikenal sebagai Pourashavas atau Munisipalitas, yang lagi-lagi diklasifikasikan menurut kekuatan keuangan. Catatan: Ada empat tingkat struktur pemerintah yang ada di negara ini.

Dewan Komputer Bangladesh (BCC), didirikan berdasarkan Undang-Undang No. IX tahun 1990 sebagai lembaga otonom untuk mendorong dan memberikan dukungan untuk kegiatan terkait TIK di Bangladesh.⁷ Di Bangladesh, fokus pengembangan kapasitas melalui TIK adalah pada pembangunan sosial-ekonomi. Penyediaan infrastruktur nasional di bawah kebijakan TIK nasional, yang dipimpin oleh kelompok tugas TIK nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dirancang untuk memfasilitasi tata kelola yang baik, e-commerce, dan e-learning. Fokus pengembangan sumber daya manusia kebijakan TIK nasional adalah mengembangkan profesional dan insinyur TIK untuk memenuhi permintaan

pekerja TIK yang terampil yang terus tumbuh di seluruh dunia, terutama untuk pasar layanan perangkat lunak global dan TIK (Sayo, Chacko, & Pradhan, 2004).

Kebijakan TIK Nasional diadopsi pada Oktober 2002 (Kebijakan TIK Nasional yang diusulkan telah dikirimkan kepada pemerintah pada September 2008). Kebijakan ini bertujuan untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang didorong oleh TIK pada tahun 2010 (target awal adalah tahun

2006). Diantara 15 area prioritas:8 pertanian dan pengentasan kemiskinan, perawatan kesehatan, e-government/e-governance, e-commerce, infrastruktur TIK, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kerjasama regional ditemukan untuk mendorong inisiatif pemerintah lokal untuk berkembang. Selain itu, Undang-Undang TIK 2006 telah diundangkan pada 8 Oktober 2006; dan formulasi peraturan masih berlangsung.

Baru-baru ini, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk merumuskan Peta Jalan TIK nasional untuk Bangladesh dalam Kerangka Program Manajemen Ekonomi dan Bantuan Teknis (EMTAP), yang dikelola oleh Dewan Komputer Bangladesh dengan bantuan dari Bank Dunia. Selain itu, pendekatan terbaru terhadap e-governance bisa menjadi adopsi konsep Digital Bangladesh oleh pemerintah saat ini pada tahun 2009.

2) India

Ada 28 negara bagian dan 7 wilayah persatuan di negara ini. 9 Wilayah Persatuan dikelola oleh Presiden melalui seorang Administrator. Setiap negara bagian dibagi menjadi beberapa distrik administratif. Kepala birokratis dari suatu distrik disebut sebagai Collector Distrik, sementara kepala politiknya adalah Presiden Zilla Parishad (atau Dewan Distrik), yang merupakan badan perwakilan terpilih, termasuk MLA lokal. Jabatan baru yang dibuat adalah Chief Executive

Officer (CEO) Zilla Parishad (ZP), diisi oleh birokrat karier. Sebuah Distrik dibagi menjadi beberapa Blok Pengembangan Masyarakat, masing-masing dipimpin oleh Petugas Pengembangan Blok (BDO). Setiap Blok, pada gilirannya, biasanya dibagi menjadi beberapa Tehsil, dipimpin oleh Tehsildar. Mungkin jelas bahwa struktur politik dan administratif sangat terkait erat di tingkat distrik dan sub-distrik. Misalnya, CEO Zilla Parishad adalah seorang birokrat, meskipun Zilla Parishad itu sendiri terdiri dari wakil terpilih, termasuk perwakilan dari Mandal (Praja) Parishads dari berbagai mandal di dalam distrik tersebut. Mandal Parishad atau Dewan terdiri dari kepala Panchayat Samitis, dan beberapa orang sumber daya yang terpilih. Setiap Panchayat Samiti, pada gilirannya, memiliki wakil dari berbagai Gram Panchayats (Dewan Desa), yang merupakan tingkat dasar pemerintah lokal¹⁰ (James, 2004). Catatan: Ada lima tingkat dalam sistem pemerintahan; namun, ada saluran administratif yang berbeda.

Di India, Departemen Elektronika (DoE) didirikan pada tahun 1971 untuk merekomendasikan dan melaksanakan kebijakan sektor TI negara tersebut. National Taskforce on Information Technology and Software Development didirikan oleh Perdana Menteri India pada 28 Mei 1998 untuk merumuskan Kebijakan TI Nasional jangka panjang bagi negara tersebut dan untuk menghilangkan hambatan pertumbuhan industri TI. Tujuan utamanya adalah membantu India menjadi kekuatan super software TI.

Pada tahun 1999, Kebijakan Telekomunikasi Nasional India diundangkan untuk menyediakan sistem komunikasi yang terjangkau dan efektif bagi warga; mencapai keseimbangan antara penyediaan layanan universal untuk semua daerah yang belum tercover dan layanan tingkat tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi negara; dan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang

modern dan efisien dengan memperhitungkan konvergensi TI, media, telekomunikasi, dan elektronika konsumen serta mendorong India menjadi kekuatan super TI. Kemudian pada tahun 2000, Undang-Undang TI diadopsi dengan fokus pada pengakuan hukum kontrak elektronik dan tanda tangan digital; menciptakan pengendali untuk mengesahkan otoritas dan pengadilan banding siber (Pertrazzini & Harindranath, 1997; Lallana, 2004). Catatan: Untuk menerapkan e-governance di tingkat grass roots, visi menyeluruh dan rencana tindakan jangka panjang diperlukan.

3) Republik Korea Selatan

Pemerintah lokal di Korea terdiri dari 248 unit terpisah. Sistem politik lokal Korea secara luas dibagi menjadi dua kategori: umum dan khusus. Dalam Pasal 117 Ayat 2 Konstitusi, diatur bahwa jenis pemerintah lokal di Korea seharusnya ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini, Undang-Undang Otonomi Lokal mengakui pemerintah lokal umum terdiri dari dua tingkat: pemerintah lokal tingkat atas (yaitu, kota metropolitan dan provinsi) dan pemerintah lokal tingkat bawah (yaitu, kota, kabupaten, dan distrik). Ada dua tingkat pemerintah lokal, pemerintah lokal tingkat atas (provinsi) dan pemerintah lokal tingkat bawah (kota). Catatan: Ada tiga tingkat dalam sistem pemerintahan. Proyek nasional komputerisasi pertama Korea dimulai pada tahun 1987. Pemerintah Korea Selatan mengadopsi Rencana Induk Pertama untuk Promosi Informatisasi pada bulan Juni 1996, menyusul pengundangan Undang-Undang Kerangka untuk Promosi Informatisasi pada bulan Agustus 1995.

Untuk mendorong tujuan rencana informatisasi pertama, pemerintah juga mendirikan organisasi nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian, pada Maret 1999, pemerintah merumuskan rencana induk informatisasi kedua

yang disebut "Cyber Korea 21," dan untuk mengatasi krisis ekonomi Asia dan mentransformasi ekonomi Korea menjadi berbasis pengetahuan, Cyber Korea 21 memberikan gambaran masyarakat informasi baru abad ke-21. Rencana induk informatisasi ketiga Korea, "e-Korea Vision 2006," mencerminkan keyakinan bahwa promosi informatisasi dalam semua aspek masyarakat akan menghasilkan peningkatan efektivitas semua kegiatan sosial-ekonomi, kinerja nasional yang lebih tinggi, dan peningkatan kualitas hidup.¹² Tujuan utama e-Korea Vision 2006 adalah: memaksimalkan kemampuan warga untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat informasi dengan memanfaatkan ICT; memperkuat daya saing global ekonomi dengan mempromosikan informatisasi di semua industri; mewujudkan struktur pemerintahan yang cerdas dengan transparansi dan produktivitas tinggi melalui upaya informatisasi; memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan industri TI dan memajukan infrastruktur informasi; dan menjadi pemimpin dalam masyarakat informasi global dengan berperan besar dalam kerjasama internasional (Lallana, 2004). Catatan: Informatisasi, struktur pemerintahan cerdas, peningkatan transparansi, promosi kemitraan, dan pengembangan infrastruktur informasi adalah unsur-unsur penguatan e-governance lokal.

4) Pakistan

Pemerintah lokal di Pakistan ada di bawah pengawasan berbagai pemerintah provinsi, di mana pemerintah provinsi telah sederhana mendelegasikan beberapa fungsi dan tanggung jawab mereka kepada pemerintah lokal dengan mengeluarkan peraturan. Ini adalah model pemerintah lokal yang baru yang dipelopori untuk memastikan partisipasi langsung rakyat dalam mengelola urusan mereka sendiri melalui badan perwakilan yang dibentuk hingga

tingkat desa. Ada dua undang-undang terpisah untuk daerah pedesaan (yaitu, Basic Democracy Ordinance 1959) dan Dewan Urban (yaitu, Municipal Administration Ordinance 1960). Ini menetapkan sistem hierarki empat tingkat dewan lokal di seluruh negara, yaitu, Dewan Persatuan (untuk daerah pedesaan), Komite Kota (untuk daerah perkotaan), Dewan Tehsil, dan/atau Dewan Distrik dan Dewan Divisi. Dewan Tehsil adalah tingkat kedua di atas Dewan Persatuan. Ini terutama berkaitan dengan kegiatan pengembangan di daerah yang diumumkan.

Pakistan Telecommunications (Re-organization) Act disahkan pada tahun 1996, dan Pakistan IT Commission didirikan pada tahun 2000. Sebelas kelompok kerja dibentuk di bawah naungan IT Policy 2000 dengan penekanan pada e-government (Pemerintah Pakistan, 2000).¹⁴ Program E-government diluncurkan pada tahun 2001 dengan tiga tujuan: mendorong ICT untuk memungkinkan penyampaian informasi dan layanan kepada warga dengan cara yang efisien biaya; untuk memulai langkah-langkah untuk merekayasa ulang alur kerja di departemen pemerintah yang memungkinkan penyampaian layanan elektronik kepada warga untuk membawa efisiensi dalam operasi; dan untuk membawa transparansi dalam fungsi pemerintah dan akses informasi. Pengeluaran Electronic Transactions Ordinance pada tahun 2002 adalah tonggak lain untuk mempromosikan kegiatan ekonomi di tingkat grass roots yang memperkuat pemerintah lokal. Selanjutnya, Kebijakan Deregulasi Telekomunikasi disetujui pada tahun 2003. Catatan: Inklusi kegiatan ekonomi adalah komponen penting dari pemerintah elektronik.

5) Singapura

Singapura didirikan sebagai koloni perdagangan Inggris pada tahun 1819. Ini bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963 tetapi berpisah 2 tahun

kemudian dan menjadi independen. Singapura adalah negara kota dengan struktur pemerintahan yang mengikuti sistem pemerintahan parlementer Inggris. Pada tahun 1989, kekuasaan legislatif diinvestasikan dalam Parlemen satu kamar dengan 81 anggota yang terpilih untuk masa jabatan 5 tahun. Negara ini hanya memiliki satu tingkat pemerintahan - pemerintah nasional dan pemerintah lokal adalah satu kesatuan. Di bawah tingkat nasional, satu-satunya pembagian wilayah yang diakui adalah 55 konstituensi parlemen.

Anggota Parlemen dengan demikian melakukan beberapa fungsi yang sama seperti alderman munisipal di kota-kota asing dan seringkali memenangkan dukungan politik dengan membantu mencari pekerjaan bagi konstituennya atau melakukan favorn lain yang memerlukan intervensi dengan birokrasi sipil yang berkuasa. Konstituensi satu anggota bervariasi dalam populasi dari 11.000 pemilih hingga sebanyak 55.000; sebagian variasi tersebut mencerminkan perpindahan penduduk dari inti perkotaan lama dan keluar ke pengembangan perumahan baru (Pemerintah Singapura, 1989). Catatan: Area kecil, populasi yang sederhana, rencana IT berturut-turut, dan terutama menggabungkan aturan pemerintah dengan regulasi diri industri adalah pendorong utama kemajuan e-governance di Singapura, meskipun memiliki struktur pemerintah satu tingkat saja.

Pada tahun 1980-an, Dewan Komputer Nasional Singapura (NCB) adalah badan utama untuk mempromosikan komputerisasi dan pengembangan industri IT di negara pulau itu. Rencana induk IT pertama Singapura adalah Rencana Nasional Komputerisasi, yang dilaksanakan antara tahun 1980 dan 1985. Rencana ini memvisualisasikan komputerisasi layanan publik. Ini diikuti oleh Rencana IT Nasional (NITP), yang dilaksanakan antara tahun 1986 dan 1991. NITP bertujuan untuk memperluas sistem pemerintah (seperti TradeNet dan

LawNet) ke sektor swasta. NITP digantikan oleh Rencana Induk IT ketiga, IT2000 (1992-1999), yang memvisualisasikan Singapura menjadi "salah satu negara pertama di dunia dengan infrastruktur informasi nasional yang maju." Infrastruktur informasi nasional maju ini akan digunakan sebagai dasar untuk lima pendorong strategis.

Singapura unik dalam menggabungkan aturan pemerintah dengan regulasi diri industri dalam mengelola konten. Electronic Transactions Act (ETA) (disahkan pada tahun 1998), Connected Singapore, Infocomm (rencana master ICT baru yang diumumkan pada tahun 2000) adalah beberapa di antaranya.¹⁸ Selain itu, peluncuran Civil Service Computerization Programme (1980-1999), E-government Action Plan (2000-2003), dan E-government Action Plan II (2003-2006) adalah untuk meluncurkan banyak layanan publik kepada warga negara. Membangun pada pencapaian rencana e-government sebelumnya, iGov2010, rencana master 5 tahun baru (2006-2010) diluncurkan pada Mei 2006, bertujuan membuat Pemerintah Singapura menjadi Pemerintah Terintegrasi (Beardsley, von Morgenstern, Enriquez, & Verbeke, 2004; Tan, 2006; Wong, 1996).

6) Sri Lanka

Struktur organisasi pemerintahan lokal terdiri dari tiga instrumen hukum: Peraturan Dewan Kota, Peraturan Dewan Perkotaan, dan Undang-Undang Pradeshiya Sabhas. Saat ini ada 18 Dewan Kota, 37 Dewan Perkotaan, dan 256 Pradeshiya Sabhas. Pemerintah lokal biasanya dibagi menjadi ward. Ward telah dihentikan dalam sistem proporsional baru. Komposisi dewan lokal didasarkan pada total populasi suatu wilayah otoritas lokal dan bukan berdasarkan ward. Catatan: Populasi adalah indikator wilayah otoritas lokal, bukan batas geografis. Pemerintah Sri Lanka pertama kali menyadari kebutuhan pengembangan ICT

melalui Kebijakan Komputer Nasional tahun 1983 (COMPOL), dan ini adalah upaya pertama dari pemerintah yang diambil oleh Otoritas Sumber Daya Alam, Energi, dan Sains Sri Lanka (NARESA) atas instruksi Presiden saat itu. Sebuah komite yang ditunjuk oleh NARESA menghasilkan Laporan Kebijakan Komputer Nasional.

Penerimaan laporan COMPOL oleh Pemerintah menyebabkan pembentukan CINTEC melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1984 sebagai "Dewan Teknologi Informasi dan Komputer Sri Lanka" untuk berfungsi langsung di bawah Presiden saat itu. Kemudian, Undang-Undang Pembangunan Sains dan Teknologi No. 11 tahun 1994 mengubah nama menjadi "Dewan Teknologi Informasi" tetapi tetap mempertahankan akronim CINTEC. Proyek "e-Sri Lanka" yang diluncurkan pada November 2002 ditugaskan untuk mengembangkan Rencana Jalan ICT untuk Sri Lanka. Rencana jalan e-Sri Lanka menghasilkan implementasi Undang-Undang ICT No. 27 tahun 2003, yang menghasilkan pendirian Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sri Lanka (ICTA), mencabut bagian yang relevan dari Undang-Undang Sains dan Teknologi yang menetapkan CINTEC. ICTA telah beroperasi sejak 1 Juli 2003. Mandat kebijakan e-Sri Lanka adalah membangun infrastruktur informasi nasional, menciptakan kerangka untuk promosi perangkat lunak dan industri yang didukung ICT, merekayasa ulang Pemerintah, dan mengembangkan sumber daya manusia berbasis ICT.²⁰ Catatan: Pengembangan infrastruktur informasi, rekayasa ulang pemerintah, dan pengembangan sumber daya manusia adalah bahan dasar pengembangan pemerintahan lokal elektronik.

Untuk mengambil kesimpulan atau memberikan sejumlah rekomendasi, penelitian ini ingin melanjutkan dengan pengamatan yang relevan sehubungan

dengan pengembangan kerangka e-pemerintahan. Namun, fokus utamanya adalah untuk mempromosikan pemerintahan di tingkat dasar (e-pemerintahan di tingkat pemerintahan lokal)

3. Pengamatan Terkait Infrastruktur Fisik

Untuk mencapai kemampuan maksimal dari alat TIK dalam praktik e-pemerintahan, perlu untuk menyesuaikan struktur dan penggunaan organisasi mereka yang mengarah pada: konteks hukum dan sosial-ekonomi aktual di mana proses perencanaan pengembangan strategis akan dilaksanakan; tuntutan pragmatis bahwa pengelolaan pembangunan lokal harus dipenuhi; melibatkan semua peserta dalam proses pengelolaan lokal; dan memperkuat kapasitas dan prosedur institusional (Lalovic, Djukanovic, & Zivkovic, 2004).

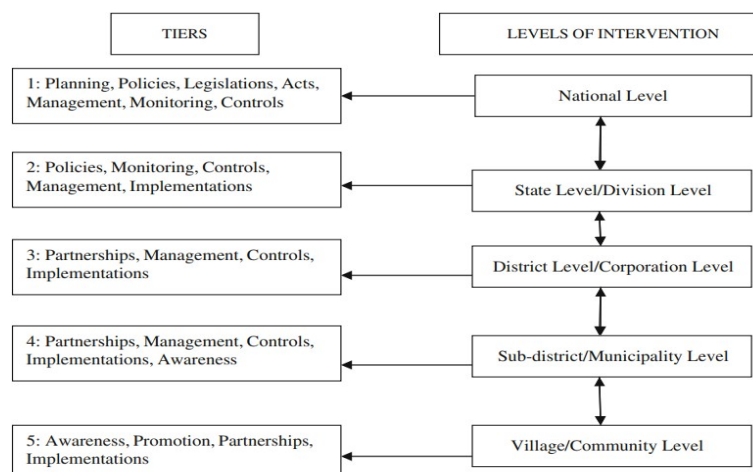
Namun, telah diamati bahwa hanya sedikit persentase pemerintahan lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk manajemen e-pemerintahan yang efektif, termasuk: kepemimpinan, perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan promosi pasar. Untuk mencapai keberhasilan, tujuan e-pemerintahan lokal memerlukan kepemimpinan yang kuat yang menjadi pendukung e-pemerintahan dan bekerja untuk meningkatkan penerimaan di kalangan pemangku kepentingan. Selain memiliki strategi lokal, organisasi-individu juga harus menyertakan pendekatan e-pemerintahan lokal dalam rencana strategis mereka untuk memastikan setiap karyawan terus mencari cara untuk meningkatkan proses dan pengiriman layanan. Ukuran kinerja reguler juga penting untuk mengevaluasi apakah sistem e-pemerintahan tertentu (segmen dari sistem) itu efisien secara biaya, melayani pelanggan dengan baik, dan digunakan secara efektif (Dewan Kota Austin, 2008).

Dengan tujuan memiliki sistem informasi yang berfungsi penuh, prasyarat teknis dasar berikut juga harus dipenuhi: pembentukan jaringan lokal yang menghubungkan semua komputer dalam administrasi lokal, atau setidaknya satu komputer di setiap organisasi atau kantor harus berada dalam jaringan; mengonfigurasi server pusat untuk menyimpan konten, informasi, dan perangkat lunak pendukung secara lokal; dan koneksi Internet yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan jaringan pemerintahan lokal dan kapasitas keuangannya. Pemerintah pusat mungkin dapat memberikan subsidi untuk seluruh operasi untuk sementara waktu sampai sistem e-pemerintahan lokal menjadi mandiri. Jika sistem dibangun di sekitar aspek inti dari sistem penghidupan, melibatkan masyarakat pada umumnya memiliki peluang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Namun, untuk menerapkan sistem informasi pragmatis di tingkat pemerintahan lokal, infrastruktur informasi berikut dapat dianggap sebagai prasyarat: setidaknya satu komputer di setiap departemen atau kantor (PIII atau PIV atau bahkan klon); satu komputer berkinerja tinggi (mungkin Pentium V) berfungsi sebagai server; personel dengan pengetahuan dasar tentang komputer dan Internet; sistem operasi yang ramah pengguna (mungkin sumber terbuka), dan manual operasional dasar; setidaknya sebuah tim ahli (lebih baik lokal, jika tidak kunjungan periodik dari pusat) untuk melakukan analisis sistem dasar, menginstal model, dan melatih pejabat (melatih pelatih, bukan melatih seluruh komunitas). (Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dengan SDNP Bangladesh, SDNF Bangladesh, dan kemudian SchoolNet Foundation Bangladesh, dua paragraf terakhir adalah rekomendasi penulis sendiri).

Selanjutnya, tergantung pada struktur pemerintahan, telah diamati bahwa tingkatan sistem pemerintahan dapat berkisar dari tiga tingkat hingga empat tingkat. Untuk kepentingan tata kelola yang lebih baik, sistem berlima tingkat dapat dicari, seperti yang digambarkan dalam Gambar. 2.3.

Untuk mencapai tingkat dasar, nasional→ regional/state/division→ district/city corporation→sub-district/municipality→village/community akan menjadi jalur yang menyeluruh, efektif, dan dinamis. Sepanjang jalur ini untuk mencapai tingkat dasar, tingkatan meskipun mungkin tidak otonom secara alamiah, tetapi dapat membentuk rantai komando atau jalur aliran informasi secara retrospektif di tingkat nasional, regional, dan lokal. Sistem dukungan ini dapat mengikuti pendekatan top-bottom atau bottom-top, tetapi peneliti e-pemerintahan menunjukkan bahwa pendekatan bottom-top lebih baik dalam hal tata kelola dasar. Biasanya, sistem tata kelola dari bawah ke atas memiliki peluang untuk tumbuh secara organik sepanjang umurnya. Gambar 2.3 menunjukkan sifat dukungan di setiap tingkatan dengan jalur komunikasi vertikal tambahan.



Gambar 2. 5 Tingkatan Sistem Pemerintahan Korea Selatan

Korea Selatan telah berhasil menjaga peringkat kesiapan e-government mereka di lima besar selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah mengadopsi kerangka empat dimensi yang berfokus pada strategi demand dan supply. Dalam sistem ini, tergantung pada pasokan dan permintaan, infrastruktur yang diperlukan telah dikembangkan dan manajemen perubahan telah dilakukan (Gambar 2.4).

India, sebuah negara di Asia Selatan, secara berturut-turut mempromosikan e-government selama bertahun-tahun dan berhasil mempercepat perkembangan melalui pemanfaatan ICT mengikuti kerangka e-government yang sudah mapan (Gambar 2.5). Negara ini telah mengembangkan kerangka e-government tiga tingkat yang terdiri dari back-end (basis data berbagai lembaga pemerintah, penyedia layanan, pemerintah negara bagian, dll.), middleware (infrastruktur informasi, portal warga, gateway, layanan terpadu, dll.) dan saluran pengiriman front-end (PC rumah, ponsel, kios, pusat layanan warga terpadu, dll.) untuk warga dan pengusaha (Das & Chandrashekhar, 2006).

Singapura menempati peringkat ke-23 dari 192 negara dalam studi Indeks Kesiapan E-Government PBB pada tahun 2008 dan menempati peringkat pertama di antara 34 negara yang disurvei dalam Peringkat E-Government Internasional Universitas Waseda tahun 2009 (PBB, 2008; Waseda, 2009). Kesuksesan Singapura sebagai penyebar layanan e-government yang efektif tidak hanya melibatkan layanan pemerintah dengan teknologi, tetapi juga melibatkan upaya besar untuk mereformasi pelayanan publik, yang mencakup perubahan struktural dan operasional yang signifikan. Selama 20 tahun terakhir, program ICT nasional yang progresif dan dirancang dengan matang oleh pemerintah telah membentuk dasar yang kuat untuk mentransformasi pelayanan publik. Namun, kerangka e-government yang holistik seharusnya tidak hanya menangani teknologi, tetapi juga

manajemen, proses, tata pemerintahan, masalah sosial, dan budaya untuk memberikan layanan e yang dapat diakses, terintegrasi, dan bernilai tambah kepada pemangku kepentingan (James, 2004; Sin, 2007).

Demand-Driven (In consultation with citizens and entrepreneurs)	Supply-Driven (Requisite Government services made on-line) Front-Office
Change Management Process (Commitment and drivers of changes)	Adequate Infrastructure (Enabling publicly available infrastructure) Back-Office

Gambar 2. 6 Kerangka E-Government Korea Selatan (Diadopsi dari Kim, 2002)

Studi ini menyimpulkan bahwa dengan menggabungkan kebijakan yang sesuai, mempromosikan lingkungan TIK yang mendukung, dan mengadopsi struktur pemerintahan yang diberdayakan pada tingkat pemerintahan daerah, e-government dapat dipromosikan secara luas. Pada akhirnya, sistem e-government lokal yang seimbang akan mendorong peningkatan layanan e-menuju e-demokrasi suatu bangsa (dengan pencapaian yang sempurna dalam hal logis, fisik, dan keuangan), seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.6.

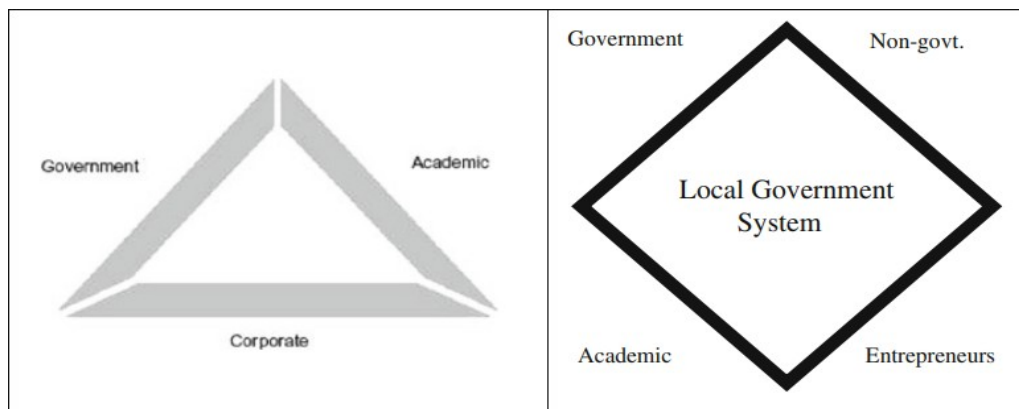
Balanced and value-driven e - government Combination of electronic and participatory service delivery	
<i>E-Administration</i> Transaction of user-oriented and value-driven services offered by local government that is based on ICTs	<i>E - Democracy</i> Digitally conveyed information (transparent) and the political influence (participatory) exerted by citizens and business on the opinion-forming processes of public-state and non-state institutions

Gambar 2. 7 Konsep E-Government Lokal (Diadopsi dari Open Society Institute, 2007)

4. Kerangka dan Rekomendasi E-governance di Masa Depan

Pendekatan Tiga Aspek dalam Menyederhanakan E-Government Lokal di Akar Rumput. Sebuah pendekatan tiga aspek dapat menyederhanakan delegasi e-government lokal di tingkat akar rumput, seperti yang tercermin antara kebijakan akses (bertujuan untuk meningkatkan akses ke TIK bagi semua warga), kebijakan konten (ditujukan untuk meningkatkan penggunaan TIK dalam administrasi kota dan domain semi-publik), dan kebijakan infrastruktur (untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur broadband) (Berg, Meer, Winden, & Woets, 2006). Dalam hal ini, perlu melibatkan pihak-pihak yang aktif terlibat dalam proses pemerintahan di tingkat akar rumput. Selanjutnya, untuk memperkuat manajemen e-government lokal di tingkat akar rumput, pendekatan tiga dimensi, seperti yang disarankan oleh Dewan Kota Austin (2008), dapat mengadopsi pendekatan empat dimensi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.7. Telah diamati bahwa lembaga non-pemerintah atau masyarakat sipil menjadi salah satu penggerak penting dalam keterlibatan kebijakan kepada masyarakat di banyak negara.

Implementasi yang lebih baik dari e-government lokal atau e-governance lokal berarti memanfaatkan kekuatan TIK untuk membantu mengubah aksesibilitas, kualitas, dan efektivitas biaya layanan publik serta membantu menghidupkan kembali hubungan antara pelanggan dan warga serta lembaga publik yang bekerja untuk keuntungan mereka. Perencanaan e-governance dan penggunaan TIK yang tepat di tingkat lokal dapat meningkatkan dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya dalam memberdayakan pejabat dan perwakilan munisipal melalui jaringan dan koneksi yang efisien, transparan, responsif, dan bertanggung jawab.



Gambar 2. 8 Kemitraan yang Meningkat di Tingkat Lokal dengan Melibatkan Semua Pihak Terkait (Diadopsi dari CTG, 2002; Penulis)

Menurut penelitian Eropa (Open Society Institute, 2007), pemerintah daerah di negara-negara maju menawarkan hingga 77% layanan publik berbasis elektronik. Seringkali portal pemerintah daerah menjadi langkah pertama untuk mencapai layanan pemerintah pusat. Implementasi layanan berbasis elektronik dan strategi broadband adalah cara lain untuk mengatasi masalah kelompok sosial yang berbeda dan daerah terpencil. Namun, infrastruktur TI yang baik dengan penawaran intensif layanan berbasis elektronik oleh pemerintah daerah akan tetap menjadi tantangan untuk melibatkan kelompok warga aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mendukung pengembangan serta implementasi e-demokrasi yang tepat di wilayah tersebut (Turner, 2004). Selain itu, perkembangan masyarakat informasi di tingkat akar rumput dalam banyak hal masih menjadi masalah internal pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warga. Selain itu, setelah desentralisasi struktur pemerintah daerah, pemerintah kota akan dapat menawarkan berbagai layanan baru yang lebih luas kepada warganya. Namun, ini dapat menjadi tantangan besar bagi pemula untuk menawarkan layanan tersebut

melalui teknologi informasi dan komunikasi yang progresif, daripada cara tradisional yang sudah ketinggalan zaman. Masalah-masalah ini akan memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan platform perangkat keras baru, platform perangkat lunak baru, dan legislasi baru.

Dalam skenario negara yang masih berkembang, sekitar 75% dari semua layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Bidang lainnya meliputi desentralisasi fiskal, manajemen keuangan dan akuntabilitas, tata kelola yang baik dan pendidikan sipil, pengembangan infrastruktur, sistem komunikasi dan informasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pembangunan kemitraan, penguatan lembaga, koordinasi, dan integrasi (Chadwick, 2003; Fukao, 1995; Wasukira & Naigambi, 2002). Untuk memenuhi persyaratan baru, platform elektronik harus dikembangkan agar:

1. Memungkinkan pengumpulan informasi pribadi dari lembaga nasional tersedia.
2. Memungkinkan berbagai tingkat kematangan teknologi di antara berbagai layanan.
3. Menjamin tingkat keamanan yang tinggi.
4. Memberikan tingkat ketersediaan yang tinggi.
5. Menerbitkan standar terbuka dalam hal format data, pertukaran informasi, dan tingkat keamanan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perancangan harus dikembangkan dengan menggabungkan lingkungan teknologi, keuangan, organisasi, dan institusi untuk mengimplementasikan platform layanan elektronik terintegrasi. Selain itu, untuk melengkapi pengembangan platform terintegrasi, prosedur harus direkayasa ulang, distandardisasi, dan didigitalkan untuk menciptakan model proses yang sesuai secara hukum dengan struktur yang sangat terkalibrasi (Inter-American Development Bank, 2006; Misra, 2008).

Alih-alih pemerintah daerah mengembangkan aplikasi pemerintah elektronik secara potensial duplikatif dan terisolasi, pemerintah pusat seharusnya membantu dalam menyebarkan standar dan pedoman yang mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam pengembangan layanan berbasis elektronik dan berbagi basis data dan layanan melalui jaringan (OECD, 2007a, 2007b). Isu-isu masa depan juga harus mencakup strategi untuk mengembangkan infrastruktur broadband yang kuat dengan akses untuk semua, dari semua bisnis (terutama UMKM) hingga semua orang dalam komunitas; memastikan bahwa pendidikan dan basis keterampilan ada untuk mengembangkan dan mempertahankan angkatan kerja masa depan; mengatasi "kesenjangan digital" dan memastikan bahwa masyarakat informasi terbuka untuk semua; menciptakan lingkungan yang ramah bagi e-commerce dan e-business untuk berkembang dan mencapai massa kritis, terutama dalam hal konten digital (Berg, Meer, Winden, & Woets, 2006).

Di masa depan, sistem pemerintah daerah berbasis elektronik harus tetap mempertahankan otonomi lokal melalui anggaran partisipatif dengan partisipasi yang ditingkatkan dari perempuan, pemuda, LSM, dan masyarakat sipil.

5. Kerangka Kerja yang Diusulkan

Kerangka kerja e-government masa depan dapat menjadi pendekatan empat dimensi yang mencakup akses, ketersediaan, keadilan, dan demokrasi (lihat Gambar 2.8). Selain itu, kerangka kerja e-government masa depan dapat mengadopsi empat strategi operasional lapisan, yang mencakup pengembangan, implementasi, delegasi, dan penyebaran (lihat Tabel 2.2). Kerangka kerja e-government masa depan dapat berfokus pada pergeseran paradigma dari konteks saat ini ke skenario masa depan, seperti yang tergambar dalam Tabel 2.3.

Governance di tingkat lokal sangat penting, dan e-tata kelola adalah cara yang lebih baik untuk menyediakan layanan pemerintah kepada warga biasa. Namun, metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur masyarakat mereka, baik secara nasional, regional, maupun lokal, merupakan elemen penting dalam menentukan hasil yang berkontribusi pada kualitas hidup komunitas tersebut. Dalam aspek ini, tata kelola yang baik, yaitu tata kelola yang memungkinkan aspirasi kolektif masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan efisien, bergantung pada cara institusi-institusi publik dirancang dan beroperasi. Ini mencakup institusi-institusi yang seimbang antara kemampuan warga untuk berpengaruh dengan kapasitas untuk memungkinkan wakil-wakil terpilih untuk memimpin.

Pendekatan yang digunakan oleh institusi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menyediakan layanan serta struktur sektor pemerintah daerah merupakan hal yang menjadi perhatian bagi semua yang peduli dengan bagaimana organisasi sektor publik dapat mencapai hasil komunitas yang efektif (MDL, 2006; McNabb, 2006). Hal ini membenarkan institusionalisasi yang ketat untuk promosi e-tata kelola di tingkat akar rumput.

<i>Democracy:</i> Promoting— Integrity, Accountability, and Transparency	<i>Equity:</i> Enhancing— Responsiveness, Accountability, Transparency, Effectiveness, and Quality of life
<i>Access:</i> Providing— Information pertaining to the governance system	<i>Availability:</i> Increasing— Efficiency, Effectiveness, Quality of system, and Understandability among participants

**Gambar 2. 9 Kerangka kerja e-government empat dimensi
(diadopsi dari Nour, AbdelRahman, & Fadlalla, 2008)**

Tabel 2. 2 Strategi Operasional e-government Empat Lapisan

Operational strategy	Actions
Development	<i>Network layer:</i> Information infrastructure, servers, LANs, WANs, intranet, Internet
Deployment	<i>Integration layer:</i> Database development, e-mail, e-forms, e-portals, network-enabled system, legal boundaries, policy issues
Delegation	<i>Management layer:</i> skill development, business process reengineering, demand–supply management
Dissemination	<i>User application layer:</i> G2G, G2C, C2G, G2B, B2G, G2NG, NG2G, G2O, O2G ^a

Sistem e-government di tingkat pusat seharusnya memiliki visi dan prioritas yang jelas untuk pemerintah daerah; siap menghadapi teknologi-teknologi yang muncul; memiliki kemauan politik yang cukup untuk memimpin usaha e-government; memprioritaskan pemilihan proyek e-government selama tahap implementasi; kompeten dalam perencanaan dan pengelolaannya; mampu mengatasi perlawanan dari dalam pemerintah; memperkenalkan pemantauan yang sesuai, pengukuran, umpan balik, dan jalur komunikasi untuk mengikuti perkembangan implementasi; mempromosikan hubungan institusional di antara semua mitra pelaksana, terutama pelaksana sektor swasta; mengembangkan keterampilan manusia yang memadai untuk mengelola seluruh rantai operasional; dan mampu meningkatkan partisipasi warga dalam urusan publik (Pacific Council, 2002), sehingga memvalidasi pentingnya peran pemerintah pusat dalam e-tata kelola di tingkat akar rumput.

Tabel 2. 3 Perubahan paradigma dari sistem e-government saat ini menjadi sistem e-government di masa depan

Current	Future
<i>Fragmented services:</i> Agent centric, semi-automated	<i>Uninterrupted shared services:</i> Citizen centric, participative, synchronized, integrated, automated
<i>Traditional form of service:</i> Mostly single channel, push service (supply-driven), mass service (not personalized)	<i>Ubiquitous service:</i> Multiple channels, pull service (demand-driven), personalized service, knowledge-driven
<i>Functionality of service:</i> Mainly focused on demand–supply chain, pushed by the government hierarchy, mostly controlled by the central government	<i>Socially integrated form of service:</i> Focus on value addition to the user and people at large, decentralized, interlinked with the local government autonomy

Source: Government of S. Korea (2006, Author).

Selain dari perancangan, struktur, dan peluncuran sumber daya online yang tepat, inisiatif e-government lokal melibatkan lebih dari sekadar sebuah situs web. Sebuah laporan yang disiapkan untuk Congressional Research Service oleh tim penelitian dari LBJ School of Public Affairs, University of Texas di Austin pada Juni 2006 mengidentifikasi beberapa faktor yang umumnya digunakan yang berkontribusi pada fungsi inisiatif e-government negara bagian. Faktor-faktor tersebut adalah: strategi yang sesuai, pendanaan yang memadai, kepemimpinan yang otentik, teknologi yang diterima, dan pengukuran kinerja yang memadai (Austin City Council, 2008). Setiap tahap pengembangan e-government lokal harus dibangun di atas tahap sebelumnya, hingga pemerintah mencapai konsensus baru untuk menyediakan layanan berbasis elektronik yang lebih baik

kepada warga dan bisnis. Oleh karena itu, teknologi perlu diadopsi sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir.

Namun, telah diamati bahwa, di tingkat nasional dan di daerah yang menguntungkan (kota besar, ibu kota, dan daerah perkotaan), ICT digunakan secara luas hanya untuk mengatasi proses bisnis kunci. Kebijakan e-government nasional tidak selalu berlaku dengan tekun untuk tingkat pemerintah daerah. Bahkan jika diterapkan, kebijakan tersebut tidak dapat menghindari duplikasi usaha, masalah interoperabilitas, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan ekonomi skala dan keamanan. Komponen-komponen kunci yang mendorong tata kelola lokal dan ICT tetap akses, konten, layanan kepada warga, dan pembangunan ekonomi dan sosial, dan untuk implementasi yang tepat dari strategi ICT, kebutuhan untuk inisiatif-inisiatif ini yang ditujukan untuk daerah-daerah terpinggirkan juga belum diidentifikasi dengan baik. Selain itu, meskipun pemerintah daerah berbeda secara signifikan dalam hal kapasitas, konten, penyampaian layanan, dan efektivitas; mereka harus dinamis dan berkembang karena keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu mengambil peran sebagai pemain kunci dalam pengembangan sistem e-governance yang terpadu berbasis pedesaan, berorientasi pada warga, berbasis informasi, ramah pengguna, mudah diakses, dan dinamis (CPSI, 2005; Samarajiva & Zainudeen, 2008). Terutama, e-governance di tingkat akar rumput perlu mengakomodasi layanan yang berorientasi pada nilai.

Dalam hal ini, penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang langsung untuk meningkatkan sistem e-government di tingkat pemerintah daerah, melainkan banyak faktor yang mengendalikan sistem tersebut, termasuk struktur pemerintahan (tingkat sistem pemerintahan), demografi lokal (penduduk, ukuran,

kepadatan), seperangkat tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah (aturan pemerintah), dan homogenitas preferensi dalam wilayah tersebut (kebijakan dan masalah tata kelola) (Commonwealth, 2004; Fox & Gurley, 2006).

I. Beberapa Teori yang relevan

1. Teori Deterministik Teknologi Komunikasi

Determinisme teknologis adalah turunan dari determinisme. Secara garis besar, mereka yang menentang determinisme teknologi, secara teoretis, dapat dikategorikan sebagai kaum 'social construction.' Mereka cenderung melihat teknologi dari sudut pandang material semata. Teknologi hanya dilihat sebagai alat atau mesin. Teknologi, bagi mereka, tidak lebih dari sekadar mesin yang penggunaannya ditentukan oleh manusia. Mereka menempatkan manusia sebagai aktor utama di dalam perubahan sosial. Mereka cenderung meyakini bahwa roda sejarah tidak digerakkan oleh mesin, tetapi digerakkan oleh orang-orang besar, yang memiliki kharisma pengaruh yang besar pada masyarakat luas.

Feenberg (1996) menyebutkan dua teori tentang teknologi, yaitu instrumental dan substantif. Teori instrumental memiliki dasar pemikiran bahwa teknologi adalah 'alat' yang senantiasa siap untuk melayani kepentingan pemakainya, sedangkan teori substantif memiliki keyakinan bahwa teknologi bersifat dinamis dan mampu mengubah kehidupan sosial.

Determinisme teknologi adalah sebuah teori yang disampaikan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 melalui karya tulisnya dengan judul *The Gutenberg Galaxy: The Making Of Typographic Man*. Teori tersebut menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut

akhirnya mengarahkan manusia bergerak dari suatu abad ke teknologi yang lain. Dengan artian bahwa teknologi memberikan pengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Gagasan utama dari teori determinisme teknologi adalah pengaruh teknologi media terhadap masyarakat, dengan asumsi bahwa (Apsari,2019) : (a) Media mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan manusia. (b) Media memperbaiki persepsi dan mengolah pengalaman manusia, (c) Media mengikuti dunia bersama-sama

Pada asumsi pertama, menekankan pada gagasan bahwa kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari media, media ada dalam berbagai macam aspek terdalam kehidupan manusia. Asumsi kedua, teori ini menekankan bahwa manusia itu secara langsung dipengaruhi oleh media. Para ahli teori meyakini bahwa media dapat memperbaiki persepsi, mempengaruhi, dan mengolah pengalaman manusia. Marshall McLuhan menegaskan bahwa media mempengaruhi manusia dalam memulai harinya melalui informasi yang diperoleh dari media.

Asumsi yang terakhir, media mengikuti dunia bersama-sama. Marshall McLuhan mengenakan istilah Global Village untuk menjelaskannya bagaimana media mengikat dunia menjadi satu sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya global sehingga informasi menjadi satu budaya populer dan global. Marshall McLuhan menegaskan bahwa media merupakan inti dari peradaban manusia. Dominasi media di dalam masyarakat menentukan dasar organisasi sosial dan kehidupan kolektif. Guna menjelaskan idenya, Marshall McLuhan meneliti sejarah perkembangan manusia dalam masyarakat dengan mengidentifikasi teknologi media yang memiliki peran penting dan mendominasi kehidupan manusia dalam waktu tertentu serta membaginya ke dalam 4 periode, yaitu:

a. *A tribal age* (era suku atau purba)

Di era purba atau era suku pada zaman dahulu, manusia hanya dapat mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi. Pada era ini manusia hanya mengenal berkomunikasi mendasar seperti narasi, cerita, dongeng turunan, dan sejenisnya. Jadi, telinga merupakan “raja” pada masa ini, “hearing is believing” sementara kemampuan penglihatan belum diandalkan. Di era ini otak berperan sangat penting karena sebagai wilayah pengontrol pendengaran.

b. *Literate age* (era literal/huruf)

Sejak ditemukannya alfabet atau huruf, maka cara berkomunikasi manusia pada era ini berubah secara signifikan. Kemampuan indra penglihatan menjadi lebih dominan dibanding indra pendengaran seperti era sebelumnya. Manusia tidak lagi hanya mengandalkan tuturan, melainkan lebih kepada tulisan.

c. *A print age* (era cetak)

Pada era ini alfabet semakin dikenal orang terlebih lagi sejak ditemukannya media cetak. Kekuatan kata-kata menggunakan mesin cetak merajalela. Dengan kehadiran mesin cetak dan media cetak menjadikan manusia lebih bebas dalam berkomunikasi.

d. *Electronic age* (era elektronik)

Era ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam alat dan teknologi komunikasi. Telegram, telepon, radio, film, televisi, VCR, fax, komputer, serta internet. Manusia menjadi hidup di dalam apa yang disebut “global village”. Pada masa ini, media massa dapat membawa manusia mampu bersentuhan dengan manusia yang lainnya, kapan pun dimana pun, bahkan saat itu juga (Timbowo, 2016).

Penerapan teknologi ini dapat dilakukan dalam setiap konteks komunikasi.

Tapi harus sesuai dengan ide Marshall McLuhan yaitu dengan menekankan indra dalam proses komunikasinya dan media sebagai titik tolaknya, maka teori ini tetap diterapkan dalam konteks komunikasi massa. Salah satu pemikiran Marshall McLuhan yang paling terkenal dan menimbulkan kontroversi adalah ungkapan yang mengatakan bahwa media adalah pesan (*the medium is the message*), berdasarkan ungkapan itu, Marshall McLuhan ingin menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan oleh media tidak lebih penting dari media atau saluran komunikasi yang digunakan pesan untuk sampai kepada penerimanya.

Dengan demikian, ia memaparkan bahwa media atau saluran komunikasi memiliki kekuatan serta memberikan pengaruh terhadap masyarakat, dan bukan isi pesannya. Orang yang melakukan chatting melalui internet ataupun

berkomunikasi dengan Facebook bisa jadi tidak terlalu mementingkan isi pesan yang akan mereka tulis, melainkan kebenaran bahwa mereka menggunakan Internet atau Facebook itulah yang penting. Marshall McLuhan berpendapat bahwa dalam menggunakan media, orang hanya cenderung mementingkan isi pesan saja dan tidak menyadari media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut juga mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut pendapatnya, media dapat membentuk dan mempengaruhi pesan atau informasi yang disampaikan.

Jika suatu pesan disampaikan melalui radio maka akan memberikan pengaruh yang berbeda apabila pesan tersebut disampaikan dengan televisi. Televisi dapat memberikan efek dramatis terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Misalnya adalah mengenai efek debat calon presiden Amerika Serikat antara Jhon F. Kennedy dengan Richard Nixon dimana orang yang menonton televisi lebih mendukung Kennedy, sedangkan orang yang mendengarkan radio lebih mendukung Nixon. Nampaknya Marshall McLuhan menggunakan ungkapan media adalah pesan khususnya kepada televisi. Kejadian serangan terorisme di New York dan perang teluk di timur tengah membuat banyak orang beralih memperhatikan televisi, namun orang hanya memperhatikan pesan yang disampaikan serta tidak menyadari bagaimana pentingnya televisi sebagai media atau saluran (Utomo, 2016)

Marshall McLuhan dibantu oleh putranya yaitu Eric pada akhir tahun 1980-an melakukan pengembangan lebih mendalam terkait pemikirannya dalam menjelaskan efek teknologi terhadap masyarakat dengan mengajukan gagasan yaitu hukum media (Media Laws). usaha yang mereka lakukan menghasilkan efek lingkaran media: teknologi baru mempengaruhi cara orang berkomunikasi, cara

orang berkomunikasi membawa perubahan bagi masyarakat, dan perubahan masyarakat menyebabkan munculnya teknologi baru (McLuhan & McLuhan, 1998). Kemudian mereka juga mengajukan konsep yang diberi nama Tetrad, sebagai usaha untuk memahami hukum media yang dibagi menjadi empat hukum media, yaitu penguatan, ketertinggalan, penemuan, dan pembalikan.

- a. Penguatan (*enhancement*), Yaitu hukum yang menyatakan bahwa media dapat memperkuat masyarakat. Internet berpotensi untuk memperkuat dan memberikan akses lebih luas terhadap informasi. Selain itu contoh lainnya adalah dengan adanya telepon dapat memperkuat ucapan yang disampaikan dalam percakapan tatap muka. Radio memperkuat suara melampaui jarak yang jauh. Televisi memperkuat suara dan gambar sehingga dapat menyebrangi benua. Menurut McLuhan, internet dapat memperkuat masyarakat dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Internet mempunyai potensi untuk memperkuat indra pada manusia seperti indra penglihatan dan pendengaran.
 - 2) Internet dapat memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi
 - 3) Internet bisa memperkuat pembagian kelas yang ada di masyarakat karena kelompok masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin sama-sama dapat mengakses internet.
 - 4) Internet dapat menguatkan desentralisasi kekuasaan, penguasa bukan satu-satunya orang yang dapat mengakses informasi.
- b. Ketertinggalan (*obsolescence*), Yaitu hukum yang menegaskan bahwa media mampu menjadi suatu hal yang awalnya tertinggal atau tidak berguna menjadi sebaliknya karena diangkat oleh media dan bertahan karena sesuai kebutuhan masyarakat yang disesuaikan. Misalnya adalah ketika televisi hadir, banyak orang yang meninggalkan radio dan beralih ke televisi, meskipun akhirnya

radio tetap bertahan karena orang membutuhkan hiburan ketika mengendarai kendaraan. Kemunculan VCD/DVD yang memungkinkan orang tidak perlu untuk menonton di bioskop pun sempat mengancam bioskop menjadi ketinggalan zaman serta tidak berguna, namun hingga saat ini bioskop tetap ada karena orang membutuhkan bioskop sebagai hiburan dan menjadi kebutuhan pergaulan. Dan akhirnya komunikasi tatap muka menjadi ketinggalan zaman sejak adanya telepon dan internet (chatting).

- c. Penemuan (retrieval), Yaitu hukum yang menegaskan bagaimana media menyimpan sesuatu yang dulu pernah hilang, mengenai suatu yang sudah dianggap tidak berguna menjadi muncul kembali dan digunakan lagi. Contohnya adalah televisi, yaitu dengan mengembalikan pentingnya aspek visual yang sebelumnya tidak dimiliki oleh radio. Media cetak menemukan kembali pengetahuan universal yang dulunya dimiliki masyarakat era kesukuan. Chatting internet mengembalikan kebiasaan orang untuk melakukan percakapan yang marak dilakukan sebelum ditentukannya radio dan televisi.
- d. Pembalikan (reversal), yaitu hukum yang menegaskan bahwa media akan menghasilkan atau menjadi suatu yang lain jika didesak hingga ke batas akhir dan mengandung ciri-ciri atau karakteristik dari sistem darimana ia berasal. Kebutuhan akan menonton film populer yang ada di bioskop dengan biaya terjangkau mendorong stasiun televisi membuat dan menayangkan film serupa dengan

versi televisi sendiri. Adanya alat perekam gambar menjadikan orang dapat merekam acara yang ditayangkan televisi yang bersifat masal karena ditonton jutaan orang dapat menjadi rekaman pribadi yang ditonton secara privat. Televisi berbalik kembali pada masa awal era cetak, ketika orang mengonsumsi media secara privat. Internet-apabila media ini didesak pada batas akhirnya- akan membalikan masyarakat kepada tempat baru dan unik. Internet mempunyai potensi dapat mengembalikan manusia menuju era kesukuan dengan melakukan percakapan di ruang chatting, tapi internet juga bisa mengisolasi orang sebagaimana televisi. Internet mempunyai kemampuan yang memungkinkan orang untuk mengunduh acara televisi, musik, dan film sehingga internet berbalik menjadi media yang memiliki daya tarik audio-visual.

2. Teori Hyperlink

Hyperlink adalah kemampuan teknologi yang memungkinkan satu situs Web tertentu terhubung dengan lancar ke situs lain. Hyperlink bersama (bilateral atau unilateral) di antara situs Web memungkinkan dokumen dan gambar dirujuk melalui Web. Informasi atau konten dapat "ditransmisikan" melalui klik sederhana dengan mouse (Pirolli & Card, 1999). Sebuah hyperlink antara dua situs Web secara fungsional mendekatkan dua situs tersebut. Meskipun setiap individu dan organisasi memiliki kebebasan sepenuhnya dalam memilih seleksi hyperlink di situs Web mereka, struktur hyperlink kemungkinan akan dirancang, dipertahankan, atau dimodifikasi oleh pembuat situs Web untuk mencerminkan pilihan dan agenda komunikasi mereka (Jackson, 1997; Park, 2002). Yang mengikat bersama simpul-simpul Web, situs Web, dapat menjadi jaringan sosial serta komponen teknologi (Kling, 2000). Dari sudut pandang ini, kita potensial

dapat menemukan jejak-jejak hubungan sosial melalui analisis konfigurasi interkoneksi hyperlink di antara situs Web yang mewakili komponen sistem sosial seperti orang, perusahaan swasta, organisasi publik, kota, atau negara-negara.

Seiring dengan meningkatnya peran komputer dan Internet sebagai alat penting untuk interaksi sosial dan pertukaran informasi di antara orang-orang. Secara khusus, Jackson (1997) berargumen bahwa analisis jaringan sosial berbasis hyperlink dapat menjadi pendekatan yang kuat untuk mempelajari representasi dan interpretasi struktur komunikasi Web.

Kerangka teoritis dari analisis jaringan hyperlink didasarkan pada penggunaan dan aplikasi analisis jaringan sosial tradisional, yang mempelajari hubungan yang ada di antara orang-orang, organisasi, dan negara-negara (Wasserman & Faust, 1994; Wellman & Berkowitz, 1989). Hubungan sosial umumnya disusun berdasarkan pertukaran antara pelaku sosial. Isi pertukaran dapat bersifat terlihat atau tidak terlihat, dan mencakup barang-barang manufaktur, pengetahuan, kekuatan politik, sitiran, dukungan sosial, konten media, atau informasi. Pertukaran ini mengikuti pola atau keteraturan yang tidak dapat ditemukan jika anggota sosial dianalisis secara individu. Dengan kata lain, hubungan pertukaran di antara anggota sistem sosial dapat direpresentasikan sebagai jaringan - himpunan ikatan yang menggambarkan interkoneksi mereka. Dalam bidang komunikasi, analisis jaringan sosial menguji hubungan antara komponen sistem sosial (biasanya individu) berdasarkan pola penggunaan yang stabil dari sistem komunikasi (terdiri dari saluran/media, pesan, dan simbol) (Monge & Contractor, 2000)

Keyakinan yang mendasari adalah bahwa pola struktural koneksi hyperlink dapat memenuhi fungsi sosial atau komunikatif tertentu:

1) E-commerce

Penelitian Krebs (2000) tentang Amazon.com secara tidak langsung mengungkapkan peran hyperlink dalam hubungan saling percaya di antara konsumen online. Amazon.com memberikan informasi kepada pelanggan dengan jenis berikut: orang yang membeli buku ini juga membeli buku-buku ini, dengan hyperlink yang sesuai sehingga calon pelanggan dapat melihat langsung buku-buku terkait tersebut. Krebs berpendapat bahwa fakta bahwa orang dengan minat yang serupa membeli buku-buku tersebut berkontribusi untuk meyakinkan calon konsumen untuk membelinya. Dengan memilih buku tertentu sebagai simpul fokus, ia membangun jaringan hyperlink di antara buku-buku, dengan asumsi bahwa buku-buku secara tidak langsung mewakili orang-orang yang membelinya dan bahwa jaringan tersebut dapat dilihat sebagai jaringan sosial. Palmer, Bailey, dan Faraj (2000) juga menggunakan metode hyperlink untuk menguji e-commerce. Saat membeli barang secara online, kepercayaan konsumen terhadap situs Web dianggap sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam proses transaksi.

Berdasarkan teori ini, Palmer dkk. menggunakan jumlah hyperlink masuk ke situs Web sebagai indikator kepercayaan yang diberikan kepada sebuah perusahaan Internet. Mereka mendapatkan data mereka dari Alexa.com. Sebagai perusahaan informasi Web, Alexa menyediakan berbagai statistik tentang situs Web individual. Hasil yang diperoleh oleh Palmer dkk. menunjukkan bahwa jumlah hyperlink masuk sangat berhubungan dengan penggunaan dan prominensi TTPs (Pihak Ketiga Terpercaya) dan pernyataan privasi yang dapat dianggap sebagai indikator kepercayaan tambahan. Metode penelitian mereka mirip dengan analisis jaringan tradisional yang mengukur prestise individu berdasarkan jumlah teman yang memilih orang tersebut sebagai perwakilan mereka. Davenport dan Cronin

(2000) melihat hyperlink secara umum sebagai sumber potensial kepercayaan baru dalam target mereka, dengan cara yang mirip dengan fungsi referensi dalam literatur ilmiah. Juga mungkin untuk lebih mengkategorikan jenis kepercayaan yang diberikan kepada situs Web dengan memeriksa konteks hyperlink (Beaulieu & Simakova, 2002).

2) Gerakan sosial

Konfigurasi jaringan hyperlink itu sendiri dapat menyampaikan informasi keseluruhan yang berguna tentang lanskap masalah tertentu dalam masyarakat. Adamic (1999) mengeksplorasi struktur hyperlink dari situs Web yang berurusan dengan isu aborsi. Hasilnya mengungkapkan perbedaan antara kelompok yang mewakili posisi yang berbeda dalam perdebatan, baik dalam hal struktur situs maupun dalam hal kepadatan koneksi antara situs-situs tersebut. Rogers dan Marres (2000) menganalisis jaringan hyperlink di antara situs-situs Web yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta seperti produsen mobil yang terlibat dalam isu perubahan iklim di Web.

Mereka menemukan bahwa organisasi-organisasi tersebut menghasilkan representasi simbolis dari aliansi mereka melalui pemilihan hyperlink. Misalnya, NGO cenderung membuat hyperlink ke lembaga pemerintah termasuk PBB, tetapi tidak kepada pemain swasta manapun. Selain itu, analisis etnografis Hine (2000) tentang persidangan pengasuh British Louise Woodward menunjukkan bahwa melacak koneksi hyperlink yang kompleks antara situs-situs Web yang berbeda yang terkait dengan topik tertentu dapat membantu memahami proses penetapan agenda dan pembangunan. Hal ini juga menggambarkan cara hubungan terbentuk dan dipertahankan antara pelaku, yang menghasilkan pembuatan hyperlink. Lebih

baru, Halavais dan Garrido (2003) menggambarkan struktur jaringan hyperlink dari situs-situs Web NGO yang terkait dengan gerakan Zapatista dan memeriksa peran mereka dalam jaringan NGO global. Studi mereka memberikan contoh baik lainnya tentang penggunaan analisis jaringan hyperlink untuk mengungkap struktur gerakan sosial, berdasarkan distribusi tautan di antara situs-situs Web para aktivis. Dengan demikian, topologi hubungan hyperlink di antara situs-situs Web organisasi sosial yang menghadapi isu bersama memungkinkan peneliti untuk mengetahui jenis masalah sosial apa yang ada dan menonjol melalui jaringan Web. Frekuensi atau intensitas hyperlink di antara sekelompok situs pribadi atau organisasi yang didedikasikan untuk isu sosial dapat memberikan petunjuk tentang relevansi topik tersebut dalam komunitas. Selain itu, representasi ini juga dapat mengindikasikan hubungan yang mendasari antara posisi pembuat situs dalam dunia nyata dan keberadaan Web mereka.

Meskipun penelitian terbaru tentang pemulihan informasi Web, e-commerce, dan gerakan sosial cenderung mengadopsi analisis hyperlink, belum ada penyelidikan tentang jaringan sosial di antara simpul-simpulnya. Dengan kata lain, belum ada pemeriksaan sistematis tentang bagaimana jaringan hyperlink di antara situs Web (atau halaman) mencerminkan hubungan sosial di antara mereka. Di sisi lain, satu kelompok penelitian lainnya mengikuti bagaimana kehidupan aktor sosial individu, tertanam dalam lingkungan Web, terukir pada jaringan hyperlink.

3) Komunikasi antarpribadi

Park, Barnett, dan Kim (2000, 2001) menganalisis hyperlink di antara partai politik dan anggota Parlemen Nasional Korea Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah struktur hyperlink mencerminkan atribut homofilus di antara aktor politik. Sejumlah besar penelitian jaringan komunikasi (Monge & Contractor,

2000; Rogers & Bhowmik, 1971) menunjukkan pentingnya homofili, yaitu kecenderungan memilih mitra komunikasi yang mirip dengan diri sendiri. Menyadari bahwa dampak homofili tampaknya tidak mungkin berkurang di dunia maya, Park dkk. (2000, 2001) mengembangkan matriks situs demi situs dari hyperlink dan membandingkan matriks konektivitas hyperlink dengan matriks keanggotaan partai bersama menggunakan QAP.

Mereka menemukan bahwa struktur jaringan hyperlink mereka sangat berhubungan dengan keanggotaan partai. Dengan kata lain, politikus dan konstituennya membentuk komunitas "birds of a feather" (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Secara khusus, mereka berpendapat bahwa budaya Korea Selatan yang berdasarkan "Konfusianisme" memiliki dampak besar pada penguatan homogenitas di antara aktor politik di Web. Dengan demikian, kita dapat menginterpretasikan struktur sosial dan komunikasi di antara aktor sosial tersebut berdasarkan struktur hyperlink.

4) Komunikasi antarorganisasi

Banyak organisasi telah membuat situs Web mereka sendiri, terlepas dari apakah kegiatan, layanan, atau produk mereka terkait dengan Internet (Shapiro & Varian, 1999). Beberapa organisasi seperti Yahoo.com sebagian besar ada sebagai entitas independen di Web. Situs Web dapat dianggap sebagai organisasi itu sendiri. Dengan demikian, jaringan antarorganisasi dapat terbentuk melalui hyperlink bersama. Sebagai contoh, situs Web sebuah organisasi cenderung menawarkan hyperlink ke situs lain karena mereka memiliki jenis kemitraan bisnis tertentu.

Bae dan Choi (2000) menggunakan analisis jaringan hyperlink di antara situs Web untuk menangkap struktur komunikasi yang dimediasi oleh hyperlink antara 402 LSM hak asasi manusia. Mereka menemukan bahwa banyak LSM

membentuk jaringan hyperlink dengan yang lain berdasarkan kesamaan tujuan atau aktivitas mereka, bukan lokasi geografis. Dalam penelitian Thelwall (2001a), hyperlink bisnis adalah jenis hyperlink eksternal yang paling umum. Dalam sampel tersebut, 72 dari 232 situs, atau 31 persen, ditemukan memiliki hyperlink berdasarkan hubungan bisnis yang terafiliasi. Dengan menggunakan sejumlah universitas Inggris, direktori Web, dan perusahaan komputasi besar seperti Netscape dan Oracle, Thelwell (2001b) menemukan bahwa hubungan bisnis di antara organisasi tersebar di seluruh situs Web mereka melalui seleksi hyperlink.

Selanjutnya, Park, Barnett, dan Nam (2002a) menganalisis jaringan afiliasi di antara 152 situs Web komersial di Korea Selatan. Mereka membuat matriks hubungan situs demi situs berdasarkan keberadaan hyperlink dalam halaman Web berjudul program afiliasi. Mereka mengukur sentralitas dan menemukan bahwa struktur pengelompokan jaringan hyperlink-afiliasi dipengaruhi oleh situs-situs Web keuangan (seperti situs perusahaan kartu kredit) dengan yang lain terafiliasi. Park dkk. (2002a) menjelaskan bahwa sumber pendapatan utama situs komersial adalah iklan dan e-commerce.

Pembayaran dengan kartu kredit adalah transaksi paling umum di Internet. Selain itu, perusahaan keuangan seperti bank memainkan peran penting sebagai pihak yang dipercayai dalam transaksi kartu kredit. Skor sentralitas tinggi mereka dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keterlibatan situs Web dalam aktivitas bisnis: semakin banyak bisnis yang mereka lakukan, semakin mungkin perusahaan keuangan memainkan peran penting dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, tampaknya jaringan hyperlink mengartikulasikan berbagai jenis hubungan lainnya.

5) Komunikasi internasional

Akhirnya, penelitian hyperlink di bidang komunikasi internasional juga mendukung gagasan bahwa konfigurasi hyperlink mengandung informasi yang cukup untuk menyimpulkan hubungan sosial yang terukir dalam dunia offline. Proses globalisasi dapat dipahami dari perspektif Teori Sistem Dunia (Wallerstein, 1976), yang berargumen bahwa masyarakat global dapat ditandai oleh pertukaran yang tidak setara antara negara-negara kaya informasi yang kuat dan negara-negara miskin informasi (Barnett, 2001; Hargittai, 1999).

Halavais (2001) menguji peran batas geografis dalam dunia maya menggunakan pola hyperlink situs Web. Pendekatannya adalah mengambil sampel 4.000 situs Web, menganalisis hyperlink eksternal mereka, dan menentukan persentase total hyperlink dari situs ke berbagai negara. Dia menemukan bahwa situs Web lebih cenderung membuat hyperlink ke situs yang dihosting di Amerika Serikat daripada ke situs di tempat lain di dunia. Demikian pula, Brunn dan Dodge (2001) menganalisis hyperlink antar domain di antara situs Web yang milik 174 TLD (domain tingkat atas, seperti .ca untuk Kanada). Penelitian mereka mengungkapkan bahwa daerah dan negara yang paling terhubung dan yang paling sedikit terhubung cukup mirip dengan dimensi pusat-ke-periferi dalam literatur Sistem Dunia. Penelitian Barnett, Chon, Park, dan Rosen (2001) menguji pola hyperlinkage di antara 29 negara OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) negara. Amerika Serikat ditemukan sebagai negara paling pusat, sementara Islandia dan Turki adalah yang paling periferi. Ada juga korelasi antara pusat masing-masing negara dalam jaringan hyperlink dan PDB mereka, dan mereka juga menemukan hubungan antara kekuatan jaringan hyperlink dan jaringan sosial dan komunikasi lainnya.

Lebih baru, Park (2002) menggunakan analisis jaringan hyperlink untuk mempelajari komunikasi ilmiah internasional dan aliran informasi lintas batas di wilayah Asia. Penelitian Park berbeda dari penelitian di atas karena tidak bergantung pada teori Sistem Dunia. Dengan asumsi bahwa hyperlink dapat dianggap sebagai bentuk jaringan komunikasi yang menghubungkan peneliti individu, Park (2002) membandingkan struktur hyperlink (masuk dan keluar) yang tertanam dalam situs Web universitas di 10 negara Asia dengan pola co-authorship di antara negara-negara tersebut. Ia menemukan bahwa dua struktur jaringan tersebut berkorelasi signifikan satu sama lain dan berargumen bahwa jaringan hyperlink akademik mewakili satu aspek dari komunikasi penelitian lintas batas negara.

Salah satu penelitian Park lainnya (2002) menguji sistem aliran informasi internasional dari Korea Selatan ke Taiwan berbasis Web. Konteks sosial dan sejarah yang serupa (seperti pemerintahan kolonial Jepang, sikap konfrontatif terhadap negara-negara komunis, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat) telah mengikat Korea Selatan dan Taiwan bersama selama bertahun-tahun. Namun, hubungan mereka telah mengambil jalur yang berbeda sejak Korea Selatan membuka hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada tahun 1992, dengan nama kebijakan "satu Tiongkok". Terinspirasi oleh latar belakang menarik ini, Park menganalisis struktur konektivitas hyperlink antara Korea Selatan dan Taiwan, dan menemukan bahwa jaringan hyperlink tersebut sangat jarang terhubung dalam hal jumlah halaman Web Korea Selatan yang menghubungkan ke halaman-halaman negara lain tersebut. Namun, karena kedua negara sangat bergantung pada ekspor produk komputer dan teknologi komunikasi Internet, mereka harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari kerja sama ekonomi lebih lanjut satu

sama lain. Hal ini mungkin memengaruhi konfigurasi hyperlink tersebut. Penelitian Park menyiratkan bahwa beberapa aspek dari hubungan kedua negara dapat dijelaskan melalui hyperlink Web.

3. Teori Perencanaan

Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri (Nursini, 2010). Waterston dalam Nursini, (2010) Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Conyers dan Hills (1984) dalam Nursini, (2010) perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Pengertian perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Tjokroamidojo (2003) Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki

oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.

Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut.

4. Teori Birokrasi

Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu organisasi (*organizational inefficiency*), pemerintah oleh para pejabat (*rule by officials*), administrasi negara (*public administration*), administrasi oleh para pejabat (*administration by officials*). Bentuk organisasi birokrasi biasa lekat dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan, salah satu ciri mutlak dari masyarakat modern. Birokrasi, dengan ciri-ciri khusus yang dimilikinya sebagai sebuah bentuk organisasi rasional, sejak lama telah mendapatkan perhatian sebagai sesuatu yang penting dari para ahli dari berbagai

disiplin ilmu sosial. Max Weber mengemukakan konsep tentang “*the ideal type of bureaucracy*” dengan merumuskan ciri-ciri pokok suatu organisasi yang rasional.

Tipe ideal birokrasi Weber inilah yang pada gilirannya mendasari terbentuknya organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Tentu saja dalam perilaku organisasi sehari-hari faktanya sering ditemui beberapa kritik dan kelemahan dimana tipe ideal ini begitu sulit secara keseluruhan diterapkan pada konteks kehidupan sehari-hari organisasi pemerintahan, namun pada hakikatnya dasar dari semua organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka dia berperan sebagai sebuah organisasi yang rasional. Istilah birokrasi dipakai pula dalam konotasi yang kurang baik yaitu ‘*administrative inefficiency*’. Di Amerika, birokrasi dalam pengertian yang kurang baik adalah mencerminkan cara kerja aparaturnya pelayanan pemerintah yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini dikemukakan oleh Donald Warwick dalam tulisannya:

“Critics claims that government organization became the master rather than the servant of the people, stifled initiatives, incubate fear, multiply reporting requirement circumscribe action, waste time, and deplete the federal treasury” (Warwick, 1975)

Memang banyak kritik yang dikemukakan terhadap organisasi birokrasi, yang pada prinsipnya mereka menyatakan bahwa tipe ideal organisasi yang dikemukakan oleh Weber tersebut sukar dijumpai dalam kenyataan. Pendapat yang demikian itu memang ada benarnya, namun ada beberapa prinsip pokok yang baik dan dapat meningkatkan kerja birokrasi tersebut yaitu efisiensi, efektivitas, kecepatan dalam pelayanan, dalam arti pemberian pelayanan kepada warga masyarakat tanpa membedakan dan tanpa memperlihatkan pertimbangan pribadi (*formalistic impersonality*), rekrutmen kepegawaian yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dengan mempertimbangkan keahlian dan kemampuan yang

ditempuh melalui ujian atau pengalaman, yang kesemuanya itu dipandang dalam suatu sistem administrasi negara modern. Birokrasi, di samping dalam arti luas, yaitu suatu sistem administrasi negara modern, dapat juga dipandang dalam pengertian yang lebih terbatas yaitu dalam pemahaman yang tidak berbeda dengan organisasi pemerintahan atau administrasi negara (*public administration*).

Konsep yang terbatas ini similar dengan konsep "*governmental bureaucracy*" seperti yang dipakai oleh Yahya Muhaimin, yang mendefinisikan birokrasi sebagai: keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer, yang melakukan tugas membantu pemerintah dan mereka yang menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu (Muhaimin, 1990). Pemaknaan birokrasi yang lain adalah dalam pengertian jenjang jabatan yang terdiri dari pimpinan atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Jadi "birokrat" dapat diartikan sebagai struktur yang terdiri atas unsur-unsur pimpinan yaitu para pejabat dalam organisasi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Weber memberikan mekanisme untuk membatasi lingkup sistem-sistem otoritas umumnya dan birokrasi khususnya, yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori pokok (Albrow; 36-37: 1989).

1) Kolegialitas

Perhatian Weber yang dicurahkan pada konsep tersebut memberikan bukti yang berguna bagi keseluruhan gagasan birokrasinya yang dipengaruhi oleh teori administrasi Jerman abad ke-19. Baginya, birokrasi dalam arti bahwa masing-masing tahapan hierarki jabatan seseorang, dan hanya satu orang, memiliki tanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan. Segera setelah orang lain terlibat dalam keputusan itu, seandainya benar maka prinsip kolegial terlaksana. Weber membedakan 12 bentuk kolegialitas. Di antaranya yang termasuk dalam

susunan semacam itu seperti konsulat Romawi, kabinet Inggris, berfungsi sebagai senat dan parlemen. Weber menganggap bahwa kolegialitas akan selalu memiliki bagian penting yang berperan membatasi birokrasi, tetapi hal itu tidak menguntungkan dilihat dari kecepatan keputusan dan pengurangan tanggung jawab dalam arti bahwa di mana pun ia berhadapan dengan prinsip monokratik.

2) Pemisahan Kekuasaan

Birokrasi mencakup pembagian tugas dalam lingkup fungsi yang berbeda secara relatif. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Keputusan apapun memerlukan kompromi di antara badan-badan itu untuk bisa tercapai, Weber menunjuk kompromi atas anggaran yang menurut sejarahnya harus dicapai oleh raja dan parlemen Inggris. Weber menganggap bahwa sistem seperti itu secara inheren tidak stabil. Salah satu di antara otoritas itu dibatasi untuk memperoleh keunggulan.

3) Administrasi Amatir

Manakala suatu pemerintahan tidak menggaji administraturnya maka pemerintahan itu tergantung pada orang-orang yang memiliki sumber-sumber yang dapat memungkinkan mereka menghabiskan waktu dalam kegiatan yang tidak bergaji. Orang seperti itu juga harus memiliki Permasalahannya bagi Weber ialah bagaimana mencegah kecenderungan yang ada pada birokrasi yang cenderung mengakumulasi kekuasaan dari penghargaan publik yang memadai untuk meraih kepercayaan umum. Sistem seperti itu tidak diukur berdasarkan tuntutan akan keahlian yang diperlukan masyarakat modern, dan di mana para amatir dibantu oleh para profesional maka selalu yang tersebut terakhirlah yang membuat keputusan yang sebenarnya.

4) Demokrasi Langsung

Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa para pejabat dibimbing langsung oleh, dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu majelis. Masa jabatan yang singkat, pemilihan oleh sedikit orang, kemungkinan yang selalu bisa terjadi untuk di-recall kesemuanya dimaksudkan untuk melayani tujuan tersebut. Hanya di dalam organisasi kecil seperti dalam beberapa bentuk pemerintahan lokal, terdapat metode yang layak bagi administrasi tersebut. Di sini juga dibutuhkan orang-orang yang berkeahlian sebagai pembuat keputusan. Demokrasi langsung akan menggeser otoritas birokrasi ke arah pejabat publik yang terpilih.

5) Representasi (Perwakilan)

Klaim seseorang pemimpin untuk mewakili para pengikutnya bukanlah sesuatu yang baru. Baik pemimpin kharismatik maupun tradisional memiliki klaim semacam itu. Tetapi apa yang baru di negara modern adalah kehadiran badan-badan perwakilan kolegal, yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemungutan suara dan bebas membuat keputusan serta memegang otoritas bersama dengan orang-orang yang telah memilih mereka. Sistem seperti itu tidak dapat dijelaskan kecuali dalam kaitannya dalam kegiatan partai politik, mereka yang menjadi birokrat itu sendiri, tetapi melalui perantara inilah Weber melihat suatu kemungkinan terbesar untuk mengawasi birokrasi.

Weber memandang parlemen bebas di negara modern merupakan sesuatu yang sangat vital untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan kelompok yang berbeda yang dilahirkan ekonomi kapitalis. Melalui sistem partai tersebut kelompok-kelompok semacam itu dapat menemukan pemimpin-pemimpin di majelis tadi. Dalam perjuangan di parlemen, manusia yang benar-benar berkualitas, yang layak memimpin dunia, dapat ditemukan. Weber berpendapat

bahwa orang Jerman tidak menyadari bahwa parlemen Inggris sebagai ajang berlatih bagi pemimpin-pemimpin politik. Patut dihormati antusiasme Weber terhadap sistem perwakilan, lebih-lebih pada keyakinannya bahwa kejayaan bangsa tergantung pada ditemukannya pemimpin yang menjunjung nilai-nilai demokrasi.

Munculnya beberapa konsep tentang arti birokrasi belakangan, merupakan hasil usaha-usaha modern dalam ilmu sosial yang telah mendorong ke arah proliferasi konsep lebih lanjut. Kecanggihan argumen dan penelitian bukan untuk memecahkan kembali masalah-masalah lama, tetapi hanya mengelaborasinya, sehingga muncullah konsep-konsep baru tentang birokrasi.

Interpretasi terhadap konsep Weber yang dilakukan oleh berbagai ahli, akhirnya akan bermuara kepada salah satu dari beberapa kategori besar di bawah ini.

a. Birokrasi sebagai Organisasi Rasional

Dalam pengertian ini birokrasi memiliki makna sebagai sebuah organisasi yang mengutamakan rasionalitas sebagai dasar dalam melakukan semua kegiatannya. Telah kita saksikan bahwa masalah terberat yang dihadapi para komentator terhadap Weber adalah untuk memahami hubungan antara gagasan rasionalitas dan ciri-ciri khusus yang dia lekatkan pada tipe ideal birokrasi. Telah menjadi kebiasaan untuk menandakan bahwa dalam hal ini tidak harus ada hubungan antara ciri-ciri khusus dan rasionalitas tersebut, dan dari sinilah kesimpulan itu ditarik, bahwa ada dua alternatif cara mengkonseptualisasikan birokrasi. Weber memandang birokrasi sebagai suatu mekanisme sosial yang memaksimumkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas. Kedua kriteria ini bukan merupakan bagian dari sebuah definisi, karena hubungan antara atribut-atribut suatu lembaga sosial dan

akibatnya merupakan suatu masalah bagi verifikasi empirik dan bukan definisi.

Sementara itu Peter Blau menyarankan barangkali lebih baik mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi. Ia menyarankan bahwa istilah birokrasi dipergunakan secara netral atau tanpa nilai untuk merujuk kepada unsur-unsur administratif dari organisasi-organisasi. Para sosiolog lain, Francis dan Stone menegaskan bahwa secara teknis istilah birokrasi mengacu pada bentuk bagaimana pengaturan berbagai komponen dilakukan terutama dalam rangka penyesuaian agar organisasi-organisasi yang besar dan sangat kompleks permasalahannya bisa selalu terjaga kestabilan dan keefisiensannya.

Kenyataan bahwa konsep ini nampak memiliki otoritas di balik nama Weber, telah mencapai popularitas pada decade terakhir ini. Peter Leonard mendefinisikan birokrasi sebagai hal yang sekedar mengacu pada susunan kegiatan-kegiatan yang rasional dan didefinisikan secara jelas yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Berbagai konsep birokrasi terutama yang berkaitan dengan efisiensi ini walaupun pengembangannya dilakukan oleh para sosiolog, pada gilirannya kemudian ternyata menarik minat para teorisi manajemen juga. Hal ini tidak mengherankan karena berkaitan gagasan tentang efisiensi juga menjadi permasalahan utama yang banyak dibahas dalam tulisan-tulisan para pengembang teori tentang manajemen tersebut.

b. Birokrasi sebagai Inefisiensi Organisasi

Konsep birokrasi sebagai organisasi rasional selalu merupakan hak milik elite akademisi. Tetapi di tataran operasional berkembang konsep birokrasi sebagai organisasi yang tidak efisien. Para sarjana yang mendukung konsep ini cenderung membenarkannya dengan mengacu penggunaan secara umum

(populer) daripada dengan usaha otoritas akademik. Birokrasi didefinisikan Matshall Dimock sebagai “susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah pemborosan, inflexibilitas (ketidakluwesannya) dan depersonalisasi”. Selalu mengaitkan perkembangannya dengan berbagai pengaruh dari faktor-faktor yang beragam, meliputi bentuk dan lingkup organisasi, meluasnya berbagai peraturan yang ada, kelompok-kelompok yang tertutup dan sulit melakukan keterbukaan dan terlalu menjadikan faktor senioritas dan keamanan sebagai hal yang sangat penting.

Birokrasi di sini dimaknai sebagai pemborosan yang dilakukan oleh organisasi. Adapun yang dimaksudkan dengan pemborosan di sini adalah pemborosan di berbagai aspek kegiatan organisasi, seperti waktu, tenaga, keuangan, ataupun sumber daya yang lain. Tidak jarang, maksud baik dari organisasi dalam rangka pemberian layanan yang efisien kepada masyarakat justru berbalik menjadi bentuk pelayanan yang tidak efisien dan malah mengecewakan masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Hal ini membuat masyarakat menjadi apatis dan skeptis ketika aparat birokrasi mewacanakan slogan-slogan yang berkaitan dengan efisiensi pelayanan birokrasi.

Michel Crozier, seorang sarjana Perancis, melihat birokrasi sebagai “suatu organisasi yang tidak dapat memperbaiki tingkah lakunya dengan belajar dari kesalahannya”. Crozier menjelaskan bagaimana regulasi dalam organisasi dapat dipergunakan oleh para individu yang ada di dalam organisasi tersebut untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini berakibat kelompok-kelompok dengan tingkatan yang berbeda-beda berusaha mempertahankan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi kelompoknya sendiri-sendiri. Keadaan yang tetap atau status quo ini membuat organisasi

kehilangan fleksibilitasnya dan berkembang menjadi organisasi yang strukturnya kaku dan tidak luwes sehingga sulit beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

c. Birokrasi sebagai Kewenangan yang Dijalankan oleh Pejabat

Ada keinginan modern untuk memandang demokrasi tidak hanya dalam arti kekuasaan yang dimiliki suatu kelas, melainkan sebagai sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin yang diperoleh secara legal dalam proses pemilihan umum yang demokratis untuk selanjutnya dipergunakan bagi kepentingan dan kebaikan seluruh rakyat. Pernyataan ini merupakan awal dari wacana dimana dengan jelas argumen normatif dimulai. Argumen ini ingin mengatakan bahwa distribusi kekuasaan apapun, dimana biasanya kekuasaan itu akan terdistribusi secara tidak merata, berusaha untuk dapat memperlihatkan gambaran bahwa demokrasi yang merujuk pada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu benar-benar ada. Oleh karena itu birokrasi ingin mengesankan cocok dengan, atau bahkan perlu bagi demokrasi. Tetapi jika dipermasalahkan secara sederhana “Siapa yang memiliki kekuasaan?” bukannya “Siapa yang diuntungkan kekuasaan?” maka konsep-konsep birokrasi, monarki atau aristokrasi dapat dilihat sebagai spesifikasi dari sifat kelompok atau individu yang memegang kekuasaan sepanjang masa.

Sayangnya, fakta yang kemudian terlihat tidak sesuai dengan narasi argumentatif yang bersifat ideal tersebut. Birokrasi dalam hal ini juga menunjuk kepada seperangkat peraturan yang dijalankan oleh para birokrat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Regulasi-regulasi ini disusun dan ditetapkan dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik supaya pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Akan tetapi

pada kenyataannya sering terjadi penyalahgunaan peraturan- peraturan tersebut oleh para oknum pejabat birokrasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Hal ini mengakibatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan menjadi apriori dan tidak lagi menghormati peraturan yang ada yang dibuat oleh pejabat publik. Akibatnya kemudian adalah adanya sikap antipati, tidak peduli dan berakhir dengan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang ada. Selanjutnya, teori yang paling berpengaruh berkenaan dengan kekuasaan pejabat adalah “hukum besi oligarki” dari Michels. Perkembangan terbaru konsep birokrasi ini dengan demikian tergantung pada modifikasi keabsolutan teori Michels. Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa pertama, permasalahannya sebenarnya bukanlah terletak dari kondisi apakah para pejabat birokrasi tersebut memiliki kekuasaan atau tidak, tetapi pada kondisi dimana seberapa luas kekuasaan yang mereka miliki; kedua, sebagai dampak dari kepemilikan terhadap kekuasaan tersebut, bahwa tipologi suatu pemerintahan sebuah negara akan didasarkan pada kekuasaan relatif yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang berbeda di negara tersebut dan bagaimana kemudian kekuasaan itu terbagi secara seimbang di antara kelompok-kelompok yang berkuasa. Pembagian kekuasaan yang seimbang dan tersebar merata di antara kelompok-kelompok pemilik kekuasaan tersebut akan sangat mewarnai wajah birokrasi negara tersebut. Bisa jadi beberapa masyarakat lebih birokratis daripada yang lain.

d. Birokrasi sebagai Administrasi Negara (Publik)

Identifikasi birokrasi dengan administrasi negara pada tahun-tahun belakangan ini, biasanya menjadi suatu kelompok dalam usaha untuk menjadikan yang tersebut terakhir suatu unit analisis dalam studi-studi perbandingan yang luas atau dalam suatu pendekatan sistem terhadap kehidupan politik pada umumnya. Hasilnya menjadi jauh lebih terpusat pada birokrasi sebagai suatu kelompok

penekan dan suatu pengaruh yang ada menurut nilai-nilai kemasyarakatan daripada proses-proses administrasi. Tidak ada suatu definisi formal, tetapi biasanya birokrasi diartikan sebagai sosok para pejabat administrasi, dan setelah elite yang berkuasa, “kelompok pertama yang turut dalam perjuangan politik”. Menurut Albrow (1989) studi terhadap sejarah dua puluh tujuh imperium di dunia, mengklasifikasi birokrasi menurut keterlibatan mereka dalam proses politik, yaitu:

- 1) Berorientasi sebagai abdi bagi penguasa dan strata sosial yang utama
- 2) Sepenuhnya tunduk kepada penguasa
- 3) Otonom dan berorientasi pada keuntungannya sendiri
- 4) Berorientasi pada diri sendiri tetapi juga melayani negara (polity) pada umumnya daripada strata tertentu apapun.

e. Birokrasi sebagai Administrasi yang Dijalankan oleh Pejabat

Konsep umum birokrasi Max Weber (yang berbeda dengan tipe idealnya) secara sederhana disamakan dengan administrasi yang dilaksanakan oleh para pejabat birokrasi yang ditunjuk. Akan tetapi konsep ini sebenarnya secara lebih luas memiliki hubungan dengan suatu kerangka yang kasat mata bagi analisis organisasi dimana dengan kerangka yang eksplisit itu organisasi dilihat sebagai struktur-struktur yang terdiri dari tiga unsur atau komponen. Pertama adalah staf-staf administrasi di dalam birokrasi yang menjalankan otoritas keseharian. Kelompok ini merupakan bagian penting dari birokrasi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih melalui proses seleksi untuk kemudian diangkat diangkat untuk menduduki posisi-posisi tertentu di birokrasi, dan mereka inilah yang disebut sebagai birokrat.

Birokrasi ditemukan di luar maupun di dalam pemerintahan. Persepsi seperti itu merupakan prasyarat penting bagi pengembangan suatu konsep yang cocok untuk semua jenis administrasi. Administrasi dan kebijakan biasanya

dibedakan sangat tajam dan sering merupakan suatu hal yang wajar menemukan organisasi-organisasi yang menggabungkan fungsi-fungsi tersebut, misalnya pemerintah sebuah negara. Birokrasi pemerintah atau negara membagi kekuasaan dimana perumusan kebijakan publik dilakukan oleh pejabat politik yang dipilih dalam pemilihan umum dan pelaksanaan kebijakan publik yang sudah dibuat itu dilakukan oleh aparat birokrasi sebagai pelaksananya.

f. Birokrasi sebagai Sebuah Organisasi

Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi yang mempunyai aturan-aturan yang jelas dan formal di dalam sebuah struktur yang terbentuk secara pasti. Organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat tim kerja yang bekerjasama dan melibatkan banyak orang, dimana setiap orang memiliki peran dan fungsi serta tugas yang saling mendukung satu sama lain guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebagai tujuan organisasi.

Sebagai sebuah sistem kerjasama, maka ini berarti bahwa organisasi merupakan: Satu, sistem yang menyangkut kegiatan dan pekerjaan yang disusun dan dirumuskan secara baik, dimana di dalamnya masing-masing pihak memiliki wewenang atau kekuasaan, tugas, juga tanggungjawab yang membuat semua orang sebagai bagian dari organisasi tersebut dapat bekerjasama dan bekerja bersama secara efektif dan saling mendukung satu sama lain. Kedua, sistem penugasan yang berupa pemberian tugas kepada orang-orang di dalam organisasi dilakukan berdasarkan kekhususan bidang kerja masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan orang tersebut. Ketiga, sistem yang ada adalah sistem yang dibuat secara terencana dari suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh tim kerja dimana setiap anggota organisasi akan mendapatkan peran tertentu yang harus dia laksanakan sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya, pandangan trikotomi tentang organisasi yang dikemukakan Weber amat berkaitan dengan citra hierarkis masyarakat pada masanya. Bagi Weber administrasi berarti penyelenggaraan wewenang (otoritas). Menurut pandangan Weber, dalam masyarakat, terdapat kelompok orang yang hanya menerima tatanan dan tidak pernah memiliki kewenangan untuk mengatur tatanan itu.

g. Birokrasi sebagai Masyarakat Modern

Birokrasi merupakan salah satu ciri dari sebuah masyarakat modern. Bagi masyarakat modern, keteraturan merupakan sebuah keharusan. Keteraturan ini dapat tercapai dengan adanya institusi formal yang melaksanakannya dimana institusi formal tersebut dengan regulasi yang ada dapat mengendalikan perilaku masyarakat yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Institusi forma itu adakah birokrasi.

Oleh karena itu, birokrasi dapat dipandang sebagai suatu perkembangan yang inheren dalam suatu gagasan yang konsepsinya diletakkan pada syarat yang sama dengan demokrasi, aristokrasi dan monarki. Hal ini juga sama tepatnya dengan menerapkan kata “demokratik” sebagai suatu julukan bagi suatu masyarakat seperti halnya bagi suatu pemerintahan. Tetapi jika perkembangan ini selalu menjadi sebuah potensial, kita tidak boleh meremehkan kesukaran pada masa awalnya. Untuk mengatakan bahwa kelas yang berkuasa adalah para manajerial hampir sama halnya dengan mengatakan kelas yang berkuasa itu adalah birokrasi negara. Perkembangan selanjutnya, pertumbuhan organisasi juga melingkupi sebuah kondisi dimana terjadi birokratisasi masyarakat, dan itu sama dengan masyarakat menjadi sangat birokratis, segalanya diatur oleh negara.

J. Hasil Penelitian Terdahulu

Memahami e-Government melalui perbandingan penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk mengenali bagaimana pendekatan, teknologi, dan strategi dalam e-Government telah berkembang seiring waktu. Penelitian-penelitian ini sering mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-Government, seperti isu keamanan, kesenjangan digital, dan resistensi pengguna, serta menyediakan pemahaman tentang solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain itu, dengan membandingkan studi dari berbagai konteks geografis, budaya, dan sosio-ekonomi, kita memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang menjadi landasan untuk inovasi dalam e-Government, mendorong pemerintah untuk beradaptasi dan meningkatkan layanannya. Oleh karena itu penulis menjabarkan sepuluh penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Windiasih (2019) Dengan Judul Penelitian Komunikasi Pembangunan Di Era Digital Melalui E-Government Dalam Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan.

Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek penelitian dipilih secara purposif, termasuk pemerintah daerah di Eks-Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah, akademisi, dan masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi pembangunan dengan media teknologi informasi dan komunikasi melalui e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan responsif. Ini termasuk partisipasi aktif dari publik dan transparansi anggaran serta program

pembangunan. Penelitian juga menemukan perlunya mengantisipasi kesenjangan teknologi informasi, membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan daerah dan publik, serta memperluas fasilitas akses jaringan informasi.

2. Oktavya (2015) dengan judul “Penerapan (Electronic Government) e-government Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang”,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang belum optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat; sumber daya manusia yang belum memadai; anggaran yang belum memadai; serta kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem electronic government (e-government) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bontang belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penggunaan electronic government (e-government). Kedua, kurangnya persiapan SDM yang terlihat pada penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya serta posisi Operator Console yang hanya ditangani oleh satu pegawai saja. Kemudian yang ketiga, untuk hal dukungan dalam bentuk anggaran tidak menjadi prioritas utama dalam pengembangan electronic government (e-government). Terakhir yang keempat, dari segi infrastruktur bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya pada seksi pengolahan data dan informasi sudah memadai namun infrastruktur yang disediakan untuk masyarakat masih kurang dikarenakan hanya terdapat satu unit komputer saja.

Kemudian kendala yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi yang secara khusus dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam memperkenalkan maupun memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai electronic government (e-government) sehingga membuat masyarakat apatis terhadap penerapan e-government tersebut.

3. Nur (2014) dengan judul “Penerapan Egovernment Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan Di Kota Palu”,

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Kota Palu pada penerapan egovernment belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan Pemerintah Kota Palu masih “setengah hati” dan “kurang serius” dalam mendukung pelaksanaan e-government dalam pemerintahan. Media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah diwujudkan dalam website pemerintah atau electronic government (egovernment) bisa dijadikan media komunikasi digital dalam pembangunan di daerah sebagai wahana perwujudan demokratisasi, transparansi, partisipasi, evaluasi, kontrol dan interaksi publik, kemudian sebagai media digital untuk menyebarkan informasi, penyampaian informasi atau sosialisasi, transparansi serta akuntabilitas kepada publik tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan.

4. Rasyid (2013). Rasyid (2013), “Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen APBD di Provinsi Papua”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 dan Untuk mengetahui pengaruh kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, faktor politik anggaran dan instrumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap sinkronisasi dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009.

Populasi penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 45 SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil analisis MKPP tersebut dapat kita simpulkan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD.

5. Anna Trisnayanti dan Jauhar Arifin (2023) berjudul "Implementasi Aplikasi E-Office Dilihat dari Aspek Sumber Daya dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong",

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi kepada 54 responden. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis statistik sederhana menggunakan persentase, dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi E-Office dari aspek sumber daya dan komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan kabupaten Tabalong dapat dikategorikan sangat terimplementasi. Beberapa indikator yang diukur mendapatkan nilai yang bervariasi, dengan indikator absensi mencapai nilai tertinggi (95%) dan indikator

E-Kinerja mendapatkan nilai terendah (73%). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi E-Office telah berjalan dengan baik dari segi sumber daya dan komunikasi.

6. Arianto & Tuti Bahfiarti (2020). "Computer Mediated Communication Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat"

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dari berbagai sumber dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa aplikasi e-planning berbasis website digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Fitur-fitur e-planning digunakan untuk input dokumen seperti RPJMD, Renstra, Pokir, dan hasil Musrembang. Terdapat juga fitur monitoring dan kontrol terintegrasi untuk menentukan program penganggaran. Studi ini menyimpulkan bahwa e-planning berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, dengan integrasi perencanaan dan anggaran serta mempercepat proses pembuatan keputusan yang berpedoman pada kepentingan publik.

7. Kang Xia, Jian-ke Guo, Zeng-lin Han, Meng-ru Dong, dan Yan Xu (2019). "Analysis of the scientific and technological innovation efficiency and regional differences of the land-sea coordination in China's coastal areas"

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efisiensi inovasi ilmiah dan teknologi menggunakan metode Global Malmquist-Luenberger (GML) index. Penelitian ini juga menggunakan metode koefisien variasi untuk mengevaluasi perbedaan regional dalam inovasi ilmiah dan teknologi. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber termasuk China Marine Statistical Yearbook dan China Statistical Yearbook on Science and Technology.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan produktivitas faktor total dari efisiensi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di area pesisir China umumnya lebih besar dari 1, menunjukkan efisiensi yang tinggi. Area campuran darat dan laut memiliki nilai efisiensi GML yang lebih tinggi dibandingkan hanya area darat atau laut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan regional dalam efisiensi inovasi ilmiah dan teknologi telah secara bertahap mengecil. Selain itu, krisis keuangan 2008-2009 berdampak positif terhadap efisiensi teknis murni. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana terkoordinasi untuk area darat dan laut membantu meningkatkan efisiensi inovasi ilmiah dan teknologi regional secara keseluruhan.

8. Evgeniy Kutsenko, Ekaterina Islankina, dan Alexey Kindras (2018) "Smart by Oneself? An Analysis of Russian Regional Innovation Strategies within the RIS3 Framework"

Penelitian ini berfokus pada strategi inovasi regional di Rusia dalam kerangka Smart Specialization (RIS3). Metode yang digunakan adalah analisis terhadap strategi inovasi dari tujuh wilayah Rusia menggunakan alat penilaian yang disesuaikan dari RIS3 Self-Assessment Wheel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi regional di Rusia rata-rata memenuhi 37% kriteria spesialisasi pintar. Aspek yang paling lemah dalam strategi inovasi adalah "Menganalisis lingkungan eksternal" dan "Melibatkan berbagai pemangku kepentingan". Sebagian besar strategi hanya melihat inovasi dari segi penelitian dan pengembangan (R&D) dan mengabaikan tantangan global. Tidak ada korelasi langsung yang ditemukan antara potensi inovatif regional dan kualitas strategi berdasarkan kriteria spesialisasi pintar. Misalnya, Wilayah Sverdlovsk, yang merupakan pemimpin dalam memenuhi kriteria

spesialisasi pintar (11 dari 18 kriteria), memiliki posisi yang cukup tinggi dalam peringkat inovasi regiona.

9. Erik Kalalembang, Alwi, dan Arianto (2019) "E-Planning dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat"

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari 15 informan yang dipilih berdasarkan purposive sampling. Analisis data dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-planning berbasis new media di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan sistem perencanaan pemerintahan. E-planning memiliki karakteristik yang mencakup penggunaan dan fleksibilitas sesuai kebutuhan organisasi, kemudahan dalam berbagi dan pertukaran informasi, penyimpanan database yang efektif dan efisien, sinkronisasi data dan dokumen perencanaan, serta keterlibatan masyarakat atau organisasi dalam mengakses informasi. Kesimpulannya, sistem e-planning telah membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memberikan kelebihan dalam aspek-aspek seperti efisiensi waktu, pengelolaan data yang lebih baik, dan partisipasi publik yang lebih luas.

10. Pusp Raj Joshi and Shareeful Islam (2018) "Model Kematangan E-Government untuk Layanan E-Government yang Berkelanjutan"

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam penyampaian layanan e-government yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Studi ini mengidentifikasi keterbatasan dalam model kematangan e-government yang ada, seperti kurangnya teknologi, anggaran terbatas, sumber daya manusia yang

terbatas, kurangnya proses yang rinci, sifat yang berfokus pada teknologi, penekanan pada implementasi, dan tidak adanya strategi adopsi. Metode studi kasus dipilih khusus untuk kemampuannya dalam memberikan data deskriptif dan eksplanatori.

Studi menemukan bahwa mengintegrasikan berbagai sistem e-government yang berada di lokasi geografis yang berbeda membentuk sistem yang terkonsolidasi. Ini memungkinkan pemerintah daerah pedesaan untuk menyampaikan berbagai layanan pemerintah dengan lebih efisien, menghemat waktu dan usaha. Integrasi ini mengarah pada proses pemerintahan yang lebih efisien dan mengurangi kebutuhan untuk pemrosesan informasi secara manual. Penggunaan platform komputasi awan untuk integrasi ini ditemukan hemat biaya dan efisien.

Tabel 2. 4 Matriks Persamaan dan Perbedan Penelitian Terdahulu dan Hasil Kajian Disertasi ini

N o	Penulis, Tahun, & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
1	Windiasih (2019), Komunikasi Pembangunan di Era Digital Melalui E-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan	Pentingnya komunikasi pembangunan melalui e-Government untuk pelayanan publik yang responsif, termasuk partisipasi publik dan transparansi. Antisipasi kesenjangan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, dan fasilitas akses jaringan informasi	Metode Penelitian Kualitatif studi kasus. Kedua penelitian fokus pada penggunaan e-Government dalam konteks pembangunan dan komunikasi digital	Windiasih fokus pada pelayanan publik dan pemberdayaan, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada sinkronisasi perencanaan pembangunan antar daerah. Windiasih lebih menekankan pada partisipasi publik dan transparansi, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada tantangan sinkronisasi dan infrastruktur
2	Oktavya (2015), Penerapan e-Government pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian	Penerapan e-Government di KPP Pratama Bontang belum optimal; isu partisipasi masyarakat, SDM, anggaran, dan infrastruktur. Kurangnya partisipasi masyarakat, SDM yang belum memadai, anggaran	Kedua penelitian fokus pada penerapan e-Government dalam konteks pelayanan publik dan perencanaan pembangunan. Kedua menggunakan	Oktavya fokus pada pelayanan pajak, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada sinkronisasi perencanaan pembangunan. Oktavya lebih fokus pada operasional KPP Pratama, sedangkan

No	Penulis, Tahun, & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	Pelayanan di Kota Bontang	terbatas, sosialisasi yang kurang. Perlu peningkatan sosialisasi, ketersediaan infrastruktur, dan peningkatan anggaran	metode kualitatif. Keduanya menemukan tantangan dalam implementasi e-Government dan menyoroti pentingnya infrastruktur TIK	disertasi Sulawesi Barat pada aspek perencanaan pembangunan yang lebih luas
3	Nur (2014), Penerapan e-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan di Kota Palu	Afrika Selatan mewakili Penerapan e-Government di Kota Palu belum optimal; peran media TIK dalam demokratisasi, transparansi, dan interaksi publik. Implementasi e-Government yang "setengah hati" dan kurang serius oleh Pemerintah Kota Palu. Peningkatan dukungan pemerintah daerah dan pemanfaatan media TIK untuk transparansi dan interaksi publik	Kedua studi fokus pada e-Government dalam konteks pembangunan daerah dan pelayanan public. Keduanya menggunakan metode kualitatif. Keduanya menemukan bahwa e-Government berpotensi meningkatkan transparansi dan partisipasi publik	Nur fokus pada implementasi e-Government di SKPD Kota Palu, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada sinkronisasi perencanaan pembangunan antar pemerintah daerah. Nur lebih menekankan pada aspek demokratisasi dan interaksi publik, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada sinkronisasi perencanaan dan kolaborasi antar pemerintah daerah
4	Rasyid (2013), Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen APBD di Provinsi Papua.	Rendahnya derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Papua. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Perlunya memperbaiki koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran	Keduanya menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Keduanya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Keduanya mengungkapkan masalah sinkronisasi dalam perencanaan pemerintah daerah	Rasyid fokus pada sinkronisasi dokumen perencanaan dan APBD di Papua, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada komunikasi digital dalam perencanaan pembangunan. Rasyid lebih menyoroti inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada penggunaan e-Government untuk sinkronisasi. Rasyid fokus pada masalah internal pemerintah daerah, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada tantangan eksternal seperti infrastruktur TIK.
5	Anna Trisnayanti dan Jauhar Arifin (2023),	Implementasi E-Office di Kabupaten Tabalong berjalan baik, terutama	Kedua penelitian fokus pada penggunaan teknologi digital	Studi Anna dan Jauhar lebih spesifik pada implementasi E-Office di satu kabupaten,

No	Penulis, Tahun, & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
	Implementasi Aplikasi E-Office Dilihat dari Aspek Sumber Daya dan Komunikasi pada Bappeda Kabupaten Tabalong	dalam aspek absensi dan komunikasi	dalam pemerintahan. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Keduanya menyoroti efektivitas teknologi digital dalam meningkatkan pemerintahan.	sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada komunikasi digital dalam perencanaan pembangunan regional. Fokus Anna dan Jauhar pada operasional internal sebuah badan pemerintahan, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
6	Arianto & Tuti Bahfiarti (2020), Computer Mediated Communication dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	e-planning meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan	Keduanya meneliti penggunaan teknologi digital dan e-Government dalam perencanaan pembangunan daerah. Kedua menggunakan metode kualitatif. Keduanya mengakui efektivitas e-Government dalam perencanaan pembangunan	Arianto & Tuti Bahfiarti fokus pada aplikasi e-planning, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada komunikasi digital secara umum. Arianto & Tuti Bahfiarti menemukan aplikasi e-planning efektif, sedangkan disertasi Sulawesi Barat menyoroti tantangan dalam sinkronisasi perencanaan. Kendala yang diidentifikasi berbeda; studi Arianto & Tuti Bahfiarti tidak menyoroti kendala spesifik, sedangkan disertasi Sulawesi Barat fokus pada tantangan operasional dan teknis
7	Kang Xia et al. (2019), Analysis of Scientific and Technological Innovation Efficiency in China's Coastal Areas	Efisiensi inovasi ilmiah dan teknologi di China tinggi, dengan perbedaan regional mengecil.	Kedua studi meneliti efisiensi dan efektivitas dalam konteks pembangunan regional. Keduanya menemukan pentingnya efisiensi dan koordinasi dalam pembangunan regional. Keduanya menyoroti aspek teknologi dalam pembangunan	Kang Xia et al. fokus pada inovasi ilmiah dan teknologi di China, sementara disertasi Sulawesi Barat pada komunikasi digital dalam e-Government. Pendekatan Kang Xia et al. lebih kuantitatif dan statistik, sementara disertasi Sulawesi Barat lebih kualitatif. Fokus Kang Xia et al. pada efisiensi inovasi, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada penggunaan e-Government untuk

No	Penulis, Tahun, & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
				perencanaan pembangunan
8	Evgeniy Kutsenko et al. (2018), Smart by Oneself? An Analysis of Russian Regional Innovation Strategies within the RIS3 Framework	Efisiensi strategi inovasi regional di Rusia, dengan beberapa kelemahan dalam aspek "Menganalisis lingkungan eksternal" dan "Melibatkan berbagai pemangku kepentingan" dalam strategi inovasi	Keduanya meneliti strategi dan implementasi dalam konteks regional, dengan fokus pada inovasi dan teknologi. Keduanya mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam implementasi strategi regional. Keduanya menekankan pentingnya strategi dan perencanaan yang efektif	Studi Kutsenko et al. terfokus pada strategi inovasi regional di Rusia, sementara disertasi Sulawesi Barat pada penggunaan e-Government dalam perencanaan pembangunan. Kutsenko et al. menemukan kelemahan dalam analisis lingkungan eksternal dan melibatkan pemangku kepentingan, sedangkan disertasi Sulawesi Barat menyoroti tantangan sinkronisasi dan infrastruktur TIK
9	Erik Kalalembang et al. (2019), E-Planning dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	e-planning meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan	Kedua studi meneliti penggunaan teknologi digital dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Kedua menggunakan metode kualitatif. Keduanya membahas penggunaan teknologi digital dalam perencanaan pemerintah daerah.	Kalalembang et al. fokus pada implementasi e-planning, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada komunikasi digital secara umum dalam e-Government. Kalalembang et al. menemukan aspek positif dari e-planning, sedangkan disertasi Sulawesi Barat menyoroti tantangan dalam sinkronisasi perencanaan
10	Pusp Raj Joshi and Shareeful Islam (2018), Model Kematangan E-Government untuk Layanan E-Government yang Berkelanjutan	Integrasi sistem e-government yang berada di lokasi geografis yang berbeda membentuk sistem yang terkonsolidasi, meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu serta usaha. Keterbatasan dalam model kematangan e-government yang ada, seperti kurangnya teknologi, anggaran	Kedua studi fokus pada penggunaan teknologi digital dalam konteks e-Government. Kedua menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian. Keduanya mengidentifikasi pentingnya integrasi dan koordinasi dalam	Penelitian Joshi dan Islam berfokus pada pengembangan model kematangan e-Government, sedangkan disertasi Sulawesi Barat pada analisis penggunaan komunikasi digital dalam perencanaan pembangunan. Penelitian Joshi dan Islam menemukan solusi untuk meningkatkan

No	Penulis, Tahun, & Judul	Hasil Kajian	Persamaan	Perbedaan
		terbatas, dan sumber daya manusia	sistem e-Government	efisiensi, sedangkan disertasi Sulawesi Barat menyoroti tantangan yang dihadapi dalam sinkronisasi perencanaan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

K. Kerangka Pikir

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari tingkat Kabupaten kemudian baru dilanjutkan ditingkat provinsi.

Dalam proses perencanaan pembangunan tersebut selalu membutuhkan waktu yang lama sehingga kecenderungan informasi dari bawah membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai keatas, dan seringkali informasi dari bawah tidak tersampaikan secara utuh, sulit dijangkau dan tidak terpetakan, sedangkan keputusan perencanaan harus segera dikeluarkan. Akhirnya rencana pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi tidak sinkro dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat bawah. Salah satu masalahnya utamanya yaitu saluran komunikasi antara masyarakat tidak tersampaikan sampai kepihak atas dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Hasil penelitian Mutula (2008) teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan komunikasi, dimana menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi mendukung kegiatan perencanaan pembangunan (Mutula, 2008; Hafsari, dkk. 2020).

Fauziah dan Hedwig (2010) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang digunakan untuk menangani informasi dan membantu cara komunikasi (pengolahan informasi). Kemajuan Teknologi Informasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan, termasuk dalam proses komunikasi. Dimana kemajuan teknologi informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun manusia dengan perangkat teknologi tersebut dapat menjalin konektivitas, memperoleh informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain.

Oleh karena itu berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan manusia untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi lainnya adalah membantu proses komunikasi pemerintahan. Berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia mulai menggunakan teknologi informasi untuk menyuguhkan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintah yang dikenal dengan e-government (Bahtiar, 2018).

Indrajit (2006) *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan,

dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

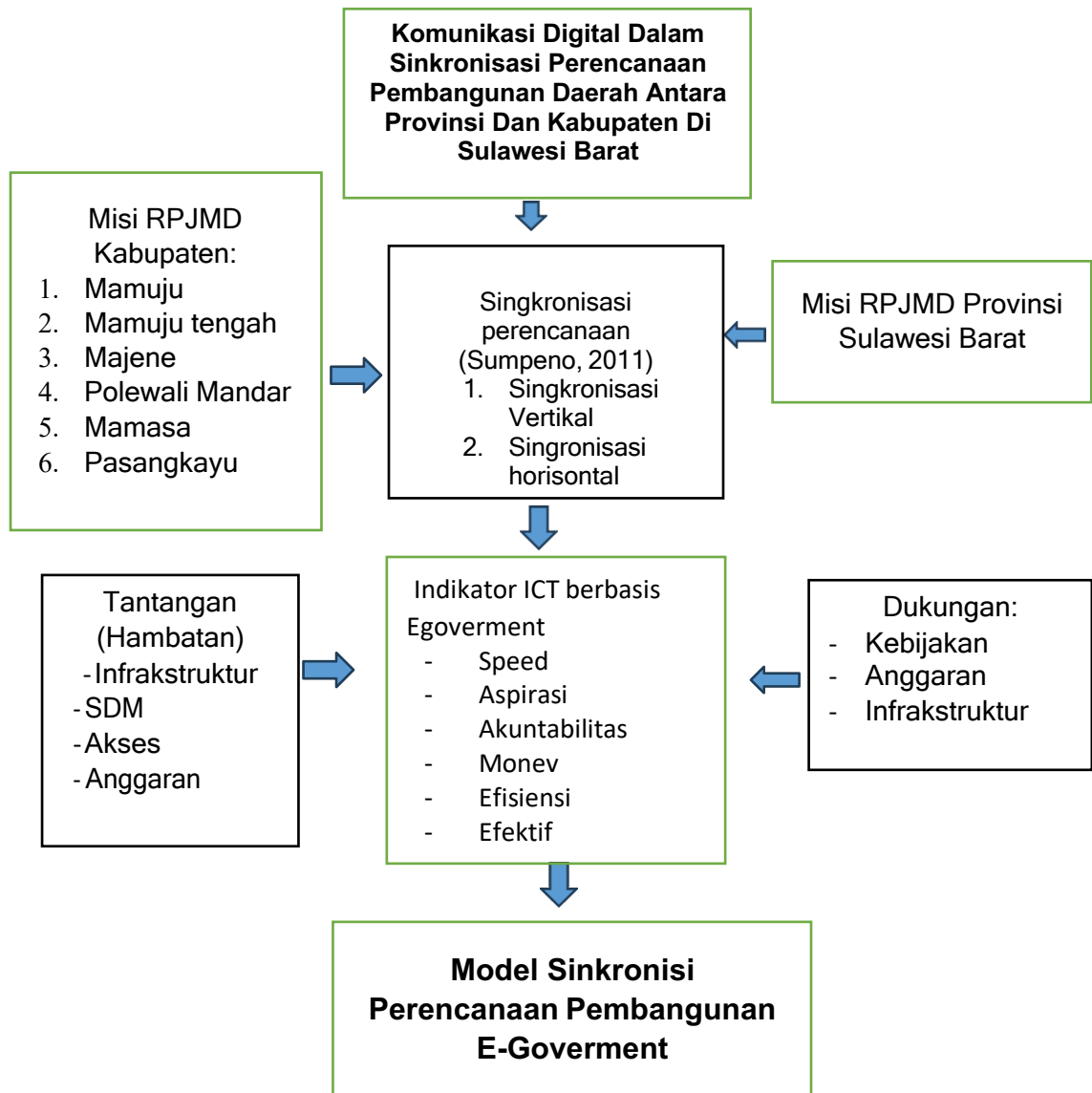
Rianto, dkk (2012) menyimpulkan bahwa e-government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan system jaringan komunikasi.

Menurut Hasibuan dan Santoso (2005) pentingnya e-government ini antara lain mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat; mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi; dan mendorong tingkat partisipasi publik didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu melalui proses perencanaan pembangunan.

Dengan menggunakan konsep e-goverment sebagai media komunikasi baru dalam proses sinkronisasi perencanaan pembangunan, akan memudahkan dalam menyusun rencana pembangunan karena telah memanfaatkan teknologi informasi (komunikasi digital) sehingga penerimaan informasi dari bawah dapat tersampaikan secara cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama.

Tercapainya tingkat akuntabilitas perencanaan program pembangunan, mudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan ditingkat bawah, dan yang lebih penting dalam pemanfaatan e-government bersifat efisien dan efektif, karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menghasilkan program pembangunan daerah sesuai kebutuhan daerah dan khususnya kebutuhan tingkat bawah (masyarakat).

E-goverment diharapkan jadi jawaban atas permasalahan terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan selama ini, maka dalam penerapan e-government harus jelas kebijakannya, kemudian adanya dukungan anggaran dan infrakstruktur. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu menunjukkan belum terlalu efektif dalam penerapan e-government karena masih ditemukan sejumlah tantangan-tantagan diantaranya infrastruktur yang terbatas, kesiapan sdm terkait pemahaman terhadap literasi IT, akses terhadap jaringan internet, serta dukungan anggaran yang menjadi kendala dalam menggunakan dan mengembangkan model e-government.



Gambar 2. 10 Kerangka Pikir

L. Definisi Operasional

Penerapan komunikasi digital dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang penting. Dimana semua sistem perencanaan diharapkan menggunakan sistem digital yang dapat lebih akuntabel dan mudah untuk disinkronisasi. Adapun kajian yang konsep dalam komunikasi digital dalam pemerintahan lebih dikenal dengan istilah electronic Governance (E-Gov).

Penerapan sistem Egov dalam pemerintahan di Indonesia mulai massif sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional. Pengembangan E-Government. Setelah itu, beberapa regulasi dari tingkat pusat dan daerah terbit untuk menguatkan termasuk didalamnya penerapan sistem Egov dalam perencanaan pembangunan ditingkat daerah.

Salah satu daerah yang menurut observasi awal yang memiliki perencanaan yang kurang sinkron antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yakni di Provinsi Sulawesi Barat. Dimana acuan utama dalam perencanaan pembangunan yakni pada Misi masing - masing kabupaten dengan provinsi. Dari sinilah pentingnya analisis terkait sistem komunikasi digital untuk menguatkan koordinasi sinkronisasi misi masing – masing kabupaten dengan Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana perkembangan penerapan egov, sinkronisasi perencanaan pembangunan sebelum dan setelah penerapan Egov, hasil perencanaan pembangunan berbasis digital, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan sumber daya manusia. Adapun untuk menganalisis terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan dianalisis berdasarkan konsep berikut yakni:

1. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal Dilakukan dengan menyelaraskan proses dan produk perencanaan dengan melihat keterkaitan dengan hierarki peraturan yang berlaku atau arah kebijakan pembangunan dan tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya; penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM desa) dengan memperhatikan kebijakan atau dokumen rencana pembangunan pada tingkat kabupaten/kota (RPJM Kabupaten/kota)

2. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi horizontal dilakukan dengan menyelaraskan proses dan produk perencanaan dengan melihat kebijakan dan rencana pembangunan yang setara serta mengelola bidang yang sama atau terkait. Misalnya: penyusunan Renstra SKPD pada bidang tertentu dengan bidang lain yang setara.

Adapun kemampuan e-government ini dianalisis berdasarkan ICT yakni:

1. Speed (Kecepatan)

Kecepatan layanan e-government diukur berdasarkan waktu respons dalam memproses permintaan, pengajuan, atau keluhan dari masyarakat. Waktu respons dihitung dari saat permintaan atau pengajuan diterima hingga masyarakat menerima tanggapan atau solusi atas permintaan atau keluhan tersebut.

2. Aspirasi

Aspek aspirasi dalam e-government dinilai melalui mekanisme partisipatif yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kontribusi mereka terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas e-government dinilai melalui tingkat transparansi pemerintah dalam menyajikan kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik. Pengukuran dilakukan berdasarkan ketersediaan informasi publik dan tingkat kepatuhan pemerintah dalam memberikan laporan pertanggungjawaban.

4. Monev (Monitoring dan Evaluasi)

Monev dalam e-government mencakup sistem pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menerapkan layanan dan kebijakan e-government. Pengukuran dilakukan dengan memantau indikator kinerja dan efektivitas layanan e-government.

5. Efisiensi

Efisiensi e-government diukur berdasarkan kemampuannya dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja. Pengukuran melibatkan analisis proses layanan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi.

6. Efektivitas

Efektivitas e-government dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fokus tantangan sinkronisasi pada infrastruktur, SDM, Akses dan anggaran, sejauh mana dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, anggaran dan infrastruktur. Dari analisis ini, selanjutnya akan dirumuskan model sinkronisasi perencanaan pembangunan berbasis Egov di pemerintah provinsi dan 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.

M. Asumsi

- i. Terdapat keselarasan yang kuat dalam upaya mencapai pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di beberapa wilayah Sulawesi Barat, tetapi juga terdapat ketidakeselarasan di wilayah lain yang memerlukan koordinasi dan rencana pembangunan yang lebih terintegrasi.
- ii. Proses transformasi e-government di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat, telah mengalami perubahan signifikan dari sistem manual ke digital. Pemerintah telah mengembangkan Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang disederhanakan, termasuk SIPD yang telah diterapkan secara nasional dengan penggunaan big data untuk integrasi. Meskipun implementasi di Sulawesi Barat masih dalam tahap pengembangan, upaya kolaborasi dengan Universitas Gajah Mada untuk merancang dokumen arsitektur e-government telah dilakukan.
- iii. Penerapan e-government di Sulawesi Barat menghadapi tantangan dalam mensinkronkan perencanaan antara kabupaten dan provinsi. Implementasi digital yang berjenjang belum sepenuhnya terwujud, dan terdapat perbedaan dalam pengolahan data dan fungsi pembinaan antara pemprov dan Pemkab.
- iv. Dalam lima tahun terakhir, pemasangan jaringan Fiber Optik di desa-desa dan kabupaten di Sulawesi Barat menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas internet dan mendukung implementasi e-government. Infrastruktur TIK yang

memadai sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perencanaan pembangunan.

- v. Implementasi e-government di bidang perencanaan pembangunan daerah di Sulawesi Barat menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk infrastruktur fisik dan akses internet yang belum memadai, kurangnya sinkronisasi visi dan misi, serta kurangnya integrasi sektoral.
- vi. Kesiapan SDM dalam menjalankan sistem e-government masih menjadi tantangan. Tingkat persiapan teknologi e-government yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM yang terlibat.